



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KINERJA PROGRAM BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN (RASKIN)
DI KABUPATEN TANGERANG
(STUDI KASUS PELAKSANAAN 2008 DI KECAMATAN
CISAUK, PAGEDANGAN, PONDOK AREN, DAN SERPONG)**

TESIS

**ARIF WAHYUDI
0606012251**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK**

**JAKARTA
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KINERJA PROGRAM BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN (RASKIN)
DI KABUPATEN TANGERANG
(STUDI KASUS PELAKSANAAN 2008 DI KECAMATAN
CISAUK, PAGEDANGAN, PONDOK AREN, DAN SERPONG)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi

**ARIF WAHYUDI
0606012251**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK**

**JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

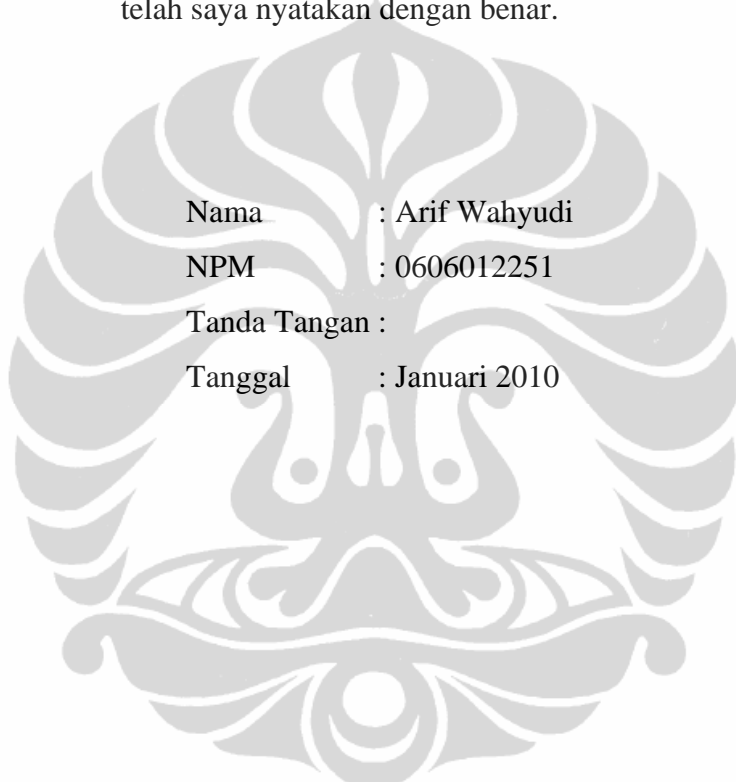
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Arif Wahyudi

NPM : 0606012251

Tanda Tangan :

Tanggal : Januari 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Arif Wahyudi
NPM : 0606012251
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Evaluasi Kinerja Program Beras Untuk Keluarga Miskin
(Raskin) di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus
Pelaksanaan Tahun 2008 di Kecamatan Cisauk,
Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Sulastri Surono (.....)
Penguji : Hera Susanti, SE., M.Sc..... (.....)
Penguji : Dr. Ir. Riyanto(.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Profesor Dr. Sulastrisurono, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Norpansyah Kepala Bulog Sub Divisi Regional Banten/Serang, Bapak Bambang Sugeng Kepala Bulog Sub Divisi Regional Tangerang, Bapak Nana Mulyana Kepala BKP3M Kabupaten Tangerang, serta segenap responden yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (4) sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Januari 2010

Arif Wahyudi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Wahyudi

NPM : 0606012251

Program Studi : Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah

Departemen : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Fakultas : Ekonomi

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Evaluasi Kinerja Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelaksanaan Tahun 2008 di Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2010

Yang menyatakan,

(Arif Wahyudi)

ABSTRAKSI

Nama : Arif Wahyudi
Program Studi : Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah MPKP
Judul : Evaluasi Kinerja Program Beras untuk Keluarga Miskin
(Raskin) di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Pelaksanaan 2008 di Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong)

Tesis ini menyajikan evaluasi kinerja program raskin di empat kecamatan di Kabupaten Tangerang yaitu Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong berdasarkan Indikator 6 T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar Bulog Tangerang meningkatkan kualitas raskin yang dibagikan, Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan sosialisasi program ke masyarakat serta mengalokasikan APBD untuk dana pendamping, dan agar program ini diteruskan.

Kata kunci: evaluasi, kinerja, raskin, tangerang, indikator 6 T

ABSTRACT

Name : Arif Wahyudi
Study Program : Economy Planning for City and County
Title : Performance Evaluation of Rice for the Poor Program in
Tangerang (Case Study Implementation in 2008 in Cisauk,
Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong)

Focus of this study is evaluating the performance of rice for the poor program implementation in 2008 in four districts of Tangerang County i.e: Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, and Serpong based on 6 right indicators provided (objective right, quantity right, price right, timely right, administration right, and quality right). This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests BULOG (the government body for managing the logistic) to improve the quality of the rice distributed, regional government to gain the program socialization effort and to allocate sufficient fund to succeed this program, and continuing the program as demanded by the poor.

Key words: evaluation, performance, rice for the poor program, tangerang, 6 right indicators.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Tangerang.....	1
1.1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Berfikir	5
1.6. Data dan Metodologi Penelitian	7
1.6.1. Data	7
1.6.2. Sampel dan Responden.....	7
1.6.3. Metode Analisis	10
1.6.4. Peralatan Pemantauan dan Evaluasi	10
1.7. Sistematika Penulisan	11
2. LATAR BELAKANG TEORI	13
2.1. Kebijakan Publik	13
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	15
2.3. Evaluasi Kebijakan Publik	17
2.4. Kebijakan Pemerintah Dalam Masalah Kemiskinan	21
2.5. Penelitian Program Raskin Yang Pernah Dilakukan	26
3. METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Metode Pengumpulan Data	31
3.3. Metode Analisis Data	32
4. PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI INDONESIA DAN KABUPATEN TANGERANG	34
4.1. Program Raskin Sebagai Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	36
4.2. Pedoman Umum Raskin	37
4.3. Pelaksanaan Program Raskin Di Kabupaten Tangerang	43

5. EVALUASI KINERJA PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN TANGERANG – STUDI KASUS PELAKSANAAN TAHUN 2008 DI KECAMATAN CISAUK, PAGEDANGAN, PONDOK AREN DAN SERPONG	62
5.5. Hasil Penelitian Lapangan	62
5.6. Evaluasi Kinerja Program Raskin.....	80
5.7. Perbandingan dengan Temuan Terdahulu	87
6. KESIMPULAN DAN SARAN	91
6.1. Kesimpulan	91
6.2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	95



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Empat Belas Indikator Kemiskinan BPS
Tabel 4.1	Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Tangerang 2004 - 2008
Tabel 4.2	Alokasi RTM Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Banten 2007-2008
Tabel 4.3	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Tabel 4.4	Alokasi Raskin Kabupaten / Kota Provinsi Banten 2008
Tabel 4.5	Alokasi Raskin per Kecamatan, Desa/Kelurahan se- Kabupaten Tangerang 2008
Tabel 4.6	Realisasi Raskin per Kecamatan se Kabupaten Tangerang Tahun 2008
Tabel 4.7	Realisasi Raskin di Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong 2008
Tabel 5.1	Sebaran Responden RTM dan Tokoh Masyarakat
Tabel 5.2	Sebaran Responden RTM Berdasar Jenis Kelamin dan Usia
Tabel 5.3	Sebaran Responden RTM Berdasar Tingkat Pendidikan
Tabel 5.4	Sebaran Responden RTM Berdasar Pekerjaan dan Penghasilan
Tabel 5.5	Sebaran Responden Tokoh Masyarakat Berdasar Jenis Kelamin dan Usia
Tabel 5.6	Pemahaman Responden RTM Terhadap Program Raskin (dampak sosialisasi)
Tabel 5.7	Respons RTM Terhadap Pelaksanaan Raskin
Tabel 5.8	Pemahaman Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Program Raskin (dampak sosialisasi)
Tabel 5.9	Respons Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Raskin
Tabel 5.10	Evaluasi Pelaksanaan Raskin Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong Berdasar 6 T
Tabel 5.11	Ikhtisar Temuan Tesis ini dan Temuan Peneliti Lain

DAFTAR GAMBAR

Diagram 1.1. Kerangka Pemikiran

Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Tangerang



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rencana Kuisisioner untuk RTM dan Tokoh Masyarakat
- Lampiran 2 Rencana Kuisisioner *Indepht Interview*
- Lampiran 3 Profil Responden
- Lampiran 4 Respons Terhadap Sosialisasi
- Lampiran 5 Respons Terhadap Pelaksanaan



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Program raskin (Pedoman Umum Raskin, 2008)¹ adalah program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Program ini merupakan kelanjutan program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998. Pada 2008, Raskin menargetkan penyediaan 2,77 juta ton beras bagi 19,1 juta rumah tangga miskin dengan total biaya subsidi Rp 7,8 triliun. Setiap rumah tangga menerima 145 kg beras selama 10 bulan dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram di titik distribusi. Penyaluran raskin hingga titik distribusi menjadi tanggung jawab Bulog, sementara penyaluran dari titik distribusi kepada rumah tangga sasaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Munculnya berbagai penyimpangan program raskin, tidak lepas dari adanya perbedaan persepsi terhadap raskin dan miskin. Hal inilah yang selalu menjadi perdebatan sengit pembuat kebijakan, pelaksana program, maupun kelompok sasaran. Kendati demikian, bila dicermati program raskin merupakan program yang paling efektif dibanding program-program lain dalam penanggulangan kemiskinan. Sementara dalam program raskin, sumber masalah utama terletak pada sosialisasi, pendataan dan distribusi serta tidak adanya institusi lokal khusus yang menangani raskin².

1.1.1. Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Tangerang

Beberapa tahun ini Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin atau sering disebut program raskin menjadi berita di berbagai media khususnya di Kabupaten

¹ Kemenkokesra, Pedoman Umum Raskin 2008, 2007

² <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=653>

Tangerang³. Mulai dari kualitas dan kuantitasnya yang mengecewakan, keengganan birokrasi untuk menyalurkannya, hingga upaya penegak hukum terhadap oknum aparat yang diduga menyimpangkannya. Terlepas dari itu semua, masyarakat miskin yang merupakan sepertiga penduduk Kabupaten Tangerang sangat berharap raskin segera terdistribusi sebagaimana aturan. Tekad yang dinyatakan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyalurkannya raskin menjadi angin segar di tengah keterlambatan penyaluran selama ini.

Teridentifikasi bahwa banyak keluhan masyarakat yang tidak menerima raskin 2008. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mendengar atau pun melihat pelaksanaan pembagian raskin di lingkungan mereka. Kalau pun ada masyarakat yang mengaku menerima, maka mereka hanya menerima sekitar lima liter, dua atau tiga kali sepanjang tahun dengan harga sekitar Rp2.000/lt. Itu pun dengan kualitas beras tidak cukup bagus.

Temuan ini jauh menyimpang dari Pedoman Umum Raskin tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan dua SK Gubernur tentang Penetapan Alokasi Pagu Raskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2008. SK pertama menetapkan 10 kg/RTM/bulan bertanggal 7 Januari 2008, dan SK kedua bertanggal 12 Februari 2008 yang merevisi menjadi 15 kg/RTM/bulan mulai Februari s.d Oktober 2008. Harga tebus ditetapkan Rp1.600/kg di titik distribusi, dengan kualitas beras medium kondisi baik. Kualitas beras ini semestinya mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2008 tentang Perberasan Nasional, yang menyebutkan standar beras dengan komponen kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, derajat sosoh minimum 95%, dan menir maksimum 2%.

Dalam SK Gubernur Banten tersebut disebutkan jumlah titik distribusi Kabupaten Tangerang adalah 328, sama dengan jumlah desa dan kelurahan se Kabupaten Tangerang. Banyaknya titik distribusi ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelaksanaan program kepada masyarakat penerimanya. SK Gubernur ditindaklanjuti dengan SK Bupati No. 844.1/Kep.118-Huk/2008 tanggal 16 April

³ <http://www.menkokesra.go.id/content/view/4476/1/>

2008 tentang penetapan Pagu Alokasi Penyaluran Raskin Kepada Kecamatan se Kabupaten Tangerang Tahun 2008.

Di bagian lain, Pedoman Raskin 2008 memberikan tiga model sosialisasi yang perlu mendapat perhatian serius jajaran pelaksana raskin Kabupaten/Kota. Ketiga model sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi sampai ke desa/kelurahan melalui musyawarah desa yang telah ada. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai instrumen yang diperlukan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi juga harus dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi.

2. Melalui media massa untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi.

3. Melalui media lainnya seperti brosur, pamflet, spanduk, melalui forum keagamaan dan arisan baik dalam bahasa lokal maupun nasional.

Dari pantauan di beberapa media massa, langkah sosialisasi di atas tidak terlihat di publik Kabupaten Tangerang. Kenyataan ini memicu kekhawatiran akan munculnya kinerja buruk pelaksanaan program raskin tahun 2008. Tanpa peran serta segenap pemangku kepentingan, salah satu program anti kemiskinan ini akan sulit dilaksanakan dengan baik. Sekedar bahan perenungan, program raskin tahun 2008 ini menyediakan subsidi Pemerintah Pusat kepada rakyat Kabupaten Tangerang sebesar 110 Milyar lebih. Jumlah yang rasanya sulit dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri tanpa bantuan Pemerintah Pusat.

Permasalahan tidak terdistribusinya beras untuk masyarakat miskin tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, karena ditinjau dari sisi kebijakan publik, kebijakan pemerintah pusat ini telah lengkap dan didukung Pedoman Umum Raskin sebagai acuannya. Hal lain yang juga menjadi menarik untuk diteliti adalah indikasi tidak sampainya informasi raskin kepada publik di Kabupaten Tangerang. Untuk itu pada penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap pelaksanaan program raskin di Kabupaten Tangerang tahun 2008 dengan studi kasus pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong. Studi diawali dengan mengkaji kebijakan Bulog Sub Divisi Regional

Banten/Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian raskin, hingga pada pelaksanaan pendistribusian raskin tersebut.

1.1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak keluhan masyarakat yang tidak menerima raskin, tidak mendengar dan tidak melihat pelaksanaan program raskin sepanjang 2008 di Kabupaten Tangerang, padahal mereka berhak menerimanya.
2. Tidak lancarnya distribusi raskin mengindikasikan tidak seriusnya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program ini.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Bulog Sub Divisi Regional Banten/Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian raskin
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian raskin di Kabupaten Tangerang
3. Apa faktor penghambat dalam distribusi raskin kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang
4. Bagaimana usulan perbaikan kebijakan agar pendistribusian raskin dapat lebih sesuai dengan Pedoman Umum Raskin

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan Bulog Sub Divisi Regional Bnten/Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pendistribusian raskin;
2. Menganalisis mekanisme pendistribusian raskin di Kabupaten Tangerang
3. Mendapatkan faktor penghambat distribusi raskin kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang;

4. Memberikan saran kebijakan agar pendistribusian raskin dapat tepat sasaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Bulog Sub Divisi Regional Banten/Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Sebagai masukan dalam memperbaiki penerapan kebijakan sehingga program raskin lebih efektif.
2. Akademisi
Diharapkan temuan evaluasi raskin ini dapat dijadikan sebuah kasus dalam mengkaji kebijakan publik secara sistematis dan secara ilmiah dapat memberikan solusi pemecahannya.

1.5. Kerangka Berfikir

Dalam tesis ini disajikan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagai amanat konstitusi. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah program raskin dengan sasaran 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) se Indonesia dan sebanyak 254.485 RTM se Kabupaten Tangerang. Diharapkan melalui program raskin ini, RTM terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Namun fenomena yang terjadi adalah berita tentang berbagai penyimpangan program raskin diantaranya bahkan berujung pada proses pengadilan.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, sejauh mana kinerja program raskin. Untuk itu penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tangerang untuk pelaksanaan program tahun 2008.

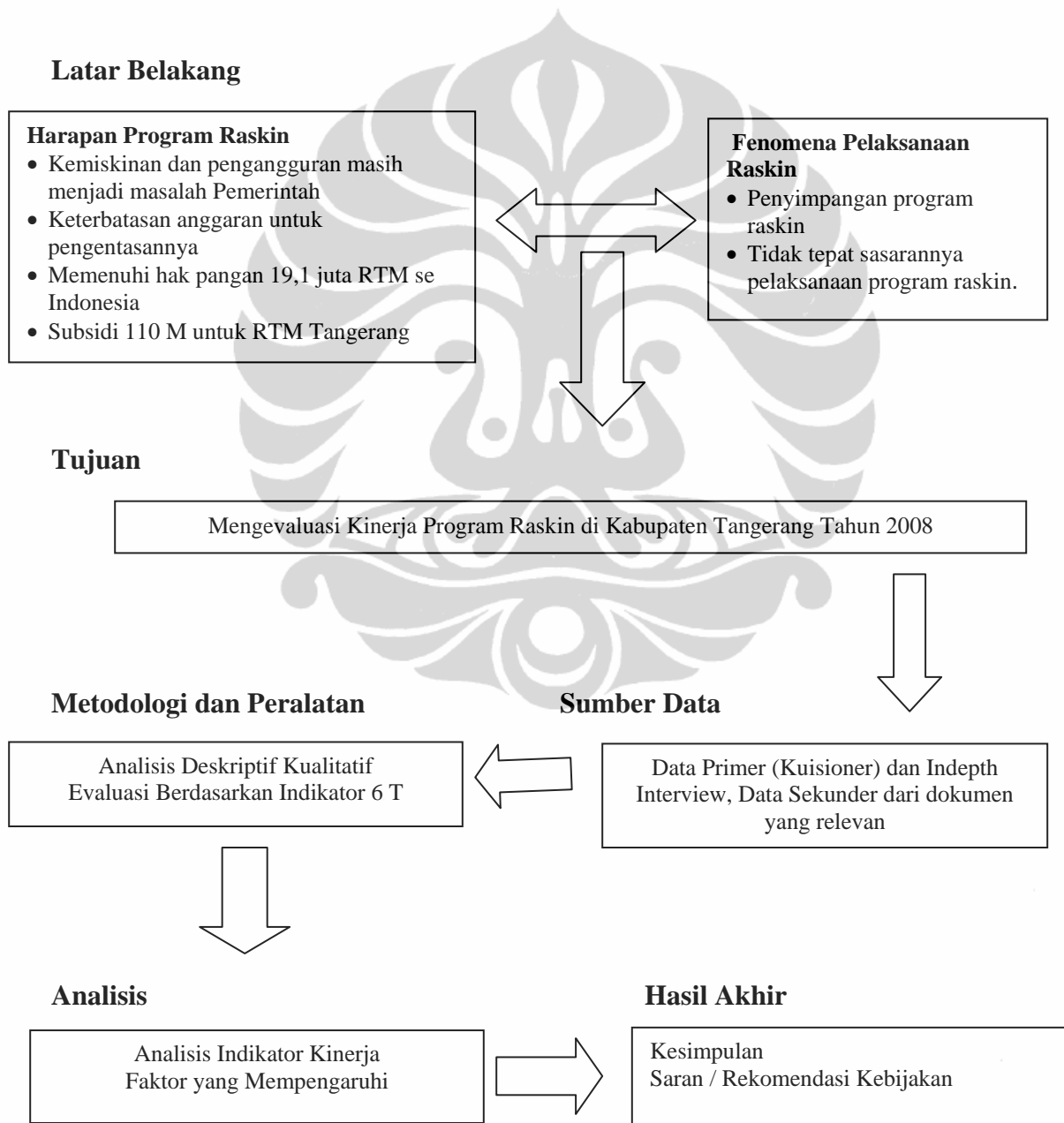
Penelitian ini memanfaatkan data sekunder seperti Pedum Raskin 2008, SK Gubernur dan Bupati, Laporan Realisasi Raskin, berita media serta informasi lain yang relevan, serta mendapatkan data primer dari responden. Data primer diperoleh melalui *indepth interview* dan wawancara terstruktur. Data yang diperoleh

dianalisis secara deskriptif kualitatif dan membandingkan dengan indikator 6 Tepat dalam Pedum Raskin. Out put dari penelitian ini adalah kesimpulan dan saran.

Kerangka berfikir diringkas dalam diagram sbb:

Diagram 1.1

KERANGKA BERFIKIR



1.6.Data dan Metodologi Penelitian

1.6.1. Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer khususnya mengenai program beras untuk keluarga miskin, dan data sekunder utamanya dari dokumen program Raskin di Bulog Sub Divisi Regional Banten dan Tangerang serta dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Data Primer

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari kuisisioner dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan melibatkan kelompok penerima raskin, tim pelaksana kegiatan yang terlibat, kalangan LSM, tim koordinasi pelaksanaan raskin Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bulog Sub Divisi Regional Banten dan Tangerang. Wawancara diarahkan pada penggalian informasi berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan, proses pemantauan dan evaluasi, menggali kendala dan pendukung pelaksanaan program raskin serta kinerjanya selama tahun 2008.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung analisis kinerja program beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Tangerang yang diperoleh dari sumber dan dokumen yang ada di Bulog Divisi Regional Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang baik berupa arsip/dokumen peraturan/keputusan, pedoman umum, pedoman pelaksanaan, laporan pelaksanaan, berita acara serah terima raskin dan lain sebagainya.

1.6.2. Sampel atau Responden

Sebagian dari populasi yang diteliti disebut sampel. Dalam suatu penelitian sampel dapat sama dengan responden. Responden adalah orang yang memberikan respon, jawaban, tanggapan tentang objek yang diteliti, misalnya saat dilakukan

wawancara atau menjawab daftar kuisisioner tentang objek yang diteliti (Mochtar, 2001)⁴.

Pemilihan teknik pengambilan sampel (Nasution, 2003)⁵ merupakan upaya penelitian untuk mendapat sampel yang representatif (mewakili), yang dapat menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel tersebut dibagi atas 2 kelompok besar, yaitu :

1. *Probability Sampling (Random Sample)*
2. *Non Probability Sampling (Non Random Sample)*

Pemilihan sampel yang dilakukan untuk penelitian ini adalah dengan teknik *Non Probability Sample*, yaitu teknik penentuan sampel yang tidak menghiraukan prinsip probabilitas. Hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Teknik ini dipilih mengingat keterbatasan dana dan waktu.

Cara pengambilan sampel adalah dengan *Purposive Sampling* (Sampel dengan Maksud), yaitu pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan peneliti yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Hal ini mengingat responden dalam penelitian ini meliputi masyarakat tani, buruh formal dan informal yang secara lahiriah miskin, tokoh masyarakat yang mengikuti musyawarah desa dan kecamatan, kalangan LSM, pejabat penanggung jawab Tim Koordinasi Pelaksanaan Raskin Pemerintah Kabupaten Tangerang, pejabat Bulog Sub Divisi Regional Banten dan Tangerang dapat dikategorikan sebagai unsur penyelenggara atau mengetahui program Raskin. Artinya responden dianggap bisa mewakili sasaran/tujuan penelitian yaitu menilai kinerja program yang diteliti karena variabel yang akan dilihat bersifat *homogen* seperti proses sosialisasi program, organisasi, mekanisme, dan pelaksanaan program raskin.

Cara lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Quota Sampling* (Sampel Berjatah), yaitu pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Hanya disini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Sampel yang akan di ambil berjumlah 99 orang dengan perincian kuota

⁴ Mochtar, M., Pengantar Metodologi Penelitian, IIP Press, Jakarta, 2001

⁵ Nasution, Rozaini, Teknik Sampling, USU Digital Library, 2003

proporsional dengan jumlah RTM per kecamatan. Cara ini dipergunakan karena peneliti mengenal betul daerah dan situasi daerah dimana penelitian akan dilakukan.

Penelitian diarahkan pada evaluasi pelaksanaan program raskin di kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong. Keempat kecamatan berada dalam satu klaster daerah pemilihan dalam Pemilu 2009 (Dapil V) yang sebagian kecamatannya tetap menjadi bagian Kabupaten Tangerang dan sebagian kemudian menjadi bagian Kota Tangerang Selatan. Sedangkan kecamatan yang tergabung dalam Dapil I sampai dengan Dapil IV tetap menjadi bagian Kabupaten Tangerang, dan kecamatan dalam Dapil VI seluruhnya menjadi bagian Kota Tangerang Selatan.

Agar jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi RTM maka jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin⁶ sebagai berikut :

Rumus Slovin: $n = N / (N.d^2 + 1)$
 di mana:
 n = ukuran sample
 N = ukuran populasi
 d = galat pendugaan

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 24.961 RTM, d ditetapkan sebesar 10%. Jadi jumlah minimal sampel adalah sebanyak 99 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = 24.961 / (24.961 \times 0,1 \times 0,1) + 1 = 99$$

Penelitian dilakukan dalam waktu 3 minggu dari tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 dilanjutkan tanggal 10 Desember sampai

⁶ Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002

dengan 17 Desember 2009 pada empat kecamatan di Kabupaten Tangerang yaitu Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong.

1.6.3. Metode Analisis

Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis tentang objek penelitian. Gambaran deskriptif ini diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu kinerja program raskin di Kabupaten Tangerang berdasarkan data yang terkumpul (data primer dan data sekunder). Hasil analisis kualitatif berupa perbandingan antara kondisi riil di lapangan dengan kondisi ideal dalam Pedum Raskin. Analisis meliputi:

1. Tahap perencanaan kegiatan: identifikasi, persiapan kegiatan
2. Tahap pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi Berdasarkan Indikator 6 T dalam Pedoman Umum Raskin
4. Analisis Kinerja

1.6.4. Peralatan Evaluasi Kinerja

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi kinerja berdasarkan Indikator 6 T yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Raskin yang menjadi dasar analisis secara deskriptif kualitatif.

Penjelasan Indikator 6 T adalah sebagai berikut:

1. **Tepat sasaran** artinya raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar daftar penerima manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (kartu Raskin atau bentuk lain). Indikator ini diukur dengan membandingkan data realisasi jumlah RTM dengan jumlah sasaran RTM.
2. **Tepat jumlah** artinya jumlah beras raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 kg/RTM/bulan pada bulan januari, dan 15

kg/RTM/bulan selama sembilan bulan berikutnya. Indikator ini diukur dengan membagi kuantum realisasi/kuantum RTM = Kg / RTM.

3. **Tepat harga** artinya harga tebus raskin adalah sebesar Rp1.600/kg netto di titik distribusi. Indikator ini diukur melalui evaluasi secara sampling di lapangan oleh tim raskin atau pihak ketiga.
4. **Tepat waktu** artinya waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat raskin sesuai rencana distribusi. Indikator ini diukur dengan persentase realisasi pada setiap akhir bulan. Semakin besar persentase semakin tepat waktu.
5. **Tepat administrasi** artinya terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Indikator ini diukur dengan akurasi dokumen BAST ditingkat Desa; MBA-0 di tingkat Kecamatan dan MBA-1 di tingkat Kabupaten/Kota. Apabila dokumen dinyatakan sah sebagai dasar pembayaran subsidi tepat administrasi tercapai.
6. **Tepat kualitas** artinya terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Indikator ini diukur dengan banyak sedikitnya penolakan / penggantian beras dari masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan dan merekomendasikan langkah kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini terbagi atas enam bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan latar belakang permasalahan pada kebijakan pendistribusian raskin di Kabupaten Tangerang, yang kemudian dilanjutkan pada sub-bab identifikasi masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, data dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan disampaikan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pendistribusian raskin yang terdiri atas konsep, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, dan kebijakan Pemerintah dalam masalah kemiskinan.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan disampaikan tentang metodologi penelitian yang digunakan yang terdiri atas metode penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI INDONESIA DAN DI KABUPATEN TANGERANG

Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah raskin, raskin sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, pedoman umum raskin, evaluasi program raskin 2008, dan penelitian yang pernah dilakukan tentang raskin. Juga dijelaskan gambaran umum Kabupaten Tangerang, gambaran lokasi penelitian, serta kebijakan daerah dalam masalah raskin.

BAB 5 EVALUASI KINERJA PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI EMPAT KECAMATAN

Pada bab ini dijelaskan pelaksanaan kebijakan raskin pemerintah daerah, hasil penelitian lapangan dan evaluasi kinerja program raskin.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penelitian, pada bab ini disampaikan kesimpulan penelitian untuk menjawab perumusan masalah yang telah disampaikan pada bab pertama, dan saran penelitian untuk penelitian selanjutnya dan pengambil kebijakan.

BAB 2

LATAR BELAKANG TEORI

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik⁷ (Inggris: *Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Publik

dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal sebagai berikut:

- a. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan;
- b. Kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya;
- c. Diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam masyarakat otoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena

satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan kekuatan politik atau budaya politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Ridho (2009)⁸ menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Berbagai aktivitas termasuk penyiapan pelaksanaan, sosialisasi, peningkatan kapasitas (*capacity building*) pihak tertentu (seperti misalnya aparatur pemerintah pelaksana tertentu), internalisasinya, dan hal lain yang terkait merupakan hal penting yang biasanya baku dalam proses sebelum dan selama implementasi. Namun hal yang tidak kalah penting adalah kesungguhan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan. Sering dijumpai bahwa kebijakan tertentu, misalnya dalam bentuk skema program pemerintah, yang sebenarnya telah dikaji dan dirancang dengan cukup baik, dalam pelaksanaannya tidak berhasil karena ketidaksungguhan dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan. Hal demikian termasuk misalnya dalam bentuk *moral hazard* dapat terjadi baik pada pihak pemerintah, pelaku bisnis, atau bahkan keduanya. Dalam konteks demikian, fungsi pengawasan/kontrol sangatlah penting. Pengawasan ini tentu bukan semata fungsi eksternal misalnya adanya pihak independen yang melakukannya, namun juga fungsi internal dalam konteks kebijakan yang bersangkutan.

Dalam papernya, Patawari (2009)⁹ menyatakan bahwa betapapun penting tahapan implementasi kebijakan, fakta telah membuktikan bahwa baru pada dasawarsa terakhir ini saja (mulai tahun 1973) para ahli ilmu sosial mulai menyadari dan memberikan perhatian secara serius tentang implementasi kebijakan

⁸ Ridho, Ilham Akhsanu, Kebijakan Kesehatan, <http://www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/11/proses-pembuatan-kebijakan-sejak-desain.html>, 2009

⁹ <http://patawari.wordpress.com/2009/05/14/kebijakan-pemekaran-daerah/>, 2009

dan menerimanya sebagai bagian integral dari keseluruhan proses formulasi Kebijakan. Sehubungan dengan batasan implementasi kebijakan publik ini, Patawari (2009) mengambil pendapat seorang ilmuwan dari Harvard University, *Merilee S. Grindle* (1980) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Insani¹⁰ dalam artikelnya mengutip pendapat *Grindle* (1980: 9-11) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*contents*) dan lingkungan (*contexts*) pelaksanaan kebijakan. *Grindle* menyatakan “*The content of various policies also dictates the site of implementation.... The content of public programs and policies is an important factor in determining the outcome of implementation initiatives.... Policy or program content is often a critical factor because of the real or potential impact it may have on given social, political, and economic setting. Therefore, it is necessary to consider the context or environment in which administrative action pursued.*” Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun program individu dan biaya telah disediakan maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi hal ini sering tidak berjalan mulus, tergantung pada kemampuan pelaksanaan program yang dilihat dari isi dan konteks kebijakan. Isi kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan mencakup: (1) *interests affected* (kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan); (2) *type of benefits* (jenis manfaat yang dihasilkan); (3) *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan); (4) *site of decision making* (kedudukan pembuat kebijakan); (5) *program implementors* (siapa pelaksana program); dan (6) *resources committed* (sumber daya yang dikerahkan). Sedangkan konteks kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup: (1) *power, interest, and strategies of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat); (2) *institution and*

¹⁰ Insani, Istyadi, Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam <http://www.stialan.ac.id/artikel%20istyadi.pdf>

regime characteristics (karakteristik lembaga dan penguasa); dan (3) *compliance and responsiveness* (kepatuhan serta daya tanggap pelaksana).

Nazwar (2003)¹¹ dalam papernya mengutip *Hogwood dan Gunn* (Hill, 1993) yang menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai;
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
4. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal;
5. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
6. hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
9. komunikasi dari koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

2.3. Evaluasi Kebijakan Publik

Mustopadidjaja (2002)¹² menyatakan bahwa evaluasi kinerja merupakan aktivitas dalam manajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan, atau pun pertanggungjawaban. Setiap tahapan berisikan kegiatan pengumpulan dan analisis data dan informasi serta pelaporan mengenai tingkat perkembangan capaian hasil kegiatan pelaksanaan,

¹¹ Nazwar, Koalisi Aktor Dalam Implementasi Kebijakan, http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/brapub/Nazwar%20_03_.pdf, 2003.

¹² Mustopadidjaja, Manajemen Proses Kebijakan Publik, LAN, 2002

ketepatan sistem dan proses pelaksanaan, dan ketepatan kebijakan serta akuntabilitas kelembagaan secara keseluruhan.

Evaluasi kinerja pada pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan mau pun kebijakannya itu sendiri, agar rumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan baik, dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal. Disamping memuat gambaran perkembangan pelaksanaan, laporan pemantauan juga memuat identifikasi kelemahan kebijakan dan penyimpangan terhadap sistem dan proses kebijakan, serta saran koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan atau pun terhadap kebijakan itu sendiri.

Evaluasi kinerja dalam tahap pengawasan harus dapat memberikan informasi objektif mengenai tingkat capaian pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu; mengenai kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan; serta rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

Pada tahap pertanggungjawaban, evaluasi kinerja harus dapat memberikan gambaran dan analisis objektif mengenai perkembangan pelaksanaan, perubahan atau penyesuaian yang telah dilakukan berikut alasannya, dan penilaian tingkat capaian kinerja dalam jangka waktu tertentu.

Evaluasi kinerja merupakan aktifitas yang harus mendapatkan perhatian, sebab dari padanya negara dan bangsa ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dan daya terbatas yang tersedia, mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan yang perlu ditempuh dalam menghadapi perubahan dan perkembangan lingkungan strategik ke depan.

Hutagalung (2008)¹³ menyatakan Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson:1975). Evaluasi

¹³ <http://blog.unila.ac.id/artefaksi/2008/05/05/evaluasi-kebijakan/>

kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut *Lester dan Stewart* (Hutagalung, 2008), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu:

a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor apa yang menyebabkannya.

b. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penilaian apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan.

Dalam Evaluasi Kinerja Kegiatan Pembangunan (EKPP)¹⁴, dijelaskan tentang pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dijelaskan sebagai:

1. Kegiatan mengamati atau meninjau kembali atau mempelajari dan mengawasi, yang dilakukan secara terus menerus atau berkala oleh siapa saja yang merasa berkepentingan terhadap program kegiatan di setiap tingkatan pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan kegiatan yang ditargetkan berjalan sesuai rencana
2. Proses untuk mengikuti jejak/mengawasi penyaluran sumber daya sebagai input dan ketentuan² yang didasarkan atas perbandingan antara tingkat pencapaian aktual dengan target pencapaiannya.
3. Landasan apakah evaluasi perlu dilakukan pada saat itu atau tidak. Pemantauan difokuskan kepada pengumpulan informasi secara reguler untuk mengikuti jejak atau mengawasi pelaksanaan kegiatan dan untuk memberikan isyarat peringatan apakah hasil² yang telah dicapai sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

¹⁴ Keputusan Kepala Bappenas nomor 178/K/07/2000, Evaluasi Kinerja Kegiatan Pembangunan, 2000

4. Harus mampu memberikan isyarat dini kepada pemilik kegiatan mengenai masalah atau kesuksesan dan membantu mendiagnosis akar permasalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan
5. Dilakukan agar kegiatan dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tersedianya umpan balik bagi pemilik kegiatan di setiap tingkatan

Pemantauan dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan dengan tujuan 1) meluruskan kembali jalannya kegiatan, 2) penyesuaian kembali asumsi dan perkiraan perencanaan.

Sedangkan evaluasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses untuk menentukan relevansi, keberhasilgunaan, kedayagunaan, dari kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif
2. Merupakan proses penyempurnaan kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, menyesuaikan program dan pengambilan keputusan selanjutnya;
3. Penilaian keberhasilan kegiatan untuk perbaikan tercapainya kegiatan;
4. Proses penilaian sistematis, reguler, dan objektif mengenai relevansi, kinerja, dan keberhasilan kegiatan yang sedang berjalan dan telah selesai dilaksanakan. Tidak seperti pemantauan yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap program dan kegiatan, evaluasi dapat dilakukan secara selektif.

Evaluasi dalam EKPP adalah kegiatan yang dilakukan setelah periode pelaksanaannya dinyatakan berakhir, atau setelah kegiatan melalui suatu periode pelaksanaan tahap tertentu. Tujuannya adalah 1) memberikan masukan untuk perbaikan di mana diperlukan selama kegiatan berjalan, 2) melihat adanya kemungkinan tindak lanjut atau investasi baru di kegiatan serupa, 3) menjadi bahan pelajaran bagi kegiatan yang lain.

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi menurut Mustopadidjaja dan Hutagalung merangkum makna pemantauan, pengawasan hingga evaluasi akhir, sedangkan EKPP memilah makna pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, memberi masukan atau informasi

yang sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan, untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan suatu kebijakan.

2.4. Kebijakan Pemerintah Dalam Masalah Kemiskinan

2.4.1. Kemiskinan

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam dalam menentukan ukurannya. World Bank¹⁵ membuat garis kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*purchasing power parity* / paritas daya beli) per hari dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar Negara/wilayah dan perkembangannya dari waktu ke waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global / internasional. Angka konversi PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US\$ 1 di Amerika. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing Negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun.

BPS (BPS, 2008) melihat kemiskinan pada besaran pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non pangan rumah tangga per orang per bulan. Kemiskinan diukur dari tingkat konsumsi per kapita dibawah suatu standar tertentu yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum 2100 kalor per orang per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non pangan. Menurut BPS individu dengan pengeluaran lebih rendah tersebut dikategorikan miskin.

Sedangkan kemiskinan menurut Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (BPS, 2008) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan

¹⁵ BPS Provinsi Banten, Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS, 2008

atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Dari Buku Saku Penanggulangan kemiskinan 2008¹⁶ dinyatakan meskipun krisis ekonomi belum pulih sepenuhnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia mulai berkurang dan menurut data BPS tercatat sekitar 34,96 juta orang miskin (15,42%) dari penduduk Indonesia yang berjumlah 214 .251.937 orang (BPS, 2005). Sementara itu jumlah pengangguran terbuka selama tahun 2008 tercatat 9,4 juta orang (8,5%) dari total angkatan kerja (BPS. Pebruari 2008). Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di perdesaan. Komposisi ini relatif tidak berubah dalam setiap tahunnya.

Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari rendahnya pendapatan masyarakat. namun juga ditandai oleh berbagai masalah multidimensi. Belum meratanya pembangunan khususnya di perdesaan dan luar Jawa menyebabkan kurangnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif dan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka di perdesaan.

Masyarakat miskin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, hal ini ditandai dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, ketergantungan tinggi terhadap beras dan terbatasnya diversifikasi pangan.

Pada bidang kesehatan, masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak untuk tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain kurangnya kecukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, rendahnya pendapatan dan mahalnya biaya jasa kesehatan, serta kurangnya layanan kesehatan reproduksi.

¹⁶ TKPKRI, Buku Saku Penanggulangan Kemiskinan 2008, Memahami Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & Perluasan Lapangan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jakarta, November 2008

Pada bidang pendidikan, masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap pendidikan formal dan non formal. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dan guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar, terbatasnya jumlah SLTP di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, serta terbatasnya jumlah, sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan non formal.

Masyarakat miskin juga menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan pengetahuan, menyebabkan masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan peluang yang sempit untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak ada kepastian akan keberlanjutannya.

2.4.2. Arah dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Buku Saku Penanggulangan Kemiskinan 2008 (TKPKRI, 2008), Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Untuk perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu: pro-pertumbuhan (*pro-growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis, termasuk perbaikan iklim investasi; pro-lapangan kerja (*pro-job*), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk di dalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif; dan pro-masyarakat miskin (*pro-poor*), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi pedesaan.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu, strategi yang digariskan adalah

strategi "pertumbuhan disertai pemerataan" atau "*growth with equity*". Percepatan pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun tingkat kemiskinan.

2.4.3. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Buku Saku Penanggulangan Kemiskinan 2008 (TKPKRI, 2008), sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan;
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;
3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;
5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat;
7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin;
8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;
9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah;
10. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan
11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

2.4.4. Harmonisasi dan Konsolidasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Buku Saku Penanggulangan Kemiskinan 2008 (TKPKRI, 2008), disebutkan upaya koordinasi dan harmonisasi berbagai program penanggulangan kemiskinan pemerintah dengan mengelompokkan program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut:

1. Klaster pertama merupakan pemberian ikan bagi rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang memang membutuhkan bantuan

perlindungan sosial. Untuk klaster pertama ini program bantuan dan perlindungan sosial ditujukan terutama bagi masyarakat termiskin di antara yang miskin. Termasuk di dalamnya adalah berbagai program pelayanan dasar seperti penyaluran beras bersubsidi (raskin) dan jaminan kesehatan (Jamkesmas); pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; bantuan sosial untuk masyarakat rentan serta korban bencana alam dan sosial; bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan (Program Keluarga Harapan/PKH); serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA). Penajaman fokus dan sinkronisasi klaster program Bantuan dan Perlindungan Sosial pada 19, 1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan kelompok rentan lainnya (kaum perempuan mlsm, lansia, korban bencana alam/konflik sosial, penyandang cacat, komunitas adat terpencil, dan lain sebagainya).

2. Klaster kedua, dapat diibaratkan sebagai pemberian kail bagi kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin agar masyarakat dapat mandiri. Untuk klaster kedua ini kelompok program bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka yang tidak termasuk atau sudah lepas dari klaster I didorong dan difasilitasi untuk dapat mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.

3. Klaster ketiga, ibarat memberikan pancing dan perahu, bagi kelompok masyarakat miskin yang sudah mandiri dan siap untuk mengembangkan usahanya, bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Bentuk program untuk klaster ketiga ini adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

2.4.5. Data Kemiskinan

Data kemiskinan versi Susenas merupakan data kemiskinan yang bersifat makro (agregasi nasional, provinsi, kabupaten/kota). Data ini hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi, tetapi tidak dapat menunjukkan siapa si miskin dan di mana alamat mereka sehingga tidak operasional di lapangan. Untuk target sasaran keluarga/rumah tangga secara langsung, BPS melakukan pendataan sosial ekonomi penduduk

(PSE05) yang pada dasarnya merupakan pendataan keluarga/rumah tangga miskin. PSE05 digunakan untuk pendistribusian BLT dan Raskin tahun 2008 di Banten. RTM adalah keluarga yang memenuhi minimal sembilan dari empat belas indikator seperti tercantum dalam Tabel 2.2. Jumlah RTM se Indonesia berjumlah 189,1 juta RTM, Provinsi Banten sebanyak 702.016 dan Kabupaten Tangerang sebanyak 254.485.

Tabel 2.1.
Empat Belas Indikator Kemiskinan BPS

No	Variabel	Kriteria Miskin
1	Luas lantai tempat tinggal	< 8 m ² per kapita
2	Jenis lantai	Tanah / bambu / kayu murahan
3	Dinding bangunan	Bambu/rumbia/kayu kualitas/tembok tanpa plester
4	Fasilitas tempat buang air besar	Tidak punya/bersama ruta lain
5	Sumber penerangan	Bukan listrik
6	Sumber air minum	Sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar untuk memasak	Kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/ayam	Tidak pernah/satu kali seminggu
9	Pembelian pakaian baru setiap ART dalam setahun	Tidak pernah/membeli satu stel
10	Frekuensi makan dalam sehari setiap ART	1 kali / 2 kali
11	Kemampuan membayar untuk berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak mampu berobat
12	Lapangan pekerjaan utama KRT	Petani dengan luas lahan <0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan RT < 600 ribu per bulan
13	Pendidikan KRT	Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Pemilikan asset/harta bergerak/harta tidak bergerak	Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai >500 ribu seperti sepeda motor, emas, perhiasan, ternak, kapal/perahu motor atau barang modal lainnya.

Sumber: BPS

2.5. Penelitian Program Raskin Yang Pernah Dilakukan

Dalam penelitiannya (Smeru, 2007)¹⁷ menyatakan bahwa dari penyaluran raskin hingga titik distribusi, Bulog telah melaksanakan tugasnya dengan relatif

¹⁷ Lembaga Penelitian Smeru, Efektifitas Pelaksanaan Raskin, *Public Disclosure Authorized*, 2007

baik dan sesuai dengan pedoman program. Namun, penilaian keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara parsial karena raskin merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin. Permasalahan pelaksanaan raskin banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima.

Dalam kumpulan hasil penelitian tentang pelaksanaan raskin yang dirangkum oleh Perum Bulog¹⁸ ditampilkan beberapa kesimpulan hasil evaluasi lembaga penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh 35 PTN/S, pada tahap I menyimpulkan bahwa dari sebelas program yang ada dalam Jaring Pengaman Sosial, baru program raskin yang sudah mulai berjalan pada bulan Januari - Pebruari 2003. Walau demikian, masih ditemukan jumlah beras yang dibagikan kurang dari 20 kg per KK per bulan akibat jumlah penerima manfaat yang melebihi jumlah pagu yang tersedia. Hampir semua daerah melakukan modifikasi berdasarkan musyawarah desa yang ditegaskan oleh SK Gubernur/Bupati/Walikota yang bertujuan untuk menampung *local wisdom* (kebijakan setempat). Pada akhirnya, 35 PTN/S tersebut memberikan penilaian terhadap kinerja raskin dengan nilai 83,74% untuk indikator ketepatan sasaran dan 59,74% untuk ketepatan jumlah (atau rata-rata penerimaan per KK per bulan adalah 13,3 kg). Untuk ketepatan waktu dinilai 64,00%, dengan tingkat pemenuhan kebutuhan 44,90% dan efektivitas program 57,90%.

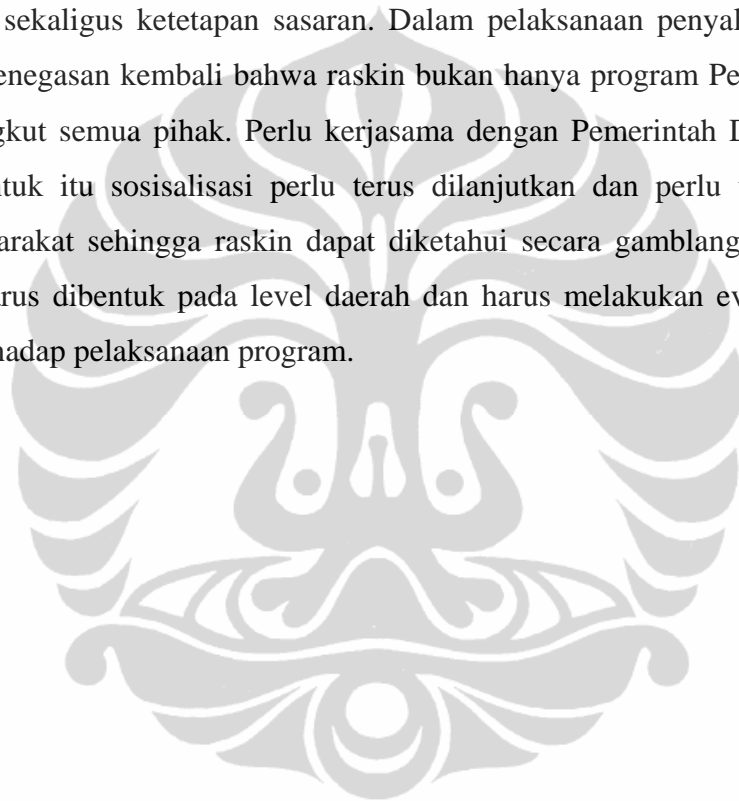
2. Penelitian oleh Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa program raskin harus diimbangi dengan penguatan kelembagaan lokal seperti kelembagaan pangan dengan tujuan untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Studi ini masih menemukan permasalahan klasik tentang ketepatan jumlah yang diterima per KK, ketepatan harga akibat ongkos transportasi, maupun kualitas dan kuantitas berasnya. Untuk itu Tim Studi Universitas Brawijaya menyarankan bahwa program raskin masih tetap diperlukan dalam rangka mengatasi masalah kekurangan gizi mikro pada masyarakat terutama masyarakat miskin. Program raskin perlu diintegrasikan dengan program lainnya dalam mengatasi masalah kemiskinan.

¹⁸ www.bulog.co.id , 2007, Studi Evaluasi Raskin.

Karena masih ditemukan kekurangan pagu, Tim Studi Universitas Brawijaya menyarankan agar ada penambahan pagu raskin. Tambahan alokasi ini dapat disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tingkat Pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Daerah. Tambahan dana ini juga diperlukan untuk biaya operasional dari Titik Distribusi ke penerima manfaat. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program raskin maka sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap program raskin secara terus menerus perlu dilakukan. Tim Universitas Brawijaya juga menyarankan agar data masyarakat miskin, kebutuhan dasar pangan, konsumsi dan elastisitasnya, kemampuan produksi dan produksi maksimal serta distribusi akan bisa diintegrasikan dalam satu Sistem Informasi Pangan Nasional (SIPN) sehingga peran raskin sebagai stimulan akan bisa ditingkatkan apabila dilakukan persiapan pengembangan kebijakan secara integral berkesinambungan.

3. Penelitian oleh Lembaga Demografi UI tentang raskin yang menemukan bahwa Kuantitas beras yang dibeli oleh KK Penerima Manfaat bervariasi antara 3,5 -20 kg/KK, karena jumlah KK Miskin yang membutuhkan lebih banyak dari pada jumlah beras yang didrop; tidak punya uang untuk membeli sebanyak 20 kg; tempat beli beras sulit dijangkau dan ada juga alasan kualitas beras yang kurang/tidak baik. Penerima manfaat pada umumnya menyatakan bahwa kualitas beras yang diterima sama atau lebih baik dari beras bulan sebelumnya dengan harga beras berkisar antara Rp. 1.000-1.200 karena untuk biaya angkut/transporasi dari titik distribusi ke penerima manfaat. Untuk ketepatan waktu di beberapa daerah distribusi dilakukan setiap bulan, kecuali untuk beberapa wilayah tertentu yang sulit dijangkau dropping dilakukan dua bulan sekali atau tergantung situasi. Dalam studinya, Lembaga Demografi UI menyebutkan kendala pelaksanaan raskin seperti kurangnya dukungan dana operasional terutama untuk pengangkutan dari titik distribusi ke penerima manfaat, jumlah beras lebih sedikit dari pada jumlah KK yang membutuhkan, maupun kondisi geografis wilayah dengan tingkat kesulitan yang berbeda menurut wilayah. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya koordinasi antar instansi, peran serta masyarakat, dan evaluasi/pemantauan. Dari hasil temuan tersebut, Tim Peneliti UI (Lembaga Demografi UI)

merekomendasikan bahwa dengan nilai ketepatan sasaran baru dicapai sekitar 86%, disarankan agar dibentuk institusi khusus di level bawah (tingkat penerima manfaat) semacam Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa/Kelurahan beranggotakan tokoh masyarakat setempat. Saran lain untuk lebih tepat sasaran adalah pendataan KK Miskin dilakukan oleh aparat paling rendah misalnya Ketua RT/RW yang dapat mengamati dan menilai tingkat kemiskinan warga mereka sekaligus ketetapan sasaran. Dalam pelaksanaan penyaluran beras raskin, perlu penegasan kembali bahwa raskin bukan hanya program Perum Bulog tetapi menyangkut semua pihak. Perlu kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya. Untuk itu sosialisasi perlu terus dilanjutkan dan perlu transparansi terhadap masyarakat sehingga raskin dapat diketahui secara gamblang dan jelas. Tim penilai harus dibentuk pada level daerah dan harus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut *Cooper* dan *Schindler* (2006)¹⁹, riset kualitatif merupakan suatu rangkaian teknik interpretasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, menterjemahkan, dan menjelaskan makna, bukan frekuensi dari suatu kejadian dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi secara alami. Riset kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam akan suatu situasi, idealnya untuk mendapatkan perasaan, emosi, motivasi, persepsi, bahasa konsumen, atau perilaku yang menjelaskan pribadi. Artinya riset kualitatif didesain untuk memberitahu periset bagaimana (proses) dan bagaimana (makna) sesuatu terjadi sebagaimana adanya. Pada penelitian ini akan dilakukan riset tentang kebijakan publik raskin dan penerapannya di Kabupaten Tangerang, dengan pengkhususan pada evaluasi terhadap pelaksanaan tahun 2008 di kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong.

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan latar belakang Kabupaten Tangerang terdiri dari enam daerah pemilihan (DP) dalam Pemilu 2009. Sesuai SK Komisi Pemilihan Umum (KPU)²⁰, DP I meliputi Kecamatan Kresek, Balaraja, Jayanti, Cisoka, Tigaraksa, Jambe, Solear, Sukamulya, Gunung Kaler, dialokasi 9 kursi. Untuk DP 2 yaitu Kronjo, Kemer, Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Mekar Baru akan dialokasi 8 kursi. DP 3 yaitu Sukadiri, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, Telukanaga, Kosambi akan dialokasi 8 kursi. Kemudian DP 4 yaitu Cikupa, Panongan, Legok, Kelapa Dua, Curug akan dialokasi 8 kursi. Untuk DP 5 yaitu Pondok Aren, Serpong, Pagedangan, Cisauk, Serpong Utara, Setu akan dialokasi 9 kursi. Sedangkan DP 6 yaitu Ciputat, Pamulang dan Ciputat Timur akan dialokasi 8 kursi.

¹⁹ Cooper, D. R., dan Schindler, P.S., *Metode Riset Bisnis*, Media Global Edukasi, Jakarta, 2006

²⁰ Komisi Pemilihan Umum (KPU), SK nomor 168/SK/KPU/2008, 2008

Berkaitan dengan pembentukan Kota Tangerang Selatan²¹, DP 1 sampai dengan DP 4 tetap menjadi bagian Kabupaten Tangerang, sedangkan DP 6 menjadi bagian dari Kota Tangerang Selatan. Ada pun DP 5, sebagian kecamatannya (Cisauk dan Pagedangan) tetap menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang dan sebagian kecamatan yang lain (Pondok Aren, Setu, Serpong dan Serpong Utara) menjadi bagian Kota Tangerang Selatan. Kekhasan DP 5 menjadi latar belakang untuk dipilih sebagai lokasi penelitian. Kecamatan yang tetap berada di Kabupaten Tangerang bertipologi perdesaan dan kecamatan yang kemudian menjadi bagian Kota Tangerang Selatan bertipologi perkotaan. Bentuk pemerintahan di bawah kecamatan bertipologi perdesaan mayoritas adalah pemerintahan desa, dan bentuk pemerintahan di bawah kecamatan bertipologi perkotaan mayoritas adalah kelurahan.

Dari enam kecamatan di DP V yaitu Cisauk, Pagedangan, Setu, Serpong, Serpong Utara, dan Pondok Aren, diambil untuk penelitian ini empat kecamatan yaitu Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong. Empat kecamatan ini dianggap cukup mewakili populasi di DP V.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terbagi atas dua metode, yaitu: data primer dan data sekunder. Data sekunder didapat melalui berbagai informasi berita yang mengangkat permasalahan raskin di kota Tangerang. Untuk mendukung data sekunder dilakukan pendekatan data primer melalui metode wawancara. Pengumpulan sampel pada riset kualitatif menurut *Cooper dan Schindler (2006)* sangat berbeda dengan metode kuantitatif, riset kualitatif menggunakan sampel yang sangat kecil, mungkin hanya melibatkan dua atau tiga kelompok fokus atau beberapa orang untuk dilakukan wawancara mendalam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam metode kualitatif. Wawancara beragam sesuai dengan jumlah orang yang terlibat dalam wawancara, tingkatan struktur, kedekatan pewawancara dengan peserta, dan jumlah wawancara yang dilakukan dalam riset.

²¹ UU 51 tahun 2008, Pembentukan Kota Tangerang Selatan, 2008

Selanjutnya, menurut *Cooper dan Schindler* wawancara terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu (1) wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak ada pertanyaan khusus dan urutan topik yang akan didiskusikan, dimana masing-masing wawancara disesuaikan dengan masing-masing peserta, biasanya diawali dengan narasi seorang peserta; (2) wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dimulai dengan pertanyaan khusus dan selanjutnya sudut pandang masing-masing individu sejalan dengan penggalian lebih jauh oleh pewawancara ; dan (3) wawancara terstruktur, wawancara ini sering disebut dengan wawancara rinci, seperti sebuah kuesioner untuk mengatur urutan pertanyaan serta cara-cara khusus pengajuan pertanyaan, namun pertanyaannya biasanya tetap terbuka. Wawancara terstruktur memungkinkan perbandingan antara respons yang lebih langsung. Variasi pertanyaan dibatasi oleh karena itu variasi jawaban diasumsikan nyata. Di samping itu, dalam wawancara terstruktur, kenetralan pewawancara terus dipertahankan.

Dalam penelitian ini, penulis menemui dan mewawancarai responden RTM dengan pertanyaan sesuai kuisisioner. Kuisisioner dimaksudkan sebagai alat yang memudahkan pelaksanaan wawancara terstruktur. Temuan hasil wawancara RTM ditambah data sekunder menjadi masukan dalam proses *indepth interview* dengan pejabat penanggung jawab pelaksanaan raskin Kabupaten Tangerang. Data primer penelitian dan data sekunder yang relevan menjadi dasar penulisan tesis ini.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada riset kualitatif, menurut *Daymon dan Holloway* (2008)²² meliputi dua bagian yaitu:

- a) Reduksi data, memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan mengkodekan, menyusunnya menjadi kategori, dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana;
- b) Interpretasi, yaitu mendapatkan makna dan pemahaman terhadap kata-kata dan tindakan para partisipan riset, dengan memunculkan konsep dan teori

²² Daymon, C. and Hooloway, I., *Riset Kualitatif dalam Public Relation and Marketing Communication*. Penerbit Bentang, Jakarta, 2008

(atau teori berdasar generalisasi) yang menjelaskan temuan. Kemudian, dikomunikasikan makna temuan melalui laporan tertulis.

Sebagai penelitian kualitatif, maka mayoritas data yang diperoleh adalah melalui metode wawancara. Data ini diolah dan dianalisis sesuai dengan prosedur pendekatan penelitian kualitatif. Tahap tahap yang dilakukan adalah: pembuatan transkrip wawancara, kategorisasi, reduksi, penyajian data, dan analisis data.

Studi kualitatif (*qualitatif studies*) menurut Sekaran (2003)²³ menjelaskan peristiwa atau menawarkan solusi, namun masih memiliki keterbatasan tidak didukung oleh statistik ilmiah, dan keterbatasan tersebut masih mengandung unsur *hit and miss* dalam menerapkan solusi yang diajukan.

Pengolahan data penelitian ini dilaksanakan sepanjang waktu penelitian berlangsung. Oleh karena itu, peneliti mencatat berbagai temuan yang ada serta memberikan tafsiran atau pemaknaan dari temuan tersebut sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

Pada penelitian ini, selain menggunakan data hasil wawancara, termasuk rangkuman hasil kuisisioner, digunakan pula data penunjang yang diperoleh melalui laporan kegiatan organisasi atau data yang dikumpulkan dari penelitian lain. Data penunjang ini merupakan data resmi yang menjelaskan kejadian atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sehingga dapat dilakukan evaluasi. Untuk itu, analisis data dilakukan dengan *check and recheck* antara data penunjang dan data utama yang didapat melalui wawancara. Kegiatan *check and recheck* ini untuk menjaga objektivitas narasi, digunakan prinsip triangulasi yang pada intinya melakukan proses *check* dan *recheck* di mana penggunaan data kuantitatif dilakukan untuk mendukung argumentasi.

²³ Sekaran, Uma, Research Methods: A Skill Building Approach, 4th Edition, John Willey & Son, Ltd., 2003

BAB 4

PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI INDONESIA DAN KABUPATEN TANGERANG

Sejarah raskin²⁴ diawali dengan adanya program Operasi Pasar Khusus Beras pada pertengahan tahun 1998 dan akan selalu terkait dengan awal munculnya krisis moneter dan ekonomi. Apabila ditengok ke belakang, terjadinya krisis moneter yang dimulai pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan wereng coklat pada waktu itu telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan produksi ini juga dipicu oleh kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi sehingga penggunaan sarana produksi pertanian mengalami penurunan. Biaya hidup petani pun meningkat akibat terjadinya kenaikan harga semua kebutuhan. Harga beras mulai merambat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei - Juni 1998. Situasi itu juga diperburuk dengan meletusnya kerusuhan pada tanggal 12-14 Mei 1998 yang secara langsung telah mempengaruhi kelancaran distribusi pangan. Dalam situasi yang demikian, kondisi politik juga semakin menghangat yang mencapai puncaknya dengan adanya pergantian kepemimpinan Nasional pada tanggal 21 Mei 1998.

Penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan semua kebutuhan biaya hidup, hilangnya sebagian besar sumber pendapatan masyarakat karena PHK melengkapikan tekanan terhadap stabilisasi sistem pangan secara menyeluruh. Di beberapa daerah juga dikabarkan telah terjadi rawan pangan, dan kesemuanya ini apabila tidak segera diambil tindakan untuk mengatasinya dikhawatirkan akan menimbulkan eskalasi kerawanan sosial yang lebih besar.

Menghadapi situasi yang demikian, maka pemerintah dalam sidang Kabinet tanggal 3 Juni 1998 telah memutuskan untuk membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan *Food Crisis Center* atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dalam Rakor Ekuin tanggal 24 Juni 1998 yang membahas khusus mengenai mekanisme penyaluran bantuan pangan kepada

²⁴ <http://www.bulog.co.id/sekilasraskin.php>

masyarakat yang mengalami rawan pangan, yang akhirnya sampai pada keputusan untuk melaksanakan program bantuan pangan melalui Operasi Pasar Khusus yang operasionalnya dilaksanakan oleh Bulog. Penunjukan Bulog untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti kesiapan sarana pergudangan, SDM dan stok beras Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan Bulog mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada pemerintah. Oleh karena itu dengan penunjukan Bulog akan memungkinkan program bantuan pangan ini dapat segera dilaksanakan.

Program bantuan pangan yang dikemas dalam bentuk Operasi Pasar Khusus (OPK) ini juga menjadi rintisan program bantuan sosial lainnya dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Ada beberapa pertimbangan mengapa bantuan pangan ini diberikan dalam bentuk beras, antara lain karena beras merupakan pangan pokok mayoritas penduduk, dan porsi pengeluaran untuk pangan bagi penduduk miskin adalah cukup tinggi. Memang ada model bantuan lainnya yaitu dalam bentuk uang tunai, namun pola ini cukup rawan terhadap penyimpangan.

Pada saat munculnya program OPK, Indonesia memang belum memiliki model bantuan pangan yang mantap seperti di negara-negara maju (seperti pola *food stamp* di AS misalnya). Oleh karena itu maka pola OPK dianggap menjadi alternatif yang paling rasional. Namun dalam perkembangannya dengan masih akan adanya masalah kemiskinan, maka bantuan pangan OPK ini diharapkan dapat menjadi dasar/landasan model bantuan pangan dimasa-masa mendatang.

Setiap tahunnya program OPK dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Pada tahun 2002, nama program diubah dengan RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin) dengan tujuan agar lebih dapat tepat sasaran. Keluarga yang tidak miskin akan menjadi malu untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras raskin. Program ini terus berjalan sampai dengan saat ini dengan mengikuti kemampuan subsidi yang dapat diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan perkembangan data keluarga miskin yang terus dilakukan penyempurnaan.

4.1. Program Raskin Sebagai Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Pedoman Umum Raskin 2008²⁵ dijelaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari pelaksanaan mandat UUD 1945. Upaya ini diterjemahkan dalam berbagai agenda pembangunan Nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Pemerintah menetapkan Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk periode 2004 – 2009. Dokumen yang juga mengacu kepada Strategi Nasional Penganggulangan Kemiskinan (SNPK) menetapkan target-targetnya sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau *MDGs*). Keterkaitan berbagai agenda pembangunan tersebut diharapkan dapat lebih memfokuskan upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga pencapaian target pengurangan kemiskinan dapat dipercepat. Dalam Buku Saku Penanggulangan Kemiskinan 2008, Raskin dikategorikan dalam klaster pertama program bantuan dan perlindungan sosial yang ditujukan terutama bagi masyarakat termiskin di antara yang miskin bersama jaminan kesehatan (Jamkesmas); pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; bantuan sosial untuk masyarakat rentan serta korban bencana alam dan sosial; bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga Negara, sejak tahun 1998 pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin (raskin). Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi.

Program raskin merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang saat ini sedang dilaksanakan serta merupakan bagian dari upaya pencapaian *MDGs*. Oleh karena itu keberhasilan program raskin merupakan tanggung jawab

²⁵ Kemenkokesra, Pedoman Umum Raskin 2008, 2007

bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Pemerintah menghargai upaya pemerintah daerah yang mendukung kelancaran program raskin seperti membantu penyaluran dari titik distribusi kepada penerima manfaat sehingga tidak ada lagi tambahan harga tebus raskin dari yang sudah ditetapkan. Selain membantu biaya distribusi Pemerintah Daerah dapat juga menambah jumlah penerima manfaat raskin melalui penyediaan anggaran dalam APBD.

Raskin adalah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, aparat desa/kelurahan, lembaga musyawarah desa, LSM serta tokoh masyarakat lainnya. Wajar apabila dalam pelaksanaannya akan banyak mengundang kritik dan sorotan tajam.

Agar penyaluran raskin tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah maka diperlukan upaya yang terkoordinir dan terpadu agar instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan penyaluran, monitirong dan evaluasi serta penanganan terhadap pengaduan masyarakat. Untuk keperluan tersebut Tim Koordinasi Raskin Pusat menyusun Pedoman Umum Raskin sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penyaluran raskin.

4.2. Pedoman Umum Raskin

Untuk melaksanakan program raskin ini, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2008. Dalam Pedum Raskin ini dijelaskan berbagai hal tentang pelaksanaan raskin yaitu tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan, mekanisme distribusi dan pelaporan, mekanisme pembayaran dan administrasi, program raskin daerah, dan sosialisasi. Secara rinci berbagai hal tentang pelaksanaan raskin tersebut adalah sebagai berikut:

i. Tujuan Program; Tujuan program raskin untuk mengurangi beban pengeluaran RTM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

ii. Sasaran Program; Sasaran program raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 19,1 juta RTM berdasarkan data BPS melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga tebus Rp1.600 per kg netto di titik distribusi.

iii. Prinsip Pengelolaan; Dalam pengelolaannya, program raskin memiliki prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Keberpihakan kepada RTM, yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan seluruh kegiatan raskin baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.
- b. Transparansi yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku raskin terutama masyarakat penerima raskin, yang harus tahun, memahami, dan mengerti adanya kegiatan raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.
- c. Partisipatif yang maknanya mendorong masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan raskin mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat mau pun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.

iv. Pengorganisasian; Untuk mengefektifkan pelaksanaan program raskin 2008, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Penanggung jawab pelaksanaan program raskin di tingkat Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di tingkat Provinsi adalah Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Tugas Tim Raskin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program raskin struktur pemerintahan di bawahnya. Tim Raskin ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Merumuskan perencanaan program raskin pada struktur pemerintahannya.

- b. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program raskin di wilayahnya.
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim raskin pada struktur pemerintahan di bawahnya.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin pada struktur pemerintahan di bawahnya.

Di level paling bawah, Pedum Raskin juga mengarahkan pada pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Raskin yang terdiri dari aparat kecamatan, desa/kelurahan, institusi kemasyarakatan seperti TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat/ Kepala Desa/Kelurahan, Kades/Lurah, dan perangkat wilayah dibantu lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat lain termasuk RTM yang bertanggung jawab dan bertugas menyampaikan raskin kepada RTM.

v. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan; Kegiatan perencanaan berdasarkan data RTM BPS melalui mekanisme yang ditetapkan. Tim Raskin Pusat mengalokasi pagu raskin berdasarkan data RTM BPS, yang ditindaklanjuti penentuan pagu oleh Gubernur, Bupati / Walikota pada lingkup pemerintahannya berdasarkan data RTM BPS. Sisa pagu yang tidak didistribusikan sampai tanggal 31 Desember 2008 tidak dapat disalurkan pada tahun 2009.

Penetapan penerima manfaat program raskin di desa/kelurahan dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang transparan dan partisipatif. Musyawarah ini dilakukan untuk menentukan nama-nama calon penerima manfaat untuk ditetapkan sebagai RTM penerima manfaat sesuai dengan sasaran. Musyawarah Desa/Kelurahan ini dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dengan peserta aparat desa/kelurahan, kepala dusun, ketua rw, ketua rt, PLKB, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) / Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan desa / kelurahan, tokoh masyarakat (agama, adat, dll) serta perwakilan RTM.

Daftar RTM Penerima Manfaat Raskin (format DPM-1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, dan disahkan oleh Camat setempat. RTM Penerima Manfaat Raskin yang tercantum dalam DPM-1 diberikan identitas berupa tanda tertentu. Mekanisme musyawarah desa/kelurahan

lebih rinci diatur oleh Tim Raskin Provinsi atau Tim Raskin Kabupaten / Kota dalam Pedoman Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis.

vi. Mekanisme Distribusi dan Pelaporan; Distribusi raskin dimulai dengan pengajuan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati/Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu raskin dan RTM Penerima Manfaat Raskin di masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan. Proses berlanjut dari gudang Bulog ke titik distribusi, dan penyaluran ke RTM Penerima Manfaat Raskin. Setiap tahapan serah terima dicatat dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan identitas penerima secara jelas. Berdasarkan BAST, Divre/Subdivre/Kansilog membuat rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin masing-masing kecamatan yang ditandatangani bersama, yang diteruskan dengan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Raskin Kabupaten/Kota. Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Raskin Kabupaten/Kota, Bulog Divisi Regional Banten membuat laporan pelaksanaan raskin ke Kantor Pusat Perum Bulog.

vii. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi; Pembayaran harga penjualan beras (HPB) raskin dari RTM Penerima Manfaat Raskin kepada pelaksana distribusi dan dari pelaksana distribusi kepada Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp1.600per kg netto. Uang HPB raskin yang diterima pelaksana distribusi dari RTM Penerima Manfaat Raskin harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuat tanda terima pembayaran rangkap 3 oleh Satker Raskin.

Dalam hal RTM Penerima Manfaat Raskin tidak mampu membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kades/Lurah/Camat/Bupati/Walikota membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan.

viii. Program Raskin Daerah; Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program raskin daerah dengan sumber dana dari APBD sebagai pendukung program raskin nasional. Untuk tahun 2008, mengingat kebijakan nasional hanya menyediakan raskin sebanyak 10 kg/bulan/ RTM dengan durasi

selama 10 bulan, maka keberadaan program raskin daerah menjadi penting untuk melengkapinya menjadi 12 bulan. Untuk keterpaduan pelaksanaannya agar dilakukan sinkronisasi dan koordinasi oleh Tim Raskin setempat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

ix. Sosialisasi; Sosialisasi program raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi sekaligus pemahaman yang sama dan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum, dan khususnya kepada RTM Penerima Manfaat Raskin. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan serta hak-hak kewajiban masing-masing.

Melalui sosialisasi program raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula apabila dalam pelaksanaan program masih ditemui adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur pengaduan masyarakat (UPM) yang tersedia.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi, yang diselenggarakan di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan sehingga pelaksanaan program raskin berjalan dengan baik. Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada, sebagai interaksi pelaksana dan masyarakat. Di samping itu sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau pertemuan tingkat desa/kelurahan.
- b. Media Massa, untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan melalui media antara lain koran,

majalah, mau pun media elektronik seperti televisi dan internet, baik tingkat nasional mau pun daerah.

- c. Media Lainnya, dengan memanfaatkan media lainnya antara lain buklet, brosur, stiker, spanduk, mau pun forum keagamaan, budaya, arisan, dan lain-lain yang berkembang dalam bahasa lokal mau pun nasional.

x. Pemantauan

- a. Pemantauan program raskin bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program raskin sesuai dengan rencana program raskin dan indikator kinerja program.
- b. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh Tim Raskin Pusat mau pun Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau pun dapat dilakukan oleh pihak lain sesuai kebutuhan seperti Perguruan Tinggi
- c. Waktu pelaksanaan pemantauan program raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan
- d. Hasil pemantauan dibahas secara berjenjang dalam rapat koordinasi Tim Raskin Pusat mau pun Tim Raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup permasalahan untuk ditindaklanjuti.

xi. Evaluasi

- a. Evaluasi program raskin bertujuan untuk menilai efektifitas pelaksanaan program raskin berdasarkan indikator kinerja program yang ditetapkan
- b. Evaluasi pelaksanaan program raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, dan Tim Raskin Daerah. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga independent seperti Perguruan Tinggi
- c. Waktu evaluasi program raskin dilakukan secara periodic dan/atau sesuai dengan kebutuhan
- d. Hasil evaluasi program raskin dibahas dengan instansi/pihak terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab program raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

xii. Pengaduan Masyarakat

- a. Tim Raskin Provinsi dan Tim Raskin Kabupaten/Kota membentuk sekretaris unit pengaduan masyarakat (UPM) di bawah koordinasi Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat sesuai tingkatan wilayahnya
- b. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Raskin Provinsi, dan Tim Raskin Kabupaten/Kota sesuai tingkatan wilayahnya
- c. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM Provinsi, Kabupaten/Kota atau melalui sarana media elektronik.
- d. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana program raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.

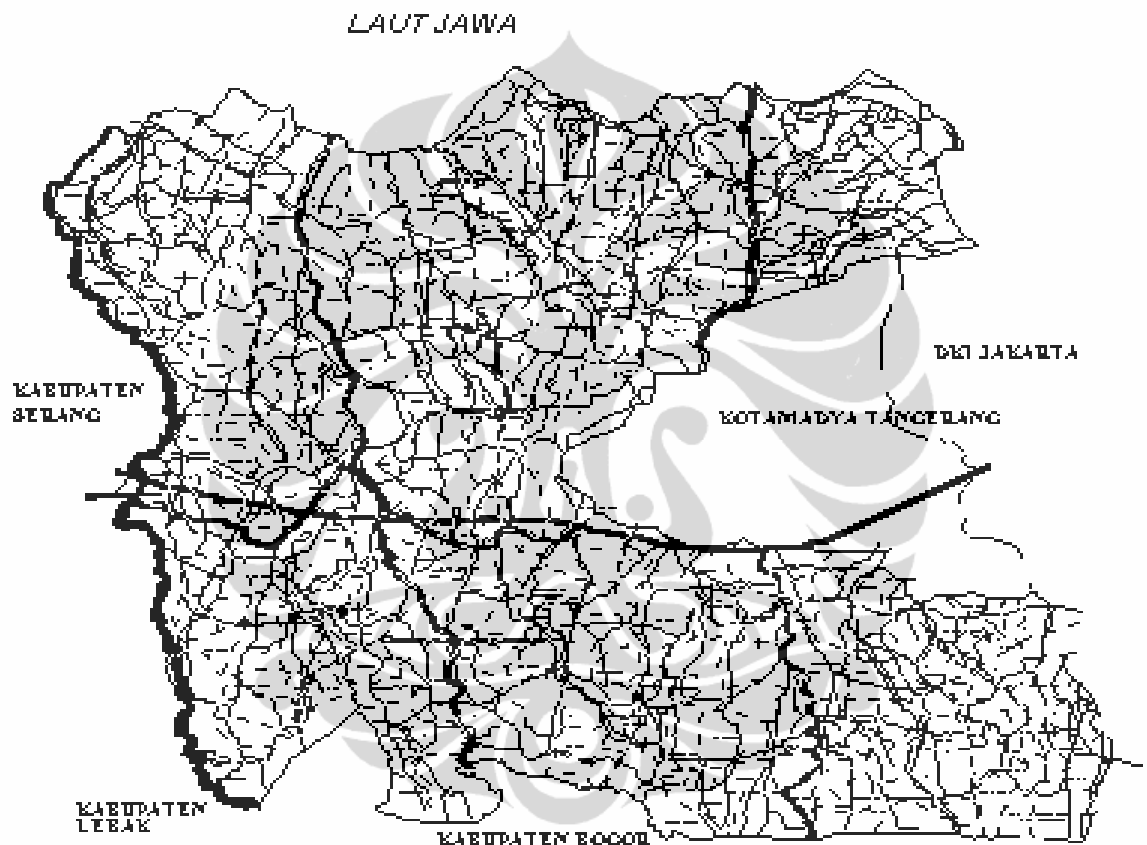
xiii. Pengawasan

- a. Pengawasan pelaksanaan program raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui UPM dan media massa.

4.3. Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tangerang

4.3.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Tangerang

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Tangerang



Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang (RPJPD Kab Tangerang 2005-2025) termasuk salah satu daerah tingkat dua dalam wilayah Provinsi Banten yang terletak $106^{\circ}20'$ - $106^{\circ}43'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}00'$ - $6^{\circ}20'$ Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang yang terletak di bagian timur Provinsi Banten pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa (dengan garis pantai 52 km)
- Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Tangerang

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Keduanya dihubungkan oleh jalan tol Jakarta - Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian Pulau Jawa – Sumatra.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang sekitar 1110 km², terdiri atas 36 kecamatan, 251 desa dan 77 kelurahan. Terdapat tiga pusat pertumbuhan yaitu pusat pertumbuhan Balaraja (barat), Pasar Kemis (utara), dan Serpong (selatan). Di akhir tahun 2008, pusat pertumbuhan Serpong (selatan) terpisah dengan terjadinya pembentukan Kota Tangerang Selatan yang meliputi kecamatan Serpong, Serpong Utara, Setu, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pamulang.

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2005 sebanyak 3.317.331 jiwa dengan kepadatan rata-rata 2.988 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2000 s.d tahun 2005 sebesar 3,58% per tahun. Jumlah penduduk miskin (Pra KS dan KS-1 alasan ekonomi) pada tahun 2005 adalah sebesar 154.067 KK (20,8% dari total KK yang tercatat sebanyak 742.284). Jumlah RTM penerima manfaat raskin tahun 2008 adalah sejumlah 254.485 dengan total alokasi raskin 36.900.325 kg. Ada pun data makro ekonomi Kabupaten Tangerang selama 2004 sampai dengan tahun 2008 disajikan dalam halaman berikut:

Tabel 4.1
INDIKATOR SOSIAL EKONOMI KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2004 – 2008

NO	URAIAN	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	Jumlah Penduduk (orang)	3.204.291	3.317.330	3.435.205	3.502.226	3.585.256
02	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Jutaan rupiah	21.137.74 0	24.415.94 0	28.042.13 8	30.966.45 0	35.121.76 0
03	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 Dlm Jutaan rupiah	15.323.64 7	16.445.45 6	17.576.74 8	18.789.46 0	19.958.31 0
04	Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%)	6,41	7,32	6,88	6,90	6,22
05	Tingkat Inflasi (%)	6,23	16,21	6,41	6,51	7,24
06	Angkatan Kerja (orang)	1.371.701	1.437.895	1.494.789	1.516.290	1.658.398
07	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	53,03	56,13	57,00	62,13	65,89
	Penduduk 15 tahun keatas yg bekerja				1.282.821	1.405.901
08	Jumlah Pengangguran (%)	14,92	14,31	18,23	15,39	15,23
					233.357	252.574
09	Indeks Pembangunan Manusia / IPM	69,10	69,79	69,90	70,71	71,30
10	Angka Harapan Hidup / AHH (tahun)	64,00	64,90	65,10	65,32	65,80
11	Rata-rata Lamanya Sekolah / RLS (tahun)	8,90	8,90	8,90	8,93	8,90
12	Angka Melek Huruf / AMH (%)	94,00	94,70	94,70	95,34	95,80
13	Kemampuan Daya Beli (ribuan Rp) <i>Purchasing Power Parity (PPP)</i> (per tahun)	618,50	619,50	621,20	626,50	629,20
14	Angka Kematian Bayi / AKB (%??)per 1000KH	51,10	49,70	37,50	32,28	27,53
15	Penduduk Miskin					
	Jumlah (Jiwa)	245.963	339.704	310.258	258.860	257.421
	%	7,70	10,24%	9,03%	7,39%	7,18%
16	Penerima BLT / Raskin -(RTM)				159.266	254.485

Sumber Data Susenas BPS diolah

Dari tabel Susenas pada tabel 4.1 terlihat jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 tertinggi selama lima tahun. Sedangkan untuk kondisi kemiskinan mikro tahun 2005 BPS melakukan pendataan melalui PSE05. PSE05 ini menjadi dasar pendistribusian BLT, Jamkesmas dan Raskin untuk tahun 2008. Sehingga penerima BLT, Jamkesmas dan Raskin untuk tahun 2008 tertinggi pada periode lima tahun tersebut.

Tabel 4.2
Alokasi RTM Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Banten 2007-2008

No	Kab / Kota	JUMLAH RTM			
		2007	%	2008	%
1	Kab Pandeglang	59.654	13,65%	117.454	16,73%
2	Kab. Lebak	92.997	21,29%	146.723	20,90%
3	Kab. Serang	78.165	17,89%	107.595	15,33%
4	Kab Tangerang	159.266	36,46%	254.485	36,25%
5	Kota Tangerang	27.526	6,30%	31.254	4,45%
6	Kota Cilegon	19.264	4,41%	20.902	2,98%
7	Kota Serang			23.603	3,36%
	Jumlah	436.872	100,00%	702.016	100,00%

Sumber: SK Gubernur Banten Penetapan Pagu Alokasi Raskin 2007 dan 2008

Dari tabel alokasi RTM Penerima Raskin se Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten yang mendapat alokasi tertinggi di tahun 2007 dan 2008.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)²⁶ Kabupaten Tangerang 2005-2025, isu strategis pertama dalam hal demografi adalah perlu adanya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin terutama penduduk miskin yang tinggal di wilayah perdesaan. Isu strategis tentang kemiskinan dan pengangguran ini berikut rumusan permasalahan utamanya selalu muncul dalam

²⁶ Pemkab Tangerang, Perda RPJPD 2005-2025, 2009

kebijakan utama APBD selama tahun 2004 hingga tahun 2008. Namun, dari tahun ke tahun angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

Dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tangerang, program raskin masih dibutuhkan. Diharapkan program ini dilaksanakan dengan baik mulai dari Pemerintah Pusat, Bulog, Pemerintah Daerah, mau pun pelaksana raskin di tingkat kecamatan, desa/kelurahan.

4.3.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagaimana dijelaskan dalam Metodologi Penelitian, empat kecamatan yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong. Dua kecamatan pertama mewakili kecamatan bertipologi perdesaan dan tetap menjadi bagian Kabupaten Tangerang sedangkan dua kecamatan terakhir mewakili kecamatan bertipologi perkotaan yang kemudian menjadi bagian Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4. 3
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (dalam ribu)	Jumlah RTM	Alokasi Raskin (kg)	Tipologi	Jumlah Titik Distribusi
Cisauk	< 200	4.641	672.945	Pedesaan	6
Pagedangan	> 200	8.735	1.266.575	Pedesaan	11
Pondok Aren	> 200	8.284	1.201.180	Perkotaan	11
Serpong	< 200	3.301	478.645	Perkotaan	9

Sumber: BPS dan Bappeda Kab Tgr

Cisauk

Kecamatan Cisauk, merupakan kecamatan di bagian selatan Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk di bawah 200 ribu jiwa. Kecamatan ini terletak di sebelah barat Sungai Cisadane yang di akhir tahun 2008 menjadi batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Cisauk memiliki ciri-ciri perdesaan, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bertani dan buruh kasar. Kecamatan Cisauk terdiri dari satu

kelurahan dan lima desa yaitu Kelurahan Cisauk, Desa Suradita, Desa Sampora, Desa Cibogo, Desa Dangdang, dan Desa Mekar Wangi. Jumlah RTM penerima manfaat raskin pada tahun 2008 adalah 4.641 KK dengan alokasi raskin 672.945 kg.

Pagedangan

Kecamatan Pagedangan, merupakan kecamatan di bagian selatan Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk di atas 200 ribu jiwa. Seperti Cisauk, Pagedangan terletak di sebelah barat Sungai Cisadane. Kecamatan Pagedangan memiliki ciri-ciri perdesaan, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bertani dan buruh kasar. Kecamatan Pagedangan terdiri dari satu kelurahan yaitu Kelurahan Medang dan sepuluh desa yaitu Pagedangan, Malang nengah, Kadusirung, Jetake, Situgadung, Cicalengka, Lengkong Kulon, Cihuni, Cijantra, dan Karang Tengah. Jumlah RTM penerima manfaat raskin pada tahun 2008 adalah 8.735 KK dengan alokasi raskin 1.266.575 kg.

Pondok Aren

Kecamatan Pondok Aren, merupakan kecamatan di sebelah tenggara Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk di atas 200 ribu jiwa. Kecamatan ini memiliki ciri-ciri perkotaan, yang menyebabkan ditingkatkannya status seluruh desanya menjadi kelurahan pada tahun 2005. Kecamatan Pondok Aren yang berada di sebelah timur Sungai Cisadane terdiri dari sebelas kelurahan yaitu Pondok Betung, Pondok Karya, Pondok Jaya, Jurang Mangu Timur, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Pondok Pucung, Parigi Lama, Parigi Baru, Pondok Kacang Barat, Pondok Kacang Timur. Jumlah RTM penerima manfaat raskin pada tahun 2008 adalah 8.284 dengan alokasi raskin 1.201.180 kg.

Serpong

Kecamatan Serpong, merupakan kecamatan di sebelah tenggara Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk di di bawah 200 ribu jiwa. Kecamatan ini memiliki ciri-ciri perkotaan, yang menyebabkan ditingkatkannya status seluruh desanya menjadi kelurahan pada tahun 2005. Seperti kecamatan Pondok Aren,

kecamatan Serpong berada di sebelah timur Sungai Cisadane terdiri dari sembilan kelurahan yaitu Ciater, Rawa Buntu, Rawa Mekar Jaya, Lengkong Gudang, Lengkong Kulon, Buaran, Lengkong Gudang Timur, Cilenggang, dan Serpong. Jumlah RTM penerima manfaat raskin pada tahun 2008 adalah 3.301 dengan alokasi raskin 478.645 kg.

4.3.3. Kebijakan Raskin Pemerintah Daerah

Menindaklanjuti Pedoman Umum Raskin 2008 yang dikeluarkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan SE Mendagri No. 412.6/2518 tanggal 7 Desember 2007 tentang pagu alokasi raskin tingkat provinsi tahun 2008, Gubernur Banten mengeluarkan SK Nomor 501/Kep.2-Huk/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang penetapan alokasi pagu beras rumah tangga miskin (Raskin) kabupaten / Kota se-provinsi Banten tahun 2008 yang direvisi dengan SK Gubernur Banten Nomor 501/Kep.48-Huk/2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang perubahan alokasi pagu beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) kabupaten / kota se-provinsi Banten tahun 2008, sehingga rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Alokasi Raskin Kabupaten / Kota Provinsi Banten 2008

No	Kab / Kota	Jml Titik Distribusi	Jumlah RTM	Alokasi Pagu / bulan (kg)	Alokasi pagu setahun (kg)
1	Kab Pandeglang	335	117.454	1.761.810	17.030.830
2	Kab. Lebak	320	146.723	2.200.845	21.274.835
3	Kab. Serang	308	107.595	1.613.925	15.601.275
4	Kab Tangerang	328	254.485	3.817.275	36.900.325
5	Kota Tangerang	104	31.254	468.810	4.531.830
6	Kota Cilegon	43	20.902	313.530	3.030.790
7	Kota Serang	66	23.603	354.045	3.422.435
	Jumlah	1.504	702.016	10.530.240	101.792.320

Sumber: SK Gubernur Banten 501/Kep.48-Huk/2008

Mengingat realisasi raskin Banten hingga tanggal 11 Maret 2008 baru 17,22%, Gubernur Banten mengeluarkan surat edaran tentang percepatan realisasi

raskin yang ditujukan kepada bupati / walikota se-provinsi Banten dengan nomor 511.1/484-BPPMD/2008. Disebutkan, realisasi raskin Kabupaten Tangerang 0%.

Secara khusus Gubernur Banten mengeluarkan surat nomor 511.1 / 743 – BPPMD / 2008 yang ditujukan kepada Bupati Tangerang perihal pelaksanaan penyaluran beras untuk RTM (Raskin). Dalam surat ini Gubernur meminta perhatian Bupati Tangerang dan mengharuskan untuk segera mengambil langkah sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat keputusan penetapan alokasi pagu beras untuk RTM (Raskin) kecamatan dan desa/kelurahan serta diikuti dengan pengajuan surat permintaan alokasi (SPA).
2. Melaksanakan penyaluran raskin mulai awal April 2008 sesuai Pedum Raskin 2008.

Bupati Tangerang mengeluarkan surat tentang penetapan alokasi pagu beras RTM (Raskin) kecamatan se-kabupaten Tangerang tahun 2008 dengan nomor 844.1/Kep.118-Huk/2008 tanggal 16 April 2008. Alokasi raskin per kecamatan, desa/kelurahan dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Bupati Tangerang juga membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008. Di samping tim tersebut, Bupati juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tangerang (TKPKD) yang didanai APBD.

Tabel 4.5.

Alokasi Raskin per Kecamatan se- Kabupaten Tangerang 2008

No	Kecamatan	RTM	Total Raskin (Kg)	Titik Distribusi (TD)	Jml TD
1	Tigaraksa	9.853	1.428.685	Desa Tigaraksa, Pasir Bolang, Batagara, Pasir Nangka, Pete, Tegal Sari, Kadu Agung, Pematang, Cisereh, Marga Sari, Cileles, Sodong, Tapos, Bantar Panjang.	14
2	Cikupa	6.686	969.470	Suka Mulya, Cibadak, Bunder, Talaga, Telaga Sari, Dukuh, Cikupa, Sukanegara, Bitung Jaya, Pasir Gadung, Suka Damai, Pasir Jaya, Budi Mulya, Bojong.	14
3	Curug	6.215	901.175	Curug Kulon, Curug Wetan, Kadu Jaya, Suka Bakti, Binong, Cukang Galih, Kadu.	7
4	Legok	7.078	1.026.310	Babakan, Legok, Rancagong, Palasari, Serdang Wetan, Kemuning, Caringin, Cirarab, Bojong Kamal, Babat, Ciangir.	11
5	Serpong	3.301	478.645	Ciater, Rawa Buntu, Rawa Mekar Jaya, Lengkong Gudang, Lengkong Kulon, Buaran, Lengkong Gudang Timur, Cilenggang, Serpong.	9
6	Ciputat	5.750	822.750	Sawah Baru, Serua, Ciputat, Sawah Lama, Serua Indah, Jombang, Cipayung	9
7	Pasar Kemis	7.284	1.056.180	Kuta Baru, Kuta Bumi, Pangadegan, Sukamantri, Gelamjaya, Kuta Jaya, Pasar Kemis, Suka Asih, Sindangsari	9
8	Balaraja	6.145	891.025	Balaraja, Telaga Sari, Sentul, Saga, Sentuljaya, Tobat, Cengkudu, Gembong, Sukamurni	9
9	Kresek	8.892	1.289.340	Pasir Ampo, Ranca Ilat, Kemuning, Renged, Talok, Koper, Jengkol, Patra Sana, Kresek	9
10	Kronjo	7.668	1.111.860	Kronjo, Pagejahan, Pasir, Pagedangan Ilir, Pagedangan Udik, Pasilian, Bakung, Blukbuk, Cirumpak	9
11	Mauk	9.868	1.430.860	Mauk Barat, Mauk Timur, Tgl Kunir Kidul, Tgl Kuning Lor, Sasak, Gunung Sari, Kedung Dalam, Marga Mulya, Tanjung Anom, Jati Warigin, Banyu Asih, Ketapang	12
12	Rajeg	11.017	1,597,465	Rajeg, Rajeg Mulya, Pangarengan, Jambu Karya, Lembang Sari, Sukamanah, Tanjakan, Tanjakan Mekar, Sukatani, Sukasari, Ranca Bango, Daon, Mekarsari	13
13	Sepatan	7.495	1,086,775	Sepatan, Karet Kayu Agung, Kayu Bongkok, Pdk Jaya, Pisangan Jaya, Mekar Jaya, Sarakan.	8
14	Teluk Naga	12.008	1,741,160	Teluk Naga, Bojong Renged, Babakan Asem, Kebon Cau, Pangkalan, Komp. Melayu Timur,	13
15	Pondok Aren	8.284	1,201,180	Kel. Pndk betung, Pdk Jaya, Jurang mangu timur, Jurang mangu barat, pdk Aren, Pdk Jaya, Pdk Pucung, Perigi lama, Perigi baru, Pdk Kacang timur, Pdk kacang barat.	11
16	Cisoka	6.641	962.945	Cisoka, Caringin, Salapajang, Sukatani, Bojong loa, Cibugel, Cempaka, Cerenang, Karang Harja, Jeungjing.	10
17	Pamulang	9.308	1,349,660	Pamulang Barat, Benda Baru, Pdk Benda, Pdk Cabe Udik, Pdk Cabe liir, Kedaung, Bambu Apus, Pamulang Timur.	8
18	Kemiri	6.236	904.220	Kemiri, Kelebet, Lontar, Ranca Iyuh.	7

Tabel 4.5.
Alokasi Raskin per Kecamatan se- Kabupaten Tangerang 2008

19	Paku Haji	10.905	1,581,225	Paku Haji, Paku Alam, Bonisari, Rawa Boni, Buaran Mangga, Buaran Bambu, Kali Bra, Kohod, Kramat, Sukawali, Surya Bahari, Kiara Payung, Laksana Gaga.	14
20	Kosambi	8.037	1,165,365	Kosambi Barat, Kosambi Timur, Salembaran Jaya, Salembaran Jati, Rawa Rengas, Rawa Burung, Cengklong, Blimbing, Jati Mulya, Dedap.	10
21	Cisauk	4.641	672.945	Kel. Cisauk, Ds Suradita, Sampora, Cibogo, Dangdang, Mekar Wangi.	6
22	Jambe	7.166	1,039,070	Tipar Jaya, Jambe, Mekar sari, Tamban, Sukamanah, Ancol pasir, Ranca buaya, Pasir barat, Kutruk, Daru.	10
23	Panongan	6.934	1,005,430	Ranca iyuh, Mekar bakti, Peusar, Ranca 9 titik distribusi : Pamulang barat, Benda baru, Pdk Benda, Pdk Cabe Udik, Pdk Cabe liir, Kedaung, Bambu Apus, Pamulang timur.	8
24	Pagedangan	8.735	1,266,575	Pagedangan malang nangah, Kadusirung, Jetake, Situgadung, Cicalengka, Lengkong kulon, Cihuni, Cijantra, Medang, Karang tengah.	11
25	Sukadiri	6.032	874.640	Ds sukadiri, Buaran jati, Rawa kidang, Pekayon, Karang serang, Kosambi, Mekar kondang, gintung.	8
26	Jayanti	6.343	919.735	Jayanti, Cikande, Sumur Bandung, Pasir Gintung, Pangkat, Dangder, Pabuaran, Pasir Muncang.	8
27	Sukamulya	6.685	969.325	Benda, Sukamulya, Kali Asin, Bumi ayu, Perahu, Merak, Bunar, Kubang.	8
28	Kelapa Dua	4.799	695.855	Kelapa dua, Bencongan, Bencongan Indah, Pakulon barat, Bojong angka, Curug sanggremg.	6
29	Sindang Jaya	6.690	970.050	Sindang Sono, Sindang Asih, Wanakerta, Sukaharja, Sindang panon, Sindangjaya, Badak Anom.	7
30	Sepatan Timur	7.520	1,090,400	Kedaung, Lebak Wangi, Jati mulya, Sanghiang, Gempol Sari, Kampung kelor, Pdk Kelor, Tanah Merah.	8
31	Solear	5.466	792.860	Solear, Cikasungka, Cireunde, Cikareo, Cikuya, Pesanggrahan, Munjul, Mauk.	7
32	Gunung Kaler	7.576	1,098,520	Gunung Kaler, Sidoku, Ranca Gede, Kedung, Cipayeh, Onyam, Tamiang, Pandawati, Cibetik.	9
33	Mekar Baru	6.330	917.850	Ds Mekar Baru, Kedaung, Cijeruk, Waliwis, Klutuk, Jenggot, Kosambe dalem, Gandaria, Muncung.	9
34	Ciputat Timur	3.102	449.790	Cempaka Putih, Pondok ranji, Pisangan, Cireunde, Pempoa, Rengas.	6
35	Serpong Utara	3.548	514.460	Pakulon, Paku Alam, Paku jaya, Pdk Jagung, Pdk jagung Timur, Jelupang, Lengkong Karya.	7
36	Setu	4.245	615.525	Setu, Muncul, Keranggan, Kademangan, Babakan, Bakti Jaya.	6
	JUMLAH	254.485	36,900,325		328

Sumber: SK Bupati Tangerang No. 844.1/Kep.118-Huk/2008

4.3.4. Realisasi Raskin Di Kabupaten Tangerang

Realisasi program raskin di Kabupaten Tangerang selama tahun 2008 disajikan dalam tabel pada halaman berikut:

Tabel 4.6

Realisasi Raskin per Kecamatan se Kabupaten Tangerang Tahun 2008

No	Kecamatan	RTM	Alokasi Raskin (kg)	Realisasi Raskin (kg)	Persentase
1	Tigaraksa	9.853	1.428.685	394.120	27,59%
2	Cikupa	6.686	969.470	167.150	17,24%
3	Curug	6.215	901.175	248.600	27,59%
4	Legok	7.078	1.026.310	283.120	27,59%
5	Serpong	3.301	478.645	33.010	6,90%
6	Ciputat	5.750	822.750	143.750	17,47%
7	Pasar Kemis	7.284	1.056.180	279.360	26,45%
8	Balaraja	6.145	891.025	535.540	60,10%
9	Kresiek	8.892	1.289.340	889.200	68,97%
10	Kronjo	7.668	1.111.860	881.820	79,31%
11	Mauk	9.868	1.430.860	986.800	68,97%
12	Rajeg	11.017	1.597.465	605.935	37,93%
13	Sepatan	7.495	1.086.775	749.500	68,97%
14	Teluk Naga	12.008	1.741.160	480.320	27,59%
15	Pondok Aren	8.284	1.201.180	331.360	27,59%
16	Cisoka	6.641	962.945	534.635	55,52%
17	Pamulang	9.308	1.349.660	372.320	27,59%
18	Kemiri	6.236	904.220	530.060	58,62%
19	Paku Haji	10.905	1.581.225	763.350	48,28%
20	Kosambi	8.037	1.165.365	321.480	27,59%
21	Cisauk	4.641	672.945	116.025	17,24%
22	Jambe	7.166	1.039.070	824.090	79,31%
23	Panongan	6.934	1.005.430	277.360	27,59%
24	Pagedangan	8.735	1.266.575	218.375	17,24%
25	Sukadiri	6.032	874.640	320.180	36,61%
26	Jayanti	6.343	919.735	348.865	37,93%
27	Sukamulya	6.685	969.325	579.475	59,78%
28	Kelapa Dua	4.799	695.855	191.960	27,59%
29	Sindang Jaya	6.690	970.050	167.250	17,24%
30	Sepatan Timur	7.520	1.090.400	526.400	48,28%

Tabel 4.6
Realisasi Raskin per Kecamatan se Kabupaten Tangerang Tahun 2008

31	Solear	5.466	792.860	453.050	57,14%
32	Gunung Kaler	7.576	1.098.520	871.240	79,31%
33	Mekar Baru	6.330	917.850	727.950	79,31%
34	Ciputat Timur	3.102	449.790	77.550	17,24%
35	Serpong Utara	3.548	514.460	141.920	27,59%
36	Setu	4.245	615.525	106.125	17,24%
	Jumlah	254.485	36,900,325	15.479.245	41,95%

Sumber: Bulog Tangerang (diolah)

Sedangkan realisasi raskin di empat kecamatan yang diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Realisasi Raskin Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong 2008

No	Kecamatan	RTM	Alokasi Raskin (kg)	Realisasi Raskin (kg)	Persentase
1	Cisauk	4.641	672.945	116.025	17,24%
2	Pagedangan	8.735	1.266.575	218.375	17,24%
3	Pondok Aren	8.284	1.201.180	331.360	27,59%
4	Serpong	3.301	478.645	33.010	6,90%
	Total	24.961	3.619.345	698.770	19,31%

Sumber: Bulog Tangerang (diolah)

Cisauk, dari total alokasi 672.945kg terealisasi 116.025 kg atau 17,24% Distribusi raskin dilaksanakan dua kali yaitu pada bulan Mei sejumlah 46.410 kg dan bulan November sebanyak 46.530 kg.

Pagedangan, dari total alokasi 1.266.575 kg terealisasi 218.375 kg atau 17,24%. Distribusi raskin dilaksanakan dua kali yaitu pada bulan Mei sejumlah 87.350 kg dan bulan Agustus sebanyak 131.025 kg.

Pondok Aren, dari total alokasi 1.201.180 kg terealisasi 331.360 kg atau 27,59%. Distribusi raskin dilaksanakan tiga kali yaitu pada bulan Mei sejumlah

82.840 kg, bulan Agustus sebanyak 124.260 kg dan bulan Oktober sebanyak 124.260 kg.

Serpong, dari total alokasi 478.645 kg terealisasi 33.010 kg atau 6,90%. Distribusi raskin dilaksanakan satu kali yaitu pada bulan Agustus sebanyak 33.010 kg.

Total realisasi program raskin di empat kecamatan yang diteliti adalah 698.770 ton dari total alokasi 3.619.345 ton atau hanya sebesar 19,31%. Pendistribusian raskin hanya dilakukan antara satu hingga tiga kali. Pencapaian ini di bawah pencapaian raskin Kabupaten Tangerang yang mencapai 41,95% dengan pelaksanaan antara empat sampai lima kali.

4.3.5. Pelaksanaan Sosialisasi

Dari tahun ke tahun sosialisasi program selalu dilaksanakan di awal tahun program. Bulog Pusat memfasilitasi sosialisasi program raskin yang diketuai oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sosialisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat. Untuk tingkat daerah, Pemerintah Daerah mengundang Bulog Sub Divisi Regional untuk bersama-sama mensosialisasikan program raskin kepada pemangku kepentingan di daerah.

Namun, untuk tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak melaksanakan sosialisasi tersebut, karena segenap jajaran Pemerintah Kabupaten tengah sibuk mempersiapkan pilkada Februari 2008. Faktor lainnya adalah berkembangnya kegamangan jajaran Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan program raskin akibat adanya proses hukum terhadap beberapa pejabat kecamatan dalam kasus dugaan penyimpangan raskin 2007.

Kegamangan ini terus berlangsung walau pun Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang menjamin tidak akan ada tindakan hukum sepanjang program raskin dilaksanakan dengan benar.

Program raskin Kabupaten Tangerang tahun 2008 mulai dilaksanakan awal Mei 2008²⁷ di Kecamatan Jambe. Dalam kesempatan ini sosialisasi tentang

²⁷ Kumpulan Berita Media dalam Lampiran 2

program raskin dilaksanakan oleh Staf Ahli Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Sosialisasi pernah dilakukan Bulog melalui iklan di koran lokal, namun dalam evaluasi efektifitasnya dianggap rendah mengingat jangkauannya tidak luas disamping banyak RTM yang buta huruf.

4.3.6. Pelaksanaan Organisasi dan Mekanisme Distribusi

Pada tahun 2008 terjadi pengembangan organisasi Bulog, sehingga mulai tanggal 1 Juli 2008, peran Bulog Sub Divisi Regional Banten digantikan oleh Bulog Sub Divisi Regional Tangerang. Perubahan ini berdasarkan surat keputusan Direktur Bulog nomor KD-287 / DS 200/06/2008 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Perusahaan Umum nomor KD 421 / DS 200 / 11/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional Perum Bulog yang memekarkan Sub Divisi Regional Banten menjadi tiga yaitu Sub Divisi Regional Serang dengan daerah layanan Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang, Sub Divisi Regional Lebak dengan daerah layanan Lebak dan Pandeglang, dan Sub Divisi Regional Tangerang dengan daerah layanan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sehingga untuk pelaksanaan raskin tahun 2008, Kabupaten Tangerang dilayani oleh Sub Divisi Regional Banten selama setengah tahun pertama, dan oleh Sub Divisi Regional Tangerang selama setengah tahun terakhir.

Dalam pelaksanaannya, Bupati Tangerang membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Kepala BKP3M sebagai Ketua Pelaksana Harian. Tim ini bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program raskin oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Raskin ini mempunyai fungsi 1) merumuskan perencanaan program raskin di Kabupaten Tangerang, 2) memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi intreaktif, dan penyebarluasan informasi program raskin di Kabupaten Tangerang, 3) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Raskin Kecamatan, Desa/Kelurahan, 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan. Namun tim ini tidak pernah melakukan kegiatan pada tahun 2008.

Semua kegiatan dalam tupoksi Tim Raskin dilaksanakan BKP3M yang secara teknis dilaksanakan oleh satu orang stafnya.

a. Organisasi

Organisasi pelaksana raskin telah ada secara lengkap di setiap tingkat pemerintahan di lingkup Kabupaten Tangerang. Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, yang ditindaklanjuti oleh pembentukan Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kecamatan, dan Tim Pelaksana Raskin Desa/Kelurahan. Namun Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Raskin ini tidak menjalankan fungsi sebagaimana ketentuan dalam Pedum Raskin 2008.

b. Mekanisme Distribusi

Dalam penentuan RTM penerima manfaat raskin, semestinya pelaksana raskin mendasarkan pada data BPS. Data RTM yang telah diserahkan BPS kepada Kepala Daerah dan Bappeda, mestinya diteruskan ke Kecamatan yang kemudian meneruskannya ke Desa/Kelurahan. Data RTM tersebut mestinya digunakan dalam Musyawarah Desa sebagai dasar penentuan RTM penerima manfaat raskin di Desa/Kelurahan tersebut. Perubahan data sangat dimungkinkan, sepanjang merupakan hasil musyawarah yang disahkan Camat. Namun data RTM dari BPS tersebut dalam pelaksanaannya tidak menjadi acuan penentuan penerima manfaat raskin. Tim Pelaksana Raskin Desa/Kelurahan mengalokasi raskin yang diterimanya kepada Ketua RT berdasar pengajuan mereka secara proporsional. Data warga miskin yang diajukan Ketua RT adalah data yang sama dari tahun ke tahun. Kemudian Ketua RT mendistribusikan kepada warganya, biasanya dimulai dari tetangga terdekat. Mengingat jumlah warga yang menginginkan raskin lebih banyak dari jumlah RTM yang diajukan, maka beras dibagi secara merata. Dalam banyak kejadian, warga miskin hanya mampu membeli satu hingga tiga liter, dan warga yang mampu bahkan dapat membeli hingga dua puluh liter. Bahkan Raskin dapat pula dibeli oleh pedagang.

Dalam membeli raskin, warga selalu membelinya dengan tunai. Uang raskin dikumpulkan Ketua RT untuk disetorkan kepada Pelaksana Raskin di Desa/Kelurahan. Pelaksana Raskin Desa/Kelurahan kemudian menyetorkan uang raskin ke Koordinator Raskin Kecamatan, untuk kemudian bersama uang raskin

desa/kelurahan lain se kecamatan tersebut disetorkan ke rekening Bulog Divisi Regional Banten atau Tangerang. Kecamatan mengusulkan penerbitan SPA kepada BKP3M dengan melampirkan bukti setor ke rekening Bulog. BKP3M kemudian mengirimkan SPA ke Bulog yang ditindaklanjuti Bulog hingga pengiriman raskin berikutnya.

Ketersendatan bahkan penyimpangan uang raskin sering terjadi di Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Penyimpangan ini diakui beberapa kades dalam rapat koordinasi di lima wilayah Kabupaten Tangerang. Mereka mengaku biasa menggunakan uang raskin untuk menunjang biaya sosial mereka. Ketersendatan juga terjadi akibat Kecamatan menunggu pelunasan seluruh desa/kelurahan di wilayahnya sebelum menyetor ke Bulog. Uang raskin yang terkumpul sering dipergunakan dahulu untuk kegiatan menyambut Hari Besar Nasional seperti perayaan hari Kemerdekaan, dan juga untuk membayar PBB di Kecamatan.

Dalam hal administrasi, Bulog berdasarkan BAST (Berita Acara Serah Terima) di Titik Distribusi dapat membuat Berita Acara Pelaksanaan Raskin untuk setiap Kecamatan (MBA-0), dan kemudian membuat Berita Acara Pelaksanaan Raskin Kabupaten (MBA-1).

4.3.7. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Bulog Divisi Regional Banten bersama Pemerintah Provinsi Banten melakukan pemantauan dan evaluasi. Salah satu bentuknya adalah surat edaran Gubernur Banten tentang percepatan realisasi raskin pada tanggal 17 Maret 2008. Dalam surat ini diungkapkan realisasi penyaluran raskin Kabupaten Tangerang yang 0%. Dari aktifitas pemantauan dan pengawasan ini, Bupati Tangerang menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat tentang penetapan alokasi pagu beras RTM (Raskin) kecamatan se-kabupaten Tangerang tahun 2008 dengan nomor 844.1/Kep.118-Huk/2008 tanggal 16 April 2008. Dengan adanya surat ini ditambah pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Raskin Kabupaten Tangerang, raskin di Kabupaten Tangerang mulai dilaksanakan pada awal Mei 2008.

Namun pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan raskin tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tahun 2008. Terjadinya

perubahan satuan kerja yang menangani raskin dari Dinkessos ke BKP3M menjadi salah satu alasannya. Kepala Dinkessos disibukkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan raskin 2007 sehingga tidak dapat berkoordinasi dengan Bulog Sub Divisi Tangerang. Sulitnya koordinasi menyebabkan pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan Bulog Sub Divisi Regional Tangerang berdasar BAST di Titik Distribusi. Koordinasi, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi raskin Kabupaten Tangerang baru dilakukan awal tahun 2009 oleh Bulog Sub Divisi Regional Tangerang bersama BKP3M.

4.3.8. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Tujuan Program

Dari wawancara dengan Kepala Bulog Sub Divisi Regional Banten teridentifikasi beberapa masalah dan kendala pelaksanaan raskin sebagai berikut:

1. Keterbatasan daya dukung sumber daya manusia dibandingkan dengan jumlah titik distribusi sebanyak 1504 dan meningkatnya jumlah pagu alokasi.
2. Masih adanya tunggakan raskin.
3. Biaya operasional yang belum seluruhnya dibantu Bupati / Walikota dari APBD, untuk pendistribusian dari titik distribusi sampai ke RTM, sehingga berpotensi terhadap adanya penjualan raskin di atas harga yang ditentukan.
4. Masih terdapat beras raskin yang dibagikan secara merata kepada warga, tanpa melihat apakah mereka RTM penerima manfaat raskin atau tidak.

Beberapa faktor yang diharapkan dapat mendukung tujuan program raskin sebagai berikut:

1. Konsolidasi internal Bulog untuk kelancaran distribusi raskin, termasuk antisipasi terhadap masalah yang sering muncul seperti kualitas, timbangan, dan pengiriman di luar jam kerja (sampai larut malam).
2. Koordinasi dengan semua pihak terkait, agar pelaksanaan program raskin sesuai dengan indikator kinerja program 6 T.
3. Tekad Bulog untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang lebih baik dengan melibatkan mahasiswa, LSM, Polri, dalam pendistribusian raskin, dengan tujuan agar raskin benar-benar bermanfaat bagi masyarakat umum.

4. Mengupayakan MoU dengan pihak lain dalam penagihan pembiayaan raskin yang tidak tepat waktu guna kelancaran distribusi raskin dan penerimaan raskin kepada RTM setiap bulannya.



BAB 5

**EVALUASI KINERJA PROGRAM RASKIN DI KABUPATEN
TANGERANG – STUDI KASUS PELAKSANAAN TAHUN 2008 DI
KECAMATAN CISAUK, PAGEDANGAN, PONDOK AREN DAN
SERPONG**

5.1. Hasil Penelitian Lapangan

Untuk mengetahui kinerja raskin Kabupaten Tangerang tahun 2008, penulis mewawancarai tiga pejabat yaitu Norpansyah Kepala Bulog Sub Divisi Regional Banten yang kemudian menjadi Kepala Bulog Sub Divisi Regional Serang, Bambang Sugeng Kepala Sub Divisi Regional Tangerang, dan Nana Mulyana, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKP3M) Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain ketiganya, penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat di setiap kecamatan dan empat orang tokoh lintas kecamatan, serta membagikan kuisioner dan mewawancarai sembilan puluh sembilan orang RTM di empat kecamatan yang diteliti. Jumlah responden setiap kecamatan proporsional dengan jumlah RTM di kecamatan tersebut.

5.1.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Sebaran Responden RTM dan Tokoh Masyarakat

No	Kec	RTM Berhak	Responden RTM	Responden Tokoh	Jumlah Responden
1	Cisauk	4.641	18	1	19
2	Pagedangan	8.735	35	1	36
3	Pondok Aren	8.284	33	1	34
4	Serpong	3.301	13	1	14
5	Lintas Kecamatan	0	0	4	4
	Total	24.961	99	8	107

Sumber: SK Bupati dan Survey Lapangan

Tabel 5.2
Sebaran Responden RTM Berdasar Jenis Kelamin dan Usia

No	Lokasi	Jenis Kelamin		Usia		
		P	L	< 30 th	31 s.d 50	> 50 th
1	Cisauk	4	14	1	13	4
2	Pagedangan	6	29	3	17	15
3	Pondok Aren	25	8	1	24	8
4	Serpong	1	12	3	9	1
	Jumlah	36	63	8	63	28

Sumber: Survey Lapangan

Tabel 5.3
Sebaran Responden RTM Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Lokasi	Tingkat Pendidikan				
		< SD	SD	SMP	SLTA	Diploma
1	Cisauk	2	13	2	1	0
2	Pagedangan	1	23	3	8	0
3	Pondok Aren	7	16	5	4	1
4	Serpong	0	4	3	6	0
	Jumlah	10	56	13	19	1

Sumber: Survey Lapangan

Sebaran Responden RTM

Responden RTM sebanyak sembilan puluh sembilan orang tersebar di empat kecamatan, tiga puluh enam perempuan dan enam puluh tiga orang pria. Delapan orang responden berusia di bawah 30 tahun, enam puluh tiga orang berusia antara 31 sampai dengan 50 tahun, dan dua puluh delapan orang berusia di atas lima puluh tahun. Dari segi pendidikan sepuluh responden tidak menamatkan SD, lima puluh enam menamatkan SD, tiga belas menamatkan SLTP, sembilan belas responden menamatkan SLTA, dan satu orang menamatkan Diploma. Dari

sisi pekerjaan, lima puluh tujuh responden merupakan buruh mulai dari buruh tani, buruh serabutan, hingga satpam, sembilan orang pedagang kecil, empat orang guru, dan dua puluh sembilan orang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dari sisi penghasilan, sembilan puluh orang berpenghasilan di bawah satu juta rupiah setiap bulan, sembilan orang berpenghasilan antara satu juta sampai dua juta rupiah setiap bulan. Tidak ada responden berpenghasilan di atas dua juta rupiah per bulan.

Tabel 5.4
Sebaran Responden RTM Berdasar Pekerjaan dan Penghasilan

No	Lokasi	Jenis Pekerjaan				Penghasilan		
		Buruh	Dagang	Guru	IRT	< 1 jt	1 jt - 2 jt	> 2 jt
1	Cisauk	13	1	0	4	17	1	0
2	Pagedangan	28	2	3	2	31	4	0
3	Pondok Aren	7	3	1	22	30	3	0
4	Serpong	9	3	0	1	12	1	0
	Jumlah	57	9	4	29	90	9	0

Sumber: Survey Lapangan

Sebaran Responden Tokoh Masyarakat Setempat

Responden tokoh masyarakat setempat sebanyak empat orang tersebar di setiap kecamatan yang diteliti. Kriteria tokoh masyarakat adalah tokoh yang dilibatkan dalam Musyawarah Desa seperti aparat desa, kader PKK, ketua RW, ketua RT, pemuka agama, dan tokoh pemuda. Tokoh masyarakat setempat yang menjadi responden penelitian ini terdiri dari tiga pria dan satu wanita dengan latar belakang pendidikan tiga orang SLTA, dan satu orang sarjana.

Tabel 5.5

Sebaran Responden Tokoh Masyarakat Berdasar Jenis Kelamin dan Usia

No	Lokasi	Jenis Kelamin		Usia		
		P	L	< 30 th	31 s.d 50	> 50 th
1	Cisauk	1	0	0	1	0
2	Pagedangan	0	1	0	0	1
3	Pondok Aren	0	1	0	0	1
4	Serpong	0	1	0	1	0
5	Lintas Kecamatan	1	3	0	2	2
	Jumlah	2	6	0	4	4

Sumber: Survey Lapangan

Sebaran Responden Tokoh Masyarakat Lintas Kecamatan

Responden tokoh masyarakat lintas kecamatan berjumlah empat orang terdiri dari tiga orang pria dan satu orang wanita. Dua orang responden merupakan anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2004–2009 yang mewakili Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Serpong, satu orang responden merupakan ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat sekaligus anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tangerang, dan satu orang responden merupakan aktifis LSM yang memiliki fokus untuk mengawasi pelaksanaan program raskin di Banten.

Keempat responden tokoh masyarakat lintas kecamatan dipilih karena dianggap mengetahui dan memberi perhatian terhadap pelaksanaan program raskin di Kabupaten Tangerang pada umumnya dan di empat kecamatan yang diteliti pada khususnya.

5.1.2. Kuisisioner dan Hasil Kuisisioner

Untuk mengevaluasi kinerja raskin tahun 2008 di Kabupaten Tangerang khususnya di Kecamatan Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong, penulis membagikan kuisisioner kepada responden RTM, tokoh masyarakat setempat dan tokoh masyarakat lintas kecamatan. Kuisisioner dimaksudkan sebagai wawancara

terstruktur untuk memudahkan memperoleh pendapat responden mengenai permasalahan raskin di lingkungan mereka. Ada dua bagian besar dalam kuisioner yaitu tentang sosialisasi dan pelaksanaan raskin. Dalam bagian sosialisasi, penulis mengajukan delapan pertanyaan dengan jawaban ya dan tidak. Kedelapan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah responden pernah mengikuti acara sosialisasi raskin di desa / RW / RT / Pengajian / dan acara sejenis lainnya.
2. Apakah responden pernah menerima / melihat bahan sosialisasi raskin seperti brosur / pamflet / spanduk / media lainnya
3. Apakah responden pernah mengikutimusyawarah desa untuk menentukan RTM penerima manfaat raskin
4. Apakah responden mengetahui berapa kg hak RTM menerima raskin setiap bulannya
5. Apakah responden mengetahui berapa harga tebus raskin setiap kg nya
6. Apakah responden mengetahui bagaimana kualitas raskin yang menjadi hak RTM
7. Apakah responden mengetahui berapa kali RTM menerima raskin selama tahun 2008
8. Apakah responden mengetahui bagaimana cara mengadukan bila terjadi penyimpangan raskin

Dalam bagian pelaksanaan raskin, penulis menanyakan enam hal sebagai berikut:

1. Apakah responden menerima raskin tahun 2008
2. Berapa harga tebus per kg raskin yang dibagikan
3. Berapa kg raskin yang dibagikan setiap bulannya
4. Berapa kali dalam tahun 2008 raskin dibagikan
5. Bagaimana kondisi raskin yang dibagikan
6. Bagaimana kualitas raskin yang dibagikan

Penulis memberikan alternatif jawaban untuk pertanyaan nomor satu adalah ya dan tidak, untuk pertanyaan nomor dua sampai dengan nomor empat adalah tiga kemungkinan jawaban, dengan jawaban a merupakan jawaban sesuai standar dengan toleransi penyimpangan 20%, jawaban b untuk toleransi penyimpangan 20% sampai dengan 40%, dan jawaban c untuk toleransi penyimpangan di atas 40%. Untuk pertanyaan nomor lima dan enam, penulis memberikan alternatif tiga jawaban yang bersifat kualitatif, untuk menampung persepsi masyarakat terhadap kondisi dan kualitas raskin yang seharusnya dalam kondisi baik dan kualitas sedang. Disamping berupa pertanyaan terstruktur di atas, penulis menyiapkan kolom untuk menampung masukan responden tentang program raskin. Dalam kolom ini kesan, pendapat, harapan dan saran responden terhadap program raskin ditampung. Contoh kuisisioner ada pada lampiran.

Hasil Kuisisioner RTM

Tabel 5.6

Pemahaman Responden RTM Terhadap Program Raskin (dampak sosialisasi)

No	Lokasi	Ikut Sosialisasi		Ada Brosur		Ikut Musdes		Tahu HakRTM	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	Cisauk	0	18	0	18	0	18	0	18
2	Pagedangan	0	35	0	35	0	35	0	35
3	Pondok Aren	0	33	0	33	0	33	0	33
4	Serpong	0	13	0	13	0	13	0	13
	Jumlah	0	99	0	99	0	99	0	99

Sumber: Survey Lapangan

Tabel 5.6 (sambungan)**Pemahaman Responden RTM Terhadap Program Raskin (dampak sosialisasi)**

No	Lokasi	Tahu Harga		Tahu Kualitas		Tahu Berapa Kali		Tahu Cara Mengadu	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	Cisauk	0	18	0	18	0	18	0	18
2	Pagedangan	0	35	0	35	0	35	0	35
3	Pondok Aren	0	33	0	33	0	33	0	33
4	Serpong	0	13	0	13	0	13	0	13
	Jumlah	0	99	0	99	0	99	0	99

Sumber: Survey Lapangan

Dari sisi pemahaman terhadap program raskin, kesembilan puluh sembilan responden RTM menyatakan tidak tahu. Mereka semua menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi raskin, tidak pernah melihat adanya media sosialisasi seperti brosur, tidak pernah mengikuti musyawarah desa untuk menentukan daftar penerima manfaat raskin, dan tidak mengetahui berapa seharusnya hak RTM. Mereka semua juga menyatakan tidak mengetahui harga seharusnya dari raskin, juga tidak mengetahui seperti apa kualitas dan kondisi seharusnya dari raskin. Mereka semua juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana mengadu ketika melihat penyimpangan.

Dari sisi pelaksanaan raskin, sembilan puluh delapan responden RTM menyatakan menerima raskin. Dari sisi harga, responden RTM Cisauk, Pagedangan, dan Serpong menyatakan harga Rp2000,00 per liter atau Rp2.500,00 per kg. Sedangkan responden yang tinggal di Pondok Aren menyatakan harga tebus raskin Rp1.600,00 per liter atau Rp2.000,00 per kg. Dari sisi banyaknya raskin yang dibagikan, responden Cisauk, Pagedangan, dan Serpong menyatakan lima liter per RTM, sedangkan responden Pondok Aren menyatakan sepuluh liter per RTM. Dari sisi frekwensi pembagian dalam tahun 2008, responden menjawab antara satu hingga dua kali. Dari sisi koalitas dan kondisi raskin, sembilan puluh tujuh responden menyatakan raskin jelek.

Tabel 5.7
Respons RTM terhadap Pelaksanaan Raskin

Kecamatan	A		B			C			D			E			F		
	Ya	Tdk	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Cisauk	18	0	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18
Pagedangan	35	0	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35
Pondok Aren	33	0	0	33	0	0	0	33	0	0	33	0	0	33	0	0	33
Serpong	12	1	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	2	11	0	2	11
Jumlah	98	1	0	33	66	0	0	99	0	0	99	0	2	97	0	0	97

Sumber: Survey Lapangan

Keterangan

A = Apakah Menerima Raskin?

B = Berapa Harga Tebus dlm Rb?

a. 16-19,2

b. 19,2 - 22,4

c. >22,4

C = Berapa Kg RaskinYg Dibagi?

a. 12-15 kg

b. 9-12 kg

c. <9 kg

D = Berapa Kali dlm 2008?

a. 8-10

b. 6-7

c. <6

E = Kondisi Raskin?

a. Bagus

b. Sedang

c. Jelek

F = Kualitas Raskin?

a. Bagus

b. Sedang

c. Jelek

Secara rinci temuan per kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Cisauk

Dalam hal sosialisasi program raskin, delapan belas responden RTM Cisauk yang tersebar di tiga desa, semuanya menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi baik di Desa, RW, RT, pengajian, mau pun arisan. Mereka juga menyatakan tidak pernah melihat brosur, pamflet, spanduk, mau pun media lain yang berisi sosialisasi mengenai raskin. Kedelapan belas responden menyatakan tidak pernah mengikuti musyawarah desa untuk menentukan RTM penerima manfaat raskin, tidak mengetahui berapa kg hak RTM, dan tidak mengetahui harga tebus seharusnya. Kedelapan belas responden mengaku tidak tahu kualitas seharusnya dari raskin, dan tidak mengetahui berapa kali dalam tahun 2008 RTM seharusnya menerima raskin. Kedelapan belas responden menyatakan tidak tahu bagaimana mengadakan bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan raskin. Responden menyatakan baru mengetahui raskin ketika ada pembagian raskin.

Dalam hal pelaksanaan raskin, kedelapan belas responden RTM Cisauk mengaku menerima kupon raskin yang dibagikan secara merata pada tahun 2008. Semua warga bahkan termasuk pedagang dapat membeli raskin. Untuk harga tebus, kedelapan belas responden menyatakan Rp2.000,00 per liter atau Rp2.500,00 per kg nya. Jumlah raskin yang diterima bervariasi antara satu hingga lima liter. Apabila pada saat pembagian raskin warga memiliki uang, maka mereka dapat menebus hingga lima liter, namun beberapa warga mengaku hanya mampu menebus satu sampai dua liter. Semua responden mengaku hanya menerima satu kali pembagian raskin untuk tahun 2008. Mengenai kondisi dan kualitas raskin, kedelapan belas responden menyatakan jelek. Mereka menggambarkan kondisi raskin berbau, kuning, dan banyak pecah seperti menir. Raskin cocok untuk dimasak menjadi ketupat atau lontong. Responden berharap kartu raskin tidak dibagi rata mengingat tidak semua warga merupakan RTM. Responden Cisauk berharap raskin tetap dilaksanakan namun dilaksanakan dengan lebih baik.

b. Pagedangan

Dalam hal sosialisasi program raskin, ketiga puluh lima responden RTM Pagedangan yang tersebar di tujuh desa menyatakan tidak pernah mengikutinya baik di Desa, RW, RT, pengajian, mau pun arisan. Mereka menyatakan tidak pernah melihat brosur, pamflet, spanduk, mau pun media lain yang berisi sosialisasi mengenai raskin. Ketiga puluh lima responden menyatakan tidak pernah mengikuti musyawarah desa untuk menentukan RTM penerima manfaat raskin, tidak mengetahui berapa kg hak RTM, dan tidak mengetahui harga tebus seharusnya. Ketiga puluh limanya mengaku tidak tahu kualitas seharusnya dari raskin, dan tidak mengetahui berapa kali dalam tahun 2008 RTM seharusnya menerima raskin. Ketiga puluh limanya menyatakan tidak tahu bagaimana mengadakan bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan raskin. Sebagaimana responden di Cisauk, responden di Pagedangan juga menyatakan baru mengetahui raskin ketika program tersebut dilaksanakan.

Dalam hal pelaksanaan program raskin, ketiga puluh lima responden RTM Pagedangan mengaku menerima raskin pada tahun 2008. Untuk harga tebus, ketiga puluh limanya menyatakan Rp2.000,00 per liter atau Rp2.500,00 per kgnya. Jumlah

raskin yang diterima bervariasi antara satu liter hingga lima liter. Apabila pada saat pembagian raskin warga memiliki uang, maka mereka dapat menebus hingga lima liter bahkan dua puluh liter, namun beberapa warga mengaku hanya mampu menebus satu sampai dua liter. Ketigapuluh limanya mengaku hanya menerima satu kali pembagian raskin untuk tahun 2008. Mengenai kondisi dan kualitas raskin, ketiga puluh limanya menyatakan jelek. Mereka juga menggambarkan kondisi raskin bau, berwarna kuning, dan pecah seperti menir. Raskin cocok untuk dimasak menjadi ketupat atau lontong. Warga tetap berebut walau pun kualitas raskin jelek. Responden berharap raskin tetap dilaksanakan karena mereka merasakan manfaatnya.

c. Pondok Aren

Dalam hal sosialisasi program raskin, tiga puluh tiga responden RTM Pondok Aren yang tersebar di tujuh kelurahan, semuanya menyatakan tidak pernah mengikuti baik di Desa, RW, RT, pengajian, mau pun arisan. Mereka menyatakan tidak pernah melihat brosur, pamflet, spanduk, mau pun media lain yang berisi sosialisasi mengenai raskin. Ketiga puluh tiga responden menyatakan tidak pernah mengikuti musyawarah desa untuk menentukan RTM penerima manfaat raskin, tidak mengetahui berapa kg hak RTM, dan tidak mengetahui harga tebus seharusnya dari raskin. Ketiga puluh tiga responden mengaku tidak tahu kualitas seharusnya dari raskin, dan tidak mengetahui berapa kali dalam tahun 2008 RTM seharusnya menerima. Ketiga puluh tiga responden menyatakan tidak tahu bagaimana mengadakan bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan raskin.

Dalam hal pelaksanaan program raskin, ketiga puluh tiga responden RTM Pondok Aren mengaku menerima raskin pada tahun 2008. Untuk harga tebus, ketiga puluh tiga responden menyatakan Rp1.600,00 per liter atau Rp2.000,00 per kg nya. Jumlah raskin yang diterima sebanyak sepuluh liter, dan tidak ada keluhan dari RTM untuk membayarnya. Mengenai kondisi dan kualitas raskin, ketiga puluh tiga responden menyatakan menyatakan jelek. Mereka menggambarkan kondisi raskin bau dan pera. Harapan responden Pondok Aren antara lain:

- Agar kualitas dan kondisi baik dengan harga tetap murah bahkan gratis.
- Program raskin sangat membantu, oleh karena itu agar diteruskan.

- Agar dilaksanakan setiap bulan
- Raskin agar jangan dibisniskan oknum, karena ini hak orang miskin
- Pemerintah agar memantau pelaksanaan raskin, dan memberi sanksi keras kepada oknum yang melanggar
- Agar didistribusikan merata kepada keluarga miskin yang berhak

d. Serpong

Dari tiga belas responden RTM Serpong, semua menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi raskin baik di Desa, RW, RT, pengajian, mau pun arisan. Mereka juga menyatakan tidak pernah melihat brosur, pamflet, spanduk, mau pun media lain yang berisi sosialisasi mengenai raskin. Ketiga belas responden menyatakan tidak pernah mengikuti musyawarah desa untuk menentukan RTM penerima manfaat raskin, tidak mengetahui berapa kg hak RTM, dan tidak mengetahui harga tebus seharusnya dari raskin. Ketiga belas responden mengaku tidak tahu kualitas seharusnya dari raskin, dan tidak mengetahui berapa kali dalam tahun 2008 RTM seharusnya menerima raskin. Ketiga belas responden juga menyatakan tidak tahu bagaimana mengadakan bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan raskin.

Dalam hal pelaksanaan program raskin, dua belas responden RTM Serpong mengaku menerima raskin pada tahun 2008. Satu responden yang mengaku tidak menerima raskin menyatakan mengetahui pelaksanaan raskin di sekitar rumahnya. Untuk harga tebus, kesemua responden baik yang menerima mau pun yang tidak menerima menyatakan Rp2.000,00 per liter atau Rp2.500,00 per kg nya. Jumlah raskin yang dibagikan sebanyak lima liter, dan tidak ada keluhan dari RTM penerima raskin untuk membayarnya. Mengenai kondisi dan kualitas raskin, sebelas responden menyatakan jelek dan dua orang menyatakan sedang. Responden menggambarkan kondisi raskin bau, pera, dan berkutu. Raskin dengan kualitas layak makan menjadi harapan umum RTM kecamatan Serpong.

Hasil Kuisisioner Responden Tokoh Masyarakat Kecamatan

Tabel 5.8

**Pemahaman Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Program Raskin
(dampak sosialisasi)**

No	Lokasi	Ikut Sosialisasi		Ada Brosur		Ikut Musdes		Tahu HakRTM	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1
2	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1
3	Pondok Aren	0	1	0	1	0	1	0	1
4	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1
5	Lintas Kec.	0	4	0	4	0	4	1	3
	Jumlah	0	8	0	8	0	8	1	7

Sumber: Survey Lapangan

Tabel 5.8 (sambungan)

**Pemahaman Responden Tokoh Masyarakat Terhadap Program Raskin
(dampak sosialisasi)**

No	Lokasi	Tahu Harga		Tahu Kualitas		Tahu Berapa Kali		Tahu Cara Mengadu	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1
2	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1
3	Pondok Aren	0	1	0	1	0	1	0	1
4	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1
5	Lintas Kec	1	3	1	3	1	3	1	3
	Jumlah	1	7	1	7	1	7	1	7

Sumber: Survey Lapangan

Dari empat responden tokoh masyarakat setempat kesemuanya menyatakan tidak pernah mengikuti sosialisasi program raskin. Keempat responden menyatakan tidak pernah melihat adanya brosur, pamflet, spanduk atau pun media lain yang berisi sosialisasi program raskin. Keempat responden mengaku tidak pernah mengikuti musyawarah desa dengan agenda memusyawarahkan nama-nama RTM penerima manfaat raskin. Mereka mengaku tidak mengetahui hak RTM baik dari

sisi banyaknya raskin per bulan, alokasi raskin setahunnya, harga dan kualitas raskin yang didistribusikan. Mereka tidak mengetahui bagaimana mengadu apabila melihat adanya penyimpangan raskin.

Dari empat responden tokoh masyarakat lintas kecamatan, kesemuanya menyatakan tidak pernah melihat adanya brosur, pamflet, spanduk atau pun media lain yang berisi sosialisasi program raskin. Mereka mengaku tidak pernah mengikuti musyawarah desa dengan agenda memusyawarahkan nama-nama RTM penerima manfaat raskin. Tiga responden mengaku tidak mengetahui hak RTM baik dari sisi jumlah raskin per bulan, alokasi raskin setahunnya, harga dan kualitas raskin yang didistribusikan. Mereka juga tidak mengetahui bagaimana mengadu apabila melihat ada penyimpangan raskin. Satu responden mengaku mengetahui hak RTM baik dari sisi banyaknya raskin per bulan, alokasi raskin setahunnya, harga dan kualitas dari Pedoman Umum Raskin yang dikeluarkan Kemenko Kesra serta komunikasi yang intensif dengan sesama aktifis LSM.

Tabel 5.9
Respons Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Raskin

Kecamatan	A		B			C			D			E			F		
	Ya	Tdk	a	b	C	a	b	C	a	b	c	a	b	c	a	b	c
Cisauk	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Pagedangan	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Pondok Aren	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Serpong	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Lintas Kecamatan	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4
Jumlah	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8

Sumber: Survey Lapangan

Keterangan

A = Apakah Menerima Raskin?

B = Berapa Harga Tebus dlm Ratusan?

C = Berapa Kg Raskin Yg Dibagi?

D = Berapa Kali dlm 2008?

E = Tahu Kondisi Raskin?

F = Tahu Kualitas Raskin?

a. 16-19,2

a. 12-15 kg

a. 8-10

a. Bagus

a. Bagus

b. 19,2 - 22,4

b. 9-12 kg

b. 6-7

b. Sedang

b. Sedang

c. >22,4

c. <9 kg

c. <6

c. Jelek

c. Jelek

Dari sisi pelaksanaan program raskin keempat responden tokoh setempat menyatakan tidak menerima raskin. Tiga responden menyatakan harga tebus Rp2.000/liter untuk lima liter dan dibagikan kurang dari enam kali dalam tahun 2008. Responden menegaskan raskin hanya dibagikan antara satu hingga dua kali saja. Kualitas dan kondisi raskin jelek, sehingga ada juga warga yang tidak bersemangat membeli raskin. Di sisi lain ada juga warga miskin yang tidak mampu membeli raskin sebanyak lima liter pada saat pembagian, sehingga raskin yang tersisa dibeli pedagang. Responden menyatakan bahwa raskin dibagi rata, tanpa membedakan warga karena petugas menganggap semua warganya berhak. Ketua RT berkepentingan raskin segera habis, sehingga dapat membayarkan uang raskin ke Tim Pelaksana Raskin Desa. Beberapa harapan tokoh masyarakat ini adalah:

- Agar hanya RTM yang memperoleh raskin
- Agar kondisi dan kualitas raskin baik. Yang sering terjadi kondisi dan kualitasnya buruk seperti bau apek, berkutu, kuning, dan seperti menir.
- Kemiskinan itu bertingkat. Ada kelompok RTM yang tidak mampu membeli raskin walau pun sudah disubsidi. Oleh karena itu agar untuk kelompok ini raskin diberikan secara gratis. Hal ini juga untuk mencegah raskin dibisniskan dengan alasan masih banyak raskin yang belum ditebus RTM.
- Agar sosialisasi termasuk pendataan RTM dilakukan dengan baik, sehingga masyarakat khususnya RTM mengetahui haknya.

Keempat tokoh masyarakat lintas kecamatan menyatakan tidak menerima raskin tahun 2008. Tiga orang responden menyatakan harga tebus raskin Rp2.000,00 per liter, lima liter dan dibagikan satu atau dua kali. Satu responden menyatakan harga berkisar antara Rp1600,00/liter sampai Rp2.000,00/liter, lima hingga sepuluh liter dan dibagikan antara satu hingga lima kali dalam tahun 2008. Untuk kualitas, keempat responden menyatakan jelek.

5.1.3. Hasil *Indepth Interview*

Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan raskin 2008, penulis melakukan wawancara mendalam dengan tiga pejabat yang penulis anggap kompeten yaitu Norpansyah, Kepala Bulog Sub Divisi Regional Serang (dahulu Banten), Bambang Sugeng, Kepala Bulog Sub Divisi Regional Tangerang, dan Nana Mulyana, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat (BKP3M).

Ketepatan Sasaran

Mengenai ketepatan sasaran distribusi ke RTM, data BPS tentang RTM dituding diperoleh tanpa melibatkan pamong desa. Hal ini yang sering menimbulkan masalah mulai dari tidak tepatnya RTM sasaran mau pun kurangnya jumlah alokasi RTM dibandingkan jumlah yang secara nyata dibutuhkan di desa. Dari data BPS tersebut, Pemerintah Desa / Kelurahan dapat merevisi dan atau menambah jumlah RTM melalui musyawarah desa yang secara regular dilaksanakan. Contoh keputusan musyawarah desa ini adalah mengurangi alokasi raskin dari 15 kg menjadi jumlah yang kurang dari itu apabila jumlah RTM yang disasar menurut musyawarah desa lebih banyak dari jumlah alokasi BPS. Musyawarah desa dapat pula memutuskan biaya distribusi dari kantor desa / kelurahan sebagai Titik Distribusi ke rumah ketua RT, yang dibebankan kepada RTM sasaran. Namun selama ini agenda seperti ini tidak pernah dibahas dalam musyawarah desa. Masyarakat sudah terbiasa melaksanakan raskin dari tahun ke tahun dengan semangat bagi rata.

Data BPS tentang RTM yang diterima Bappeda tidak diteruskan ke Kecamatan, Desa / Kelurahan. Data yang digunakan desa adalah data yang hampir sama dari tahun ke tahun yang berbeda dengan data BPS mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Bagi rata merupakan sistem distribusi raskin yang selama ini berlaku.

Untuk meningkatkan efektifitas raskin, perlu ada pengumuman daftar RTM di papan pengumuman desa. Ini diyakini akan berdampak positif baik dalam meningkatkan transparansi serta kontrol masyarakat, mau pun mengurangi jumlah RTM sasaran akibat rasa malu yang ditimbulkannya. Langkah ini telah

dilaksanakan Bupati Indramayu yang memperoleh Raskin Award tahun 2008 yang melakukan langkah taktis ini. Pemerintah Daerah Indramayu memberi identitas RTS pada pintu rumah RTM sasaran. Dengan adanya kebijakan memberikan label RTM, jumlah RTM Kabupaten Indramayu menurun dari tahun ke tahun. Kebijakan seperti ini sangat relevan untuk Kabupaten Tangerang, mengingat jumlah RTM Kabupaten Tangerang terbanyak se Provinsi Banten.

Ketepatan Kuantitas dan Kualitas

Dalam hal kualitas dan kuantitas raskin, cek fisik raskin dimungkinkan di Titik Distribusi. Bulog siap mengganti beras yang rusak mau pun menambah bila berat raskin tidak sesuai SPA. Permasalahannya adalah keengganan pelaksana raskin di Titik Distribusi untuk melakukan cek fisik pada saat beras datang. Salah satu faktornya adalah karena waktu kedatangan truk pengangkut raskin sudah malam. Bulog berkeberatan menerima klaim penyelenggara raskin di desa setelah raskin menginap beberapa hari di desa, karena banyak kemungkinan munculnya penyimpangan pada rentang waktu tersebut.

Di sisi lain Bulog mengakui kualitas dan kondisi raskin yang rusak berasal dari Gudang Cikande Serang. Bulog mengakui adanya sistem pengadaan raskin yang kurang baik di gudang tersebut. Kualitas raskin diperbaiki di tahun 2009 dengan mengambil persediaan Gudang Bulog Tangerang yang diyakininya memiliki proses pengadaan yang lebih baik. Kualitas yang buruk di sisi lain diakuinya karena serapan raskin yang rendah. Bulog menggunakan system persediaan *First in First Out (FIFO)*, di mana beras yang lebih dahulu masuk gudang lebih dahulu keluar gudang. Ketika serapan raskin rendah, waktu beras di dalam gudang menjadi lebih lama, yang kualitasnya menurun ketika beras tersebut dikeluarkan dari gudang. Kuantitas raskin yang kurang karena banyak raskin dijual ke pedagang, sehingga alokasi ke RTM menjadi berkurang. Kondisi ini cukup merata di lima wilayah Kabupaten Tangerang.

Ketepatan Harga

Harga raskin di atas Rp1.600,00/kg. Kelebihan harga ini dipergunakan untuk menutup biaya distribusi dari desa ke rumah ketua RT. Hal ini karena tidak ada alokasi APBD untuk menutup kebutuhan biaya distribusi tersebut. Pemerintah

Kabupaten tidak berani mengalokasikan biaya distribusi raskin tersebut karena menurut penjelasan Kejati Banten hal tersebut tidak diperkenankan. Di lapangan harga raskin berkisar antara Rp1.600/liter atau sekitar Rp2.000,00/kg hingga Rp2.000,00/liter atau sekitar Rp2.500,00/kg.

Pemerintah Kota Cilegon yang berada dalam provinsi yang sama dengan Kabupaten Tangerang mengalokasikan Rp100,00/kg sebagai biaya distribusi dari kantor kelurahan ke rumah ketua RT. Di samping itu Pemerintah Kota juga menyediakan alat penimbang beras di setiap kantor kelurahan. Pemerintah Kabupaten Lebak Banten mengalokasikan Rp45,00/kg raskin sebagai biaya distribusi. Dengan dukungan Pemerintah Daerah, RTM dapat membeli raskin dengan harga Rp1.600,00/kg.

Dari kedua contoh Pemda Kabupaten/Kota di Banten ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pemda dapat mengalokasikan dana untuk mendukung program raskin. Sepanjang tidak *double* anggaran, tidak akan menjadi masalah.

Ketertiban Administrasi

Tugas Pokok Bulog dalam program raskin adalah menjadi penyedia barang (raskin) sesuai kebutuhan alokasi dan mengantar raskin ke Titik Distribusi sesuai Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) di 1504 Titik Distribusi se Banten. Selama ini Bulog tidak bermasalah dalam membuat BAST, MBA-0 dan MBA-1 yang merupakan laporan pelaksanaan raskin se Kabupaten/Kota.

Sehubungan Bulog tidak pernah dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi raskin tahun 2008 oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bulog lebih berkonsentrasi pada monitoring evaluasi terhadap administrasi termasuk keuangan. Tunggakan besar yang terjadi menyebabkan raskin periode berikutnya tidak dapat disalurkan. Permasalahan tunggakan ini salah satunya diakibatkan karena bertambahnya alur keuangan di kecamatan. Semestinya aparat desa dapat mentransfer uang raskin langsung ke rekening Bulog, dan cukup menyampaikan foto copy bukti transfer ke kecamatan untuk rekapitulasi. Banyak kasus uang raskin dipergunakan aparat desa mau pun aparat kecamatan untuk keperluan di luar peruntukan pelunasan tunggakan raskin seperti membayar PBB dan kebutuhan

peringatan hari kemerdekaan. Insentif bagi kecamatan yang tingkat pelunasan PBBnya tinggi merupakan satu faktor yang mendorong oknum pejabat kecamatan menggunakan terlebih dahulu uang raskin yang terkumpul untuk membayar PBB. Faktor lain yang membuat uang raskin dipergunakan tidak sesuai ketentuan adalah tidak adanya sanksi/penghargaan bagi kecamatan/desa/kelurahan yang dikaitkan dengan prestasi dalam program raskin.

Secara Nasional, penyelenggara raskin memberikan penghargaan bagi daerah yang dinilai sukses melaksanakan program raskin berupa Raskin Award. Tahun 2008, Kabupaten Pariaman dan Kabupaten Indramayu terpilih menjadi dua daerah yang memperoleh Raskin Award. Daerah lain yang dinilai baik adalah Kabupaten Magelang, yang memasukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan raskin sebagai unsur penilaian kinerja camat disamping keberhasilannya dalam PBB.

Secara regional, Bulog Sub Divre Banten juga memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai sukses melaksanakan program raskin berupa pemberian biaya operasional per tiga bulan kepada pengelola Titik Distribusi terbaik, dan pesawat TV kepada kecamatan sebagai Pembina Titik Distribusi tersebut. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan dua daerah yang dinilai terbaik se Banten dalam pelaksanaan program raskin se Banten. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bahkan memasukkan aturan kepegawaian dalam Perda Kedisiplinan Pegawai dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin.

Beberapa Ide Perbaikan

Beberapa ide perbaikan yang tergal dari *indepth interviews* ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya dana pendamping dari APBD setidaknya sebesar Rp100,00 / kg sebagai biaya operasi penyaluran raskin dari Titik Distribusi ke RTM.
2. Adanya alokasi APBD untuk proses sosialisasi termasuk dukungan dana untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang membahas penyusunan daftar RTM penerima manfaat raskin.
3. Pelaksanaan raskin desa dilaksanakan oleh ibu-ibu Posyandu, bukan oleh aparat desa. Hal ini berangkat dari asumsi risiko penyimpangan yang dilakukan ibu-ibu Posyandu lebih rendah dibandingkan risiko

penyimpangan bila raskin dilaksanakan aparat desa yang kebanyakan kaum pria. Tidak ada istilah ‘uang perempuan’ di kalangan para ibu, namun ‘uang laki-laki’ merupakan istilah yang umum di kalangan pria.

4. SPA diterbitkan satu kali untuk seluruh Titik Distribusi se Kabupaten Tangerang. Pengiriman dilaksanakan setelah Titik Distribusi melunasi, dan dimungkinkan Titik Distribusi untuk mentransfer atau membayar langsung ke rekening Bulog.
5. Mengambil langkah hukum terhadap tagihan yang tidak kunjung dilunasi.
6. Agar kinerja raskin menjadi salah satu indikator kinerja Camat dan Lurah.

5.2. Evaluasi Kinerja Program Raskin

Dari jawaban kuisisioner, dokumen laporan pelaksanaan program raskin, serta wawancara mendalam dengan pejabat penanggung jawab pelaksanaan raskin di Kabupaten Tangerang, dengan mendasarkan pada Indikator Enam T dalam Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2008, pada bagian ini penulis akan mengevaluasi kinerja program raskin di Kabupaten Tangerang tahun 2008 khusus pada empat kecamatan yang menjadi objek penelitian.

1. Tepat Sasaran

Sesuai Pedum Raskin, tepat sasaran artinya raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (kartu Raskin atau bentuk lain). Indikator ini diukur dengan membandingkan data realisasi jumlah RTM dengan jumlah sasaran RTM.

Temuan penelitian, raskin dibagikan secara merata khususnya kepada warga yang tinggal di dekat rumah ketua RT. Di sisi lain ada beberapa RTM yang tidak menerima raskin, bahkan tidak mengetahui adanya pembagian raskin di sekitar rumahnya. Sembilan puluh sembilan responden menyatakan tidak pernah mengikuti Musyawarah Desa yang dimaksudkan untuk menyepakati daftar penerima manfaat raskin. Ketua RT membagikan kupon raskin ke warganya tidak berdasar DPM-1, dan tidak pula membuat laporan kepada siapa saja kupon raskin dibagikan. Ketua RT hanya melaporkan berapa raskin yang diambil dari desa dan

membayar sejumlah uang. Ini membuat indikator ketepatan sasaran ini tidak dapat diukur. Dari temuan lapangan dan pengakuan pejabat pelaksana raskin di Kabupaten Tangerang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program raskin di Kabupaten Tangerang khususnya di empat kecamatan yang diteliti belum tepat sasaran.

Tabel 5 – 10
Evaluasi Pelaksanaan Raskin Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren, dan Serpong Berdasar 6 T

Kecamatan	Keterangan	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6
Cisauk	Kriteria	RTM	10 & 15 kg	Rp1600/kg	10 kali	DPM-1, Kartu, BAST	Baik Menengah
	Kondisi Evaluasi	Bagi Rata TT	4 kg TT	Rp2500/kg TT	2 kali TT	Kartu, BAST TT	Jelek TT
Pagedangan	Kriteria	RTM	10 & 15 kg	Rp1600/kg	10 kali	DPM-1, Kartu, BAST	Baik Menengah
	Kondisi Evaluasi	Bagi Rata TT	4 kg TT	Rp2500/kg TT	2 kali TT	Kartu, BAST TT	Jelek TT
Pondok Aren	Kriteria	RTM	10 & 15 kg	Rp1600/kg	10 kali	DPM-1, Kartu, BAST	Baik Menengah
	Kondisi Evaluasi	Bagi Rata TT	8 kg TT	Rp2000/kg TT	3 kali TT	Kartu, BAST TT	Jelek TT
Serpong	Kriteria	RTM	10 & 15 kg	Rp1600/kg	10 kali	DPM-1, Kartu, BAST	Baik Menengah
	Kondisi Evaluasi	Bagi Rata TT	4 kg TT	Rp2500/kg TT	1 kali TT	Kartu, BAST TT	Jelek TT

Sumber: Survey Lapangan

Keterangan:

T-1 = Tepat Sasaran

T-2 = Tepat Jumlah

T-3 = Tepat Harga

T-4 = Tepat Waktu

T-5 = Tepat Administrasi

T-6 = Tepat Kualitas

DPM-1 = Daftar Penerima Manfaat Raskin Berdasar Musdes

BAST = Berita Acara Serah Terima

Kartu = Kartu Raskin / Sejenisnya

T = Tercapai

TT = Tidak Tercapai

Sebab yang paling mungkin yang membuat indikator tepat sasaran ini tidak tercapai adalah tidak terdistribusinya Data RTM BPS ke Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan tidak diselenggarakannya Musyawarah Desa yang membahas pendistribusian raskin ke RTM. Lebih jauh penyebab tidak tercapainya indikator tepat sasaran bahkan pembagian yang menyalahi Pedoman Umum Raskin adalah ketidaktahuan pemangku kepentingan raskin. Ketidaktahuan ini disebabkan tidak adanya sosialisasi. Ketidaktahuan membuat pelaksanaan yang menyimpang dianggap sebagai suatu yang wajar. Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi sepanjang tahun 2008 membuat penyimpangan ini tidak teridentifikasi sehingga tidak ada langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang hampir tidak melaksanakan semua perannya sebagaimana diatur dalam Pedum Raskin.

2. Tepat Jumlah

Sesuai Pedum Raskin, tepat jumlah artinya jumlah beras raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 kg / RTM / bulan pada bulan Januari, dan 15 kg / RTM / bulan selama sembilan bulan berikutnya. Indikator ini diukur dengan membagi kuantum realisasi/kuantum RTM = Kg / RTM. Makin tinggi indikator ini maka pelaksanaan raskin dinilai makin tepat jumlah.

Temuan penelitian, sembilan puluh sembilan atau semua responden RTM menyatakan raskin dibagi kurang dari 9 kg, mengindikasikan penyimpangan lebih dari 40% dari jumlah yang seharusnya. Dalam wawancara lebih lanjut enam puluh enam *responden* menyatakan jumlah raskin yang dibagikan sebanyak lima liter setiap bulan, atau terjadi penyimpangan 73,33%. Ketidakmampuan RTM membayar raskin seperti di Cisauk dan Pagedangan membuka celah munculnya penyimpangan dalam bentuk petugas pelaksana menjualnya kepada warga yang mampu atau bahkan pedagang. Celah inilah yang kemudian membesar didesak berbagai kebutuhan para pelaksana raskin.

Pengukuran tepat jumlah dengan membandingkan kuantum realisasi dengan kuantum RTM (Kg/RTM) potensial bias ketika pedagang turut membeli raskin. Kuantum raskin mencerminkan total beras yang dijual, yang tentunya mengarah

pada angka maksimal karena raskin selalu habis terjual. Sedangkan kuantum RTM mencerminkan RTM dalam data ketua RT yang tentunya realisasinya baik, karena sebagian besar kupon ditebus. Ketika semua raskin terjual, dan semua RTM membeli, indikator tepat jumlah dianggap baik. Namun, indikator ini gagal menangkap indikasi terjadinya penyimpangan dijualnya sebagian raskin ke pedagang atau non RTM di satu sisi, dan RTM hanya mendapat 5 liter dari jumlah seharusnya 15 kg di sisi yang lain.

Dari temuan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa indikator tepat jumlah tidak terpenuhi di empat kecamatan yang diteliti.

Sebab yang paling mungkin yang menyebabkan indikator tepat jumlah ini tidak terpenuhi adalah tidak adanya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan raskin. Dalam ketidaktahuan, pemangku kepentingan merasa aturan tentang raskin adalah apa yang mereka lihat di lapangan. Bahkan pelaksana raskin tingkat RT dan juga kader PKK tidak mengetahui berapa jumlah beras yang seharusnya dapat ditebus RTM. Tidak dilaksanakannya monitoring dan evaluasi yang semestinya bertujuan mengoreksi kesalahan dalam tahun program menjadi penyebab berikutnya. Persepsi yang keliru tentang jumlah raskin yang didistribusikan memicu niat buruk sebagian kalangan untuk memanfaatkan dalam bentuk jual beli raskin kepada mereka yang tidak berhak. Proses hukum terhadap penyimpangan raskin 2007 tampaknya tidak berdampak pada pelaksanaan raskin tahun 2008.

3. Tepat Harga

Sesuai Pedum Raskin, tepat harga artinya harga tebus raskin adalah sebesar Rp1.600 / kg netto di titik distribusi. Indikator ini diukur melalui evaluasi secara *sampling* di lapangan oleh Tim Raskin atau pihak ketiga.

Temuan di lapangan tidak ada raskin yang dijual dengan harga Rp1.600,00/kg. Harga paling murah adalah Rp1.600,00/liter atau dengan kata lain Rp2.000/kg hingga Rp2.000,00/liter atau dengan kata lain Rp2.500,00/kg. Indikator tepat harga ini menurut pendapat penulis tidak dapat diketahui Bulog mau pun Pemerintah Kabupaten Tangerang karena evaluasi secara *sampling* di lapangan oleh Tim Raskin atau pihak ketiga yang ditunjuk tidak pernah dilakukan. Bahkan

Tim Raskin Kabupaten tidak bekerja sepanjang tahun 2008. Bulog, pada tahun 2008 hanya berkonsentrasi pada BAST sebagai dasar penyusunan laporan realisasi raskin kabupaten dalam format MBA-0 dan MBA-1, dan melakukan penagihan terhadap tunggakan raskin dari penyelenggara raskin desa/kelurahan. Tidak ada pihak ketiga yang ditugasi baik oleh Bulog mau pun oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melakukan penelitian terhadap tepat harganya pelaksanaan raskin sepanjang tahun 2008.

Dari temuan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa indikator tepat harga tidak terpenuhi di empat kecamatan yang diteliti.

Sebab yang paling mungkin yang menyebabkan tidak tercapainya indikator tepat harga adalah tidak adanya bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program raskin ini. Bulog menagih pelaksana raskin di Titik Distribusi dengan harga sesuai Pedum Raskin, namun biaya dari Titik Distribusi ke RTM penerima raskin ditanggung oleh RTM penerima raskin. Semestinya sebagaimana diatur dalam Pedum Raskin, biaya distribusi dari Titik Distribusi ke RTM adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

4. Tepat Waktu

Tepat waktu artinya waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat raskin sesuai rencana distribusi. Indikator ini diukur dengan persentasi realisasi pada setiap akhir bulan. Semakin besar persentase semakin tepat waktu.

Laporan realisasi raskin Bulog Divisi Regional Tangerang menunjukkan angka 41,95%. Bahkan untuk empat kecamatan yang diteliti, realisasinya hanya 19,31%. Cisauk dan Pagedangan melaksanakan distribusi raskin dua kali, Pondok Aren tiga kali, dan Serpong bahkan hanya satu kali. Sedikitnya frekwensi distribusi raskin ini terkonfirmasi oleh pernyataan semua responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan raskin hanya satu atau dua kali saja selama tahun 2008.

Dari temuan ini dapat disimpulkan ketepatan waktu pelaksanaan raskin di empat kecamatan tersebut sangat rendah.

Sebab yang paling mungkin yang menyebabkan indikator tepat waktu ini tidak tercapai adalah lemahnya dorongan Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada segenap organisasi yang bertanggung jawab dalam pendistribusian raskin Kabupaten Tangerang. Kebijakan yang lamban dari Bupati dalam mengeluarkan SK alokasi raskin per kecamatan tahun 2008 merupakan sebab pertama kelambanan ini. Tim Koordinasi Raskin yang dibentuk namun tidak bekerja adalah sebab berikutnya, disamping keengganan para Camat untuk menerbitkan SPA. Tanpa SPA, Bulog tidak mungkin mengirimkan raskin ke Titik Distribusi. Sebab berikutnya adalah dimanfaatkannya uang raskin oleh oknum Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan untuk kepentingan di luar pelaksanaan program raskin. Tunggakan raskin ini menyebabkan Bulog tidak dapat mengirimkan raskin untuk periode berikutnya.

5. Tepat Administrasi

Tepat administrasi artinya terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Indikator ini diukur dengan akurasi dokumen BAST ditingkat Desa; MBA-0 di tingkat Kecamatan dan MBA-1 di tingkat Kabupaten / Kota. Apabila dokumen dinyatakan sah sebagai dasar pembayaran subsidi tepat administrasi tercapai. Di tingkat Titik Distribusi, administrasi yang seharusnya dipersiapkan adalah DPM-1 dan Kartu Raskin. DPM-1 yaitu daftar RTM penerima manfaat raskin hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan Kepala Desa/Lurah dan disahkan Camat.

Dilihat dari dapat diterbitkannya MBA-1 yaitu laporan realisasi raskin se Kabupaten Tangerang oleh Bulog Divisi Regional Tangerang yang tentunya didasari oleh MBA-0 yaitu realisasi raskin se Kecamatan yang didasari oleh BAST. Administrasi yang dilakukan Bulog Sub Divisi Regional Tangerang dinyatakan Bambang Sugeng telah sah sebagai dasar pembayaran subsidi. Oleh karena itu disimpulkan bahwa pelaksanaan raskin oleh Bulog di Kabupaten Tangerang cukup tepat administrasi. Namun, dalam pelaksanaan di Titik Distribusi tidak ada DPM-1 walau pun kartu raskin dibagikan. Tidak adanya DPM-1 ini membuat distribusi

raskin tidak pada jalur yang benar. Dari temuan ini disimpulkan bahwa indikator tepat administrasi di Titik Distribusi tidak tercapai.

Sebab yang paling mungkin dari tidak tercapainya indikator tepat administrasi di tingkat Titik Distribusi adalah tidak terdistribusinya daftar penerima raskin dari BPS ke Pemerintah Desa. Data yang telah diserahkan BPS Banten ke Bupati/Walikota se provinsi Banten, yang kemudian menjadi tanggung jawab Bappeda ternyata tidak didistribusi ke Kecamatan/Desa/Kelurahan. Tidak adanya data BPS ini membuat musyawarah desa untuk membahas distribusi raskin tidak memiliki acuan. Satu fakta musyawarah desa untuk membahas distribusi raskin merupakan dampak sekaligus sebab tidak tercapainya tepat administrasi di tingkat Titik Distribusi.

6. Tepat Kualitas

Tepat kualitas artinya terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Indikator ini diukur dengan banyak sedikitnya penolakan / penggantian beras dari masyarakat.

Sembilan puluh tujuh responden menyatakan raskin jelek dalam berbagai komentar mulai dari bau, pera, seperti menir, warna kuning, hingga seperti pakan ayam. Rendahnya serapan raskin Kabupaten Tangerang dituding sebagai penyebab buruknya kualitas raskin ini, karena menyebabkan raskin lebih lama berada di gudang. Alasan lain yang dikemukakan adalah manajemen pengadaan beras di gudang Cikande Serang yang buruk.

Namun, apabila indikator kualitas raskin ini diukur dengan banyak sedikitnya penolakan/permintaan penggantian beras dari masyarakat, maka indikator ini tidak akan diketahui. Hal ini karena masyarakat tidak mengetahui seperti apa seharusnya kondisi dan kualitas raskin. Masyarakat juga tidak tahu bagaimana caranya melakukan keberatan terhadap kualitas raskin, kecuali hanya dengan tidak membelinya. Sedangkan keadaan RTM sangat membutuhkan raskin mengingat harganya sangat murah. Pada saat mereka memutuskan tidak membeli, banyak warga lain yang bersedia membeli, walau pun kualitas raskin rendah.

Pengetahuan masyarakat berdasarkan pada pelaksanaan raskin dari tahun ke tahun. Raskin selalu jelek kualitasnya, sehingga ketika mendapati kembali raskin yang jelek kualitasnya, mereka tidak merasa adanya penyimpangan.

Sebab yang paling mungkin yang menyebabkan tidak tercapainya indikator tepat kualitas adalah tidak fahamnya pemangku kepentingan tentang kondisi dan kualitas seharusnya dari raskin yang dibagikan. Ketidaktahuan ini menyebabkan tidak adanya penolakan atau pun permintaan penggantian beras baik dari pelaksana raskin mau pun RTM penerima raskin ketika menerima raskin yang rendah kualitasnya. Ketidaktahuan juga menyebabkan posisi tawar RTM lemah. Murahnyanya harga tebus raskin menimbulkan persepsi RTM untuk memaklumi kualitas raskin yang jelek. Sebab lain rendahnya kualitas raskin adalah kondisi beras di Gudang Cikande. Kondisi ini merupakan permasalahan internal Bulog, yang harus dibenahi secepatnya.

5.3. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Dari tabel 5.11 penulis membandingkan temuan dalam tesis ini dengan temuan penelitian raskin sebelumnya.

Peran Bulog

Penulis menemukan bahwa Bulog Sub Divisi Regional Banten/Tangerang telah melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik yaitu menyediakan dan mengantar raskin ke Titik Distribusi sesuai SPA. Namun penulis menemukan keluhan RTM bahwa raskin yang mereka terima kualitas dan kondisinya jelek. Temuan lain tesis ini adalah Bulog Banten/Tangerang tidak melakukan sosialisasi raskin di Kabupaten Tangerang, khususnya di empat kecamatan yang diteliti.

Temuan tesis ini memperkuat temuan penelitian Smeru yang menyatakan bahwa dari penyaluran raskin hingga titik distribusi, Bulog telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan sesuai dengan pedoman program. Namun, menurut Smeru penilaian keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara parsial karena raskin merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin. Permasalahan pelaksanaan raskin banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima.

Permasalahan di Rentang Titik Distribusi ke RTM

Tesis ini menemukan banyaknya permasalahan pada rentang Titik Distribusi ke RTM penerima manfaat. Temuan tesis ini memperkuat temuan Smeru dan 35 PTN/S dan Universitas Brawijaya dalam penelitian raskin yang dirangkum Bulog.

Tabel 5.11

Ikhtisar Temuan Tesis ini dan Temuan Peneliti Lain

Faktor	Tesis ini	Smeru	35 PTN/S dan Universitas Brawijaya	Lembaga Demografi UI
Peran Bulog	Relatif baik sesuai Pedum, kecuali sosialisasi yang kurang dan kualitas beras jelek	Relatif baik sesuai Pedum		
Permasalahan Distribusi Dari Titik Distirbusi ke RTM	Banyak Permasalahan	Banyak Permasalahan	Banyak permasalahan	
Jumlah beras yang diterima	Antara 4 sampai dengan 8 kg. Di bawah jumlah seharusnya 10 atau 15 kg karena penerima manfaat lebih banyak dibandingkan pagu dan ada beras yang dijual ke pedagang.		Di bawah jumlah seharusnya 20 kg, karena penerima manfaat lebih banyak.	3,5 s.d 20 kg
Rata-rata	Antara 4 s.d 8 kg atau 40% s.d 53,33%		59,74% (13,3 kg)	
Ketepatan sasaran	Tidak ada Musyawarah Desa (DPM-1), bagi rata		83,74%	86%
Ketepatan Waktu	Sekali sampai dua kali (10% sd 20%)		64%	50% s.d 100%
Ketepatan Harga	Rp2000 – 2500			Rp1000 – 1200
Saran Kontinuitas program	Lanjutkan		Lanjutkan	Lanjutkan
Perlunya Dana Pendamping (APBD)	Perlu		Perlu	Perlu
Perlunya Sosialisasi	Perlu		Perlu	Perlu
Monitoring Evaluasi	Perlu		Perlu	Perlu

Sumber: Berbagai penelitian (diolah)

Tesis ini menemukan jumlah raskin yang diterima RTM antara 4 kg sampai dengan 8 kg. Bahkan ada beberapa RTM yang hanya menerima satu atau dua liter karena tidak mampu menebus raskin. Temuan ini menjelaskan bahwa kemiskinan di antara RTM juga bertingkat, ada kelompok RTM yang mampu membeli sepuluh liter raskin, namun ada pula kelompok RTM yang hanya mampu membeli satu liter. Sedangkan Universitas Brawijaya dan 35 PTN/S menemukan rata-rata jumlah beras yang diterima RTM di bawah 20 kg karena penerima manfaat lebih banyak dibanding data RTM. Temuan tersebut merata-ratakan jumlah raskin yang diterima sebesar 59,74%. Lembaga Demografi UI juga menyampaikan temuannya untuk jumlah beras yang diterima RTM antara 3,5 kg sampai dengan 20 kg.

Dari sisi ketepatan sasaran, tesis ini tidak memberikan penilaian secara prosentase, namun memaparkan fenomena mekanisme pembagian yang berdasar bagi rata. Menurut pendapat penulis indikator tepat sasaran sulit diukur karena tidak adanya DPM-1 sebagai dasar perbandingan. DPM-1 sendiri tidak ada karena tidak ada musyawarah desa yang membahas dan menyepakatinya. Hal ini disebabkan tidak didistribusikannya data BPS tentang RTM penerima manfaat raskin kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan. Sedangkan dalam penelitiannya dalam ketepatan sasaran Universitas Brawijaya memberikan penilaian 83,74%, sedangkan Lembaga Demografi memberikan penilaian 86%.

Dari ketepatan waktu, tesis ini menemukan bahwa raskin hanya dibagikan satu atau dua kali sepanjang tahun 2008, atau antara 10% sampai dengan 20%. Sedangkan Universitas Brawijaya memberikan penilaian 64%, sedangkan Lembaga Demografi UI memberikan penilaian antara 50% - 100%.

Dari ketepatan harga tesis ini menemukan harga jual antara Rp2.000,00 per kg sampai dengan Rp2.500,00 per kg dari standar harga Rp1.600,0 per kg atau menyimpang 25% sampai dengan 56%. Sedangkan Lembaga Demografi UI menyatakan antara Rp1.000,00 sampai dengan Rp1.200,00 per kg. Penyimpangan maksimal 20%, karena pada saat penelitian Lembaga Demografi harga raskin Rp1.000,00 per kg.

Tesis ini memperkuat rekomendasi Universitas Brawijaya, Lembaga Demografi UI yang menyatakan perlunya dukungan Pemerintah Daerah untuk

mengalokasikan dana operasional pelaksanaan raskin dari Titik Distribusi ke RTM penerima raskin. Tesis ini juga memperkuat kesimpulan Universitas Brawijaya, Lembaga Demografi UI tentang perlunya monitoring dan evaluasi secara reguler dan dilanjutkannya program raskin ini.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

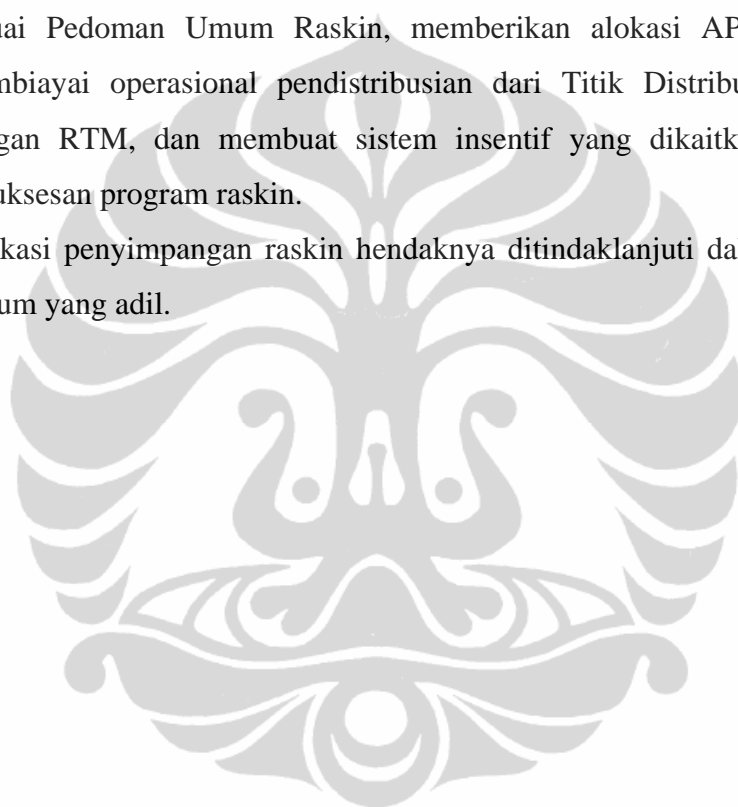
6.1. Kesimpulan

Dari paparan bab-bab di depan, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bulog Sub Divisi Regional Banten dan Tangerang sebagai pelaksana program raskin bertugas menyediakan barang (raskin) sesuai kebutuhan alokasi dan mengantar raskin ke Titik Distribusi sesuai Surat Permintaan Alokasi (SPA) dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Titik Distribusi se Tangerang. Berdasarkan tugas pokoknya ini, Bulog telah berhasil memenuhi sebagian dari indikator 6 T, yaitu tepat administrasi, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Namun Bulog belum berhasil memenuhi indikator tepat kualitas mengingat banyaknya keluhan masyarakat tentang kualitas dan kondisi raskin. Dalam penelitian ini sembilan puluh tujuh dari sembilan puluh sembilan responden menyatakan kualitas raskin jelek.
2. Realisasi raskin Kabupaten Tangerang masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya dukungan yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tim Koordinasi Pelaksanaan Raskin Daerah 2008 yang dibentuk tidak berfungsi. Sosialisasi, pemantauan, hingga evaluasi program raskin sepanjang tahun 2008 tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan raskin yang tidak memenuhi semua indikator 6 T.
3. Penyebab tidak terpenuhinya indikator tepat sasaran adalah karena tidak diselenggarakannya musyawarah desa untuk menyepakati RTM penerima manfaat raskin, yang disebabkan tidak terdistribusinya data RTM dari BPS, serta tidak adanya dorongan Pemkab untuk pelaksanaan forum ini. Faktor ini juga menyebabkan tidak terpenuhinya indikator tepat administrasi di Titik Distribusi. Indikator tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga disebabkan tidak adanya dukungan dana operasional dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dan *moral hazard* pelaksana raskin.

6.2. Saran

1. Bulog agar memperbaiki sistem manajemen persediaannya agar kualitas raskin yang didistribusikan sesuai dengan standar dalam Pedoman Raskin.
2. Supaya pelaksanaan raskin membaik, Pemerintah Kabupaten Tangerang hendaknya memastikan Tim Koordinasi Pelaksanaan Raskin berfungsi sesuai Pedoman Umum Raskin, memberikan alokasi APBD untuk membiayai operasional pendistribusian dari Titik Distribusi sampai dengan RTM, dan membuat sistem insentif yang dikaitkan dengan kesuksesan program raskin.
3. Indikasi penyimpangan raskin hendaknya ditindaklanjuti dalam proses hukum yang adil.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Banten, *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS*, 2008
- Bulog Tangerang, *Laporan Realisasi Raskin Kabupaten Tangerang*, 2008
- Cooper, D. R., dan Schindler, P.S. *Metode Riset Bisnis*, Penerbit Media Global Edukasi, Jakarta, 2006
- Daymon, C. and Hooloway, I, *Riset Kualitatif dalam Public Relation and Marketing Communication*. Penerbit Bentang, Jakarta, 2008
- Kemenkokesra, *Pedoman Umum Raskin 2008*, 2007
- Keputusan Kepala Bappenas nomor 178/K/07/2000, *Evaluasi Kinerja Kegiatan Pembangunan*, 2000
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), *SK nomor 168/SK/KPU/2008*, 2008
- Lembaga Penelitian Smeru, *Efektifitas Pelaksanaan Raskin, Public Disclosure Authorized*, 2007
- Mochtar, M., *Pengantar Metodologi Penelitian*, IIP Press, Jakarta, 2001
- Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, LAN, 2002
- Nasution, Rozaini, *Teknik Sampling*, USU Digital Library, 2003
- Pemerintah Kabupaten Tangerang, *Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025*, 2009
- Rakhmat, Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Sekaran, Uma, *Research Methods: A Skill Building Approach*, 4th Edition, John Willey & Son, Ltd., 2003
- TKPKRI, *Buku Saku Penanggulangan Kemiskinan 2008, Memahami Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & Perluasan Lapangan Kerja, Kemenkokesra Sekretariat TKPK*, Jakarta, 2008
- UU 51 tahun 2008, *Pembentukan Kota Tangerang Selatan*, 2008
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002

Bulog, *Studi Evaluasi Raskin*, www.bulog.co.id, 2007

Bulog, *Sekilas Raskin*, www.bulog.co.id/sekilasraskin.php, 2007

<http://patawari.wordpress.com/2009/05/14/kebijakan-pemekaran-daerah/>, 2009

Insani, Istyadi, *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam*
<http://www.stialan.ac.id/artikel%20istiyadi.pdf>

Nazwar, *Koalisi Aktor Dalam Implementasi Kebijakan*,
http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/brapub/Nazwar%20_03_.pdf, 2003.

www.id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_Publik

www.blog.unila.ac.id/artefaksi/2008/05/05/evaluasi-kebijakan/

www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=653

www.menkokesra.go.id/content/view/4476/1/

www.kebijakankesehatan.co.cc/2009/11/proses-pembuatan-kebijakan-sejak-desain.html, 2009

www.kapanlagi.com/h/0000235292.html

www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=5408

Lampiran 1 - Rencana Kuisisioner
Kuisisioner untuk RTM, Pelaksana Lapangan, dan LSM
Evaluasi Kinerja Program Beras untuk RTM di Kabupaten Tangerang 2008

No. Responden / Tgl :

Nama Responden :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan / Jabatan :

Penghasilan :

Pendidikan :

Jumlah Keluarga :

Alamat :

Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Tangerang tahun 2008. Hasil analisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan Raskin di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten.

Jawaban yang Anda berikan kami jamin kerahasiaannya. Jawaban atau keterangan yang dapat menjadi masukan bagi kami ditulis pada keterangan tambahan di bawah ini. Atas partisipasi Anda, saya mengucapkan terima kasih.

Masukan tentang Raskin:

Sosialisasi Program

1. Apakah Bapak / Ibu pernah mengikuti acara sosialisasi raskin di desa/rw/rt/arisan/pengajian/pada acara sejenis? A. Ya B. Tidak
2. Apakah Bapak / Ibu pernah menerima/melihat bahan sosialisasi raskin seperti brosur / pamflet / spanduk / media lainnya? A. Ya B. Tidak
3. Apakah Bapak / Ibu pernah mengikuti musyawarah desa untuk menentukan RTM penerima manfaat raskin? A. Ya B. Tidak
4. Apakah Bapak / Ibu mengetahui berapa kg hak RTM menerima raskin setiap bulannya? A. Tahu B. Tidak tahu
5. Apakah Bapak / Ibu mengetahui berapa harga tebus raskin setiap kg nya? A. Tahu B. Tidak Tahu
6. Apakah Bapak / Ibu tahu bagaimana kualitas raskin yang menjadi hak RTM penerima manfaat raskin? A. Tahu B. Tidak Tahu
7. Apakah Bapak / Ibu tahu berapa kali RTM menerima raskin selama tahun 2008? A. Tahu B. Tidak Tahu
8. Apakah Bapak / Ibu tahu bagaimana mengadakan bila terjadi penyimpangan raskin? A. Tahu B. Tidak Tahu

Pelaksanaan Program Raskin

1. Apakah Bapak / Ibu menerima raskin selama tahun 2008? A. Ya B. Tidak
2. Berapakah harga tebus raskin per kg nya yang dibagikan?
A. Rp1.600 s/d 1920 B. 1921 s/d 2240 C. > Rp2.240
3. Berapa raskin yang dibagikan kepada RTM setiap bulannya?
A. 12 - 15 B. 9 – 11,9 kg C. kurang dari 9 kg
4. Berapa kali dalam tahun 2008 raskin dibagikan?
A. 8 – 10 kali B. 6 - 7 kali C. kurang dari 6 kali.
5. Bagaimana kondisi raskin yang dibagikan?
A. Bagus B. Sedang C. Jelek
6. Bagaimana kualitas raskin yang dibagikan?
A. Bagus B. Sedang C. Jelek

Lampiran 2 - Rencana Kuisisioner

Indepth Interview dengan Pejabat Pemkab dan Bulog

Evaluasi Kinerja Program Beras untuk RTM di Kabupaten Tangerang 2008

No. Responden / Tgl :

Nama Responden :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan / Jabatan :

Pendidikan :

Jumlah Keluarga :

Alamat :

Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Tangerang tahun 2008. Hasil analisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan Raskin di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten.

Jawaban yang Bapak / Ibu berikan kami jamin kerahasiaannya. Atas partisipasi Bapak / Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Indepth Interview:

1. Bagaimana kesan umum Bapak / Ibu tentang program raskin 2008
2. Bagaimana kebijakan daerah dan pelaksanaannya dalam menunjang program raskin di Kabupaten Tangerang (khusus Pemkab)?
 - a. Dukungan anggaran
 - b. Dukungan organisasi (Tim Koordinasi Raskin & TKPKD)
 - c. Dukungan sumber daya manusia
 - d. Sosialisasi
 - e. Pelaksanaan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi
 - g. Kendala dan Dukungan
 - h. Penghargaan dan Sanksi
 - i. Program Raskin Daerah
3. Bagaimana kebijakan Bulog dalam melaksanakan program raskin di Kabupaten Tangerang (khusus Bulog)?
 - a. Dukungan anggaran
 - b. Dukungan sumber daya manusia
 - c. Sosialisasi
 - d. Pelaksanaan
 - e. Pemantauan dan Evaluasi (6 T)
 - f. Kendala dan Dukungan
 - g. Penghargaan dan Sanksi

Rencana Responden

1. Pejabat Bulog Divre Banten dan Bulog Sub DivreTangerang
2. Pejabat Badan Ketahanan Pangan Pemkab Tangerang
3. Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan V (Cisauk, Pagedangan, Pondok Aren dan Setu)
4. LSM Barak (pemantau Raskin) dan Ketua Forum BKM
5. RTM dan Tokoh Masyarakat di empat kecamatan

**Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
RTM**

No	Respon	Nama	Desa	Kecamatan	A		B			C			D			E			F		
					Ya	Tdk	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1	R-01	Sanwani	Suradita	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2	R-03	Sunaiti	Suradita	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
3	R-05	Rami	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4	R-06	Hasan	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
5	R-100	A Rohim	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
6	R-102	Nasir	Cisauk	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7	R-103	Rabudin	Suradita	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
8	R-104	Warsa	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9	R-105	Selamet	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
10	R-106	Gani	Suradita	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
11	R-107	Akmar	Suradita	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
12	R-108	Jajuli	Suradita	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
13	R-109	Suhendi	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
14	R-110	Miun	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
15	R-111	Marsani	Cibogo	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
16	R-17	Hani	Cisauk	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
17	R-18	Suandi	Cisauk	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
18	R-20	Janiyah	Cisauk	Cisauk	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
19	R-13	Taslih Wahyudin	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
20	R-14	Kuswandi	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
21	R-15	Rahmati	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
22	R-126	Saman	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
23	R-127	Arsid	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
24	R-128	Utar	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
25	R-129	Sanusi	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
26	R-130	Tahiri	Cihuni	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
27	R-80	Masdana	Kadusirung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
28	R-81	Atiyah	Kadusirung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
29	R-82	Asep	Kadusirung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
30	R-83	Nanang	Kadusirung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
31	R-07	Azizah	Lengkong Kulon	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
32	R-08	Maryudin	Lengkong Kulon	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
33	R-11	Diyong	Lengkong Kulon	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

**Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
RTM**

No	Respon	Nama	Desa	Kecamatan	A		B			C			D			E			F		
					Ya	Tdk	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
34	R-116	Madsita	Medang	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
35	R-117	Pardi	Medang	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
36	R-118	Uki	Medang	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
37	R-119	Midah	Medang	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
38	R-120	Munah	Medang	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
39	R-09	Seli	Pagedangan	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
40	R-10	Mad Surip	Pagedangan	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
41	R-12	Amir	Pagedangan	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
42	R-112	Nana	Pagedangan	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
43	R-113	Madsuki	Pagedangan	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
44	R-114	Marwan	Pagedangan	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
45	R-115	Yayat	Pagedangan	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
46	R-101	Hasbuna	Situgadung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
47	R-131	Iskandar	Situgadung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
48	R-132	Mad Yani	Situgadung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
49	R-133	Andi	Situgadung	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
50	R-134	Pendi	Cijantra	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
51	R-135	Rosyid	Cijantra	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
52	R-136	Rimin	Cijantra	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
53	R-137	Dayat	Cijantra	Pagedangan	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
54	R-59	Tipis	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
55	R-60	Asti	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
56	R-61	Tuning	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
57	R-62	Marsih	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
58	R-68	Khotimah	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
59	R-67	Sati	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
60	R-70	Ameh	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
61	R-69	Sijih	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
62	R-138	Sarmili HN	Jurbar	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
63	R-64	Maemunah	Pd Aren	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
64	R-63	Nuryani	Pd Aren	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
65	R-65	Sri Asih	Pd Aren	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
66	R-66	M Suroh	Pd Aren	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1

**Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
RTM**

No	Respon	Nama	Desa	Kecamatan	A		B			C			D			E			F					
					Ya	Tdk	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c			
67	R-139	Abdul Manan	Pd Aren	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
68	R-77	Mislah	Pd Betung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
69	R-76	Nur Azizah	Pd Betung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
70	R-78	Koriah	Pd Betung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
71	R-140	Madin	Pd Betung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
72	R-72	Sri Mulyati	Pd Karya	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
73	R-74	Sami	Pd Karya	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
74	R-75	Nur Hami	Pd Karya	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
75	R-73	Munali	Pd Karya	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
76	R-71	Hera	Pd Karya	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
77	R-54	Yanah	Pd Pucung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
78	R-55	Yani	Pd Pucung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
79	R-57	Inah	Pd Pucung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
80	R-58	Rijah	Pd Pucung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
81	R-56	Sarni	Pd Pucung	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
82	R-121	Aliyah	Prigi Baru	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
83	R-122	Nasan	Prigi Baru	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
84	R-123	Rani	Prigi Baru	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
85	R-124	Rion	Prigi Baru	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
86	R-125	Ani	Prigi Baru	Pd Aren	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
87	R-21	Mahfudin	Buaran	Serpong	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
88	R-26	Yamin	Buaran	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
89	R-29	Jumali	Buaran	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
90	R-37	Muan	Ciater	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
91	R-38	Sapii	Ciater	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
92	R-35	Sarman	Ciater	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
93	R-40	Yati	Cilenggang	Serpong	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
94	R-41	Yudi Heryadi	Cilenggang	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
95	R-47	Topan	Cilenggang	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
96	R-45	Harry	Cilenggang	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
97	R-46	Zulmadi	LGB	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
98	R-52	Urip Kamanjaya	LGB	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
99	R-49	Tarsidi	LGB	Serpong	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
					98	1	0	33	65	0	0	99	0	0	99	0	0	2	97	0	2	97	0	

A = Apakah Menerima Raskin?

B = Berapa Harga Tebus dlm Rb?

C = Berapa Kg RaskinYg Dibagi?

D = Berapa Kali dlm 2008?

E = Tahu Kondisi Raskin?

F = Tahu Kualitas Raskin?

a. 16-19,2

a. 12-15 kg

a. 8-10

a. Bagus

a. Bagus

b. 19,2 - 22,4

b. 9-12 kg

b. 6-7

b. Sedang

b. Sedang

c. >22,4

c. <9 kg

c. <6

c. Jelek

c. Jelek

**Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
Tokoh Masyarakat**

No	Respon	Nama	Desa	Kecamatan	A		B			C			D			E			F		
					Ya	Tdk	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
1	T-04	Syamsudin Ja'far	Cibogo	Cisauk	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2	T-07	Indriani	Lengkong Kulon	Pagedangan	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
3	T-15	Fakhrudin RL	Jurangmangu Barat	Pd Aren	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4	T-09	Sambodo	Buaran	Serpong	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
					0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4
1	T-16	Jacky Harahap	Serpong	Serpong	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2	T-05	Setia Budi	Bojong Nangka	Legok	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
3	T-11	Eni Suhaeni	Bojong Nangka	Legok	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4	T-14	Danil	Taktakan	Serang	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Total			0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4

A = Apakah Menerima Raskin?

B = Berapa Harga Tebus dlm Rb?

C = Berapa Kg RaskinYg Dibagi?

D = Berapa Kali dlm 2008?

E = Tahu Kondisi Raskin?

F = Tahu Kualitas Raskin?

a. 16-19,2

a. 12-15 kg

a. 8-10

a. Bagus

a. Bagus

b. 19,2 - 22,4

b. 9-12 kg

b. 6-7

b. Sedang

b. Sedang

c. >22,4

c. <9 kg

c. <6

c. Jelek

c. Jelek

Profil Responden RTM
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang

No	No Responden	Nama	L/P	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Anggota Kel	Alamat	Desa	Kecamatan
1	R-01	Sanwani	L	53	SMP	Buruh Pasar	1,200,000	10	Kp Suradita 003/01	Suradita	Cisauk
2	R-03	Sunaiti	P	37	SD	IRT	800,000	7	Kp Suradita 003/01	Suradita	Cisauk
3	R-05	Rami	P	45	Tdk	IRT	600,000	4	Kp Cibogo 017/03	Cibogo	Cisauk
4	R-06	Hasan	L	55	Tdk	Kuli	500,000	4	Kp Cibogo 017/03	Cibogo	Cisauk
5	R-100	A Rohim	L	45	SD	Buruh	900,000	6	Kp Cibogo Rt16/3	Cibogo	Cisauk
6	R-102	Nasir	L	52	SD	Buruh	900,000	6	Cisauk Rt 04/03	Cisauk	Cisauk
7	R-103	Rabudin	L	46	SD	Buruh	900,000	5	Suradita Rt04/02	Suradita	Cisauk
8	R-104	Warsa	L	50	SD	Buruh	800,000	5	Cibogo Rt 16/03	Cibogo	Cisauk
9	R-105	Selamet	L	46	SD	Buruh	900,000	6	Cibogo Rt 16/03	Cibogo	Cisauk
10	R-106	Gani	L	50	SD	Tani	800,000	5	Suradita RT02/02	Suradita	Cisauk
11	R-107	Akmar	L	45	SD	Tani	800,000	6	Suradita Rt03/02	Suradita	Cisauk
12	R-108	Jajuli	L	46	SD	Tani	800,000	4	Suradita Rt03/02	Suradita	Cisauk
13	R-109	Suhendi	L	48	SD	Dagang	900,000	5	Cibogo Rt 16/03	Cibogo	Cisauk
14	R-110	Miun	L	45	SD	Ojek	900,000	4	Cibogo Rt17/04	Cibogo	Cisauk
15	R-111	Marsani	L	45	SD	Ojek	900,000	5	Cibogo Rt 15/04	Cibogo	Cisauk
16	R-17	Hani	P	32	SMA	IRT	900,000	4	Kp Cisauk Erpak	Cisauk	Cisauk
17	R-18	Suandi	L	60	SD	Buruh Serabutan	800,000	6	Kp Cisauk Erpak	Cisauk	Cisauk
18	R-20	Janiyah	P	30	SMP	IRT	1,000,000	5	Kp Cisauk Erpak	Cisauk	Cisauk
19	R-13	Taslih Wahyudin	L	31	SMA	Buruh	1,200,000	4	Kp Cihuni	Cihuni	Pagedangan
20	R-14	Kuswandi	L	32	SMA	Buruh	1,250,000	4	Kp Cihuni	Cihuni	Pagedangan
21	R-15	Rahmati	P	25	SMA	IRT	1,500,000	4	Kp Cihuni	Cihuni	Pagedangan
22	R-126	Saman	L	48	SD	Buruh Tani	400,000	5	Rt 01/02	Cihuni	Pagedangan
23	R-127	Arsid	L	37	SD	Buruh Tani	400,000	4	Rt 01/02	Cihuni	Pagedangan
24	R-128	Utar	L	46	SD	Buruh Tani	400,000	6	Rt 02 / 02	Cihuni	Pagedangan
25	R-129	Sanusi	L	52	SD	Buruh Tani	400,000	9	Rt 03 / 02	Cihuni	Pagedangan
26	R-130	Tahiri	L	60	SD	Buruh Tani	400,000	7	Rt 03 / 03	Cihuni	Pagedangan
27	R-80	Masdana	L	46	SMA	Guru Honor	500,000	5	Kp Jatake	Kadusirung	Pagedangan
28	R-81	Atiyah	P	36	SMP	Guru Ngaji	700,000	10	Kp Kadusirung	Kadusirung	Pagedangan
29	R-82	Asep	L	30	SMA	Buruh	1,000,000	5	Jatake	Kadusirung	Pagedangan
30	R-83	Nanang	L	29	SMA	Buruh	1,100,000	3	Jatake	Kadusirung	Pagedangan
31	R-07	Azizah	P	30	SMP	IRT	1,000,000	2	Kp Pugur	Lengkong Kulon	Pagedangan
32	R-08	Maryudin	L	45	PGA	Buruh Bangunan	1,000,000	5	Kp Pugur	Lengkong Kulon	Pagedangan
33	R-11	Diyong	P	55	Tdk	Buruh Serabutan	500,000	5	Kp Lengkong Ulama	Lengkong Kulon	Pagedangan

Profil Responden RTM
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang

No	No Responden	Nama	L/P	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Anggota Kel	Alamat	Desa	Kecamatan
34	R-116	Madsita	L	51	SD	Buruh Tani	400,000	9	Kp Rawabuaya	Medang	Pagedangan
35	R-117	Pardi	L	49	SD	Buruh Tani	400,000	7	Kp Rawabuaya	Medang	Pagedangan
36	R-118	Uki	L	45	SD	Dagang Peci	500,000	11	Kp Rawabuaya	Medang	Pagedangan
37	R-119	Midah	P	40	SD	Buruh Cuci	300,000	7	Kp Rawabuaya	Medang	Pagedangan
38	R-120	Munah	P	50	SD	Buruh Masak	400,000	7	Kp Rawabuaya	Medang	Pagedangan
39	R-09	Seli	L	55	SD	Buruh Serabutan	500,000	7	Dusun Cicayur	Pagedangan	Pagedangan
40	R-10	Mad Surip	L	52	SD	Buruh Serabutan	500,000	3	Dusun Cicayur	Pagedangan	Pagedangan
41	R-12	Amir	L	60	SD	Tani	900,000	4	Dusun Cicayur	Pagedangan	Pagedangan
42	R-112	Nana	L	40	SMA	Buruh Bangunan	600,000	5	Rt 01 Rw 03	Pagedangan	Pagedangan
43	R-113	Madsuki	L	43	SD	Buruh Bangunan	500,000	4	Kp Rancalele	Pagedangan	Pagedangan
44	R-114	Marwan	L	40	SD	Buruh Bangunan	600,000	4	Rt01 RW 03	Pagedangan	Pagedangan
45	R-115	Yayat	L	45	SD	Buruh	600,000	5	Rt 03 Rw 03	Pagedangan	Pagedangan
46	R-101	Hasbuna	L	43	SD	Buruh	900,000	5	Situ Gadung Rt04/02	Situgadung	Pagedangan
47	R-131	Iskandar	L	56	SD	Dagang Nasi uduk	600,000	5	Jaha Kirey	Situgadung	Pagedangan
48	R-132	Mad Yani	L	35	SD	Ojek	500,000	4	Jaha Kirey	Situgadung	Pagedangan
49	R-133	Andi	L	60	SD	Buruh Serabutan	500,000	7	Jaha Kirey	Situgadung	Pagedangan
50	R-134	Pendi	L	30	SD	Buruh Tani	500,000	6	Cijantra	Cijantra	Pagedangan
51	R-135	Rosyid	L	55	SMP	Guru	700,000	6	Cijantra	Cijantra	Pagedangan
52	R-136	Rimin	L	45	SD	Buruh Tani	500,000	5	Cijantra	Cijantra	Pagedangan
53	R-137	Dayat	L	50	SD	Buruh Tani	400,000	5	Cijantra	Cijantra	Pagedangan
54	R-59	Tipis	P	50	Tdk	IRT	800,000	5	Rt 07 / 03 Pd Jati	Jurbar	Pd Aren
55	R-60	Asti	P	50	Tdk	IRT	800,000	5	Rt 07 / 03 Pd Jati	Jurbar	Pd Aren
56	R-61	Tuning	P	42	Tdk	IRT	800,000	4	Rt 06/03 Pd Jati	Jurbar	Pd Aren
57	R-62	Marsih	P	44	SLTA	IRT	900,000	4	Rt 06/03 Pd Jati	Jurbar	Pd Aren
58	R-68	Khotimah	P	60	Tdk	IRT	800,000	5	Jl Pesantren 03/01	Jurtim	Pd Aren
59	R-67	Sati	P	52	Tdk	IRT	900,000	4	Jl Pesantren 03/01	Jurtim	Pd Aren
60	R-70	Ameh	P	47	SD	IRT	1,000,000	4	Jl Pesantren 03/01	Jurtim	Pd Aren
61	R-69	Sijih	L	55	SD	Wiraswasta	1,000,000	6	Jl Pesantren 03/01	Jurtim	Pd Aren
62	R-138	Sarmili HN	L	39	SLTA	Ketua RT	1,500,000	6	Jl Pesantren 03/01	Jurtim	Pd Aren
63	R-64	Maemunah	P	45	SD	IRT	800,000	7	Rt 01/11 Pd Aren	Pd Aren	Pd Aren
64	R-63	Nuryani	P	41	SMP	IRT	900,000	4	Taman Mangu 02/06	Pd Aren	Pd Aren
65	R-65	Sri Asih	P	54	SMP	IRT	900,000	9	Taman Mangu 02/06	Pd Aren	Pd Aren
66	R-66	M Suroh	L	47	SMP	Ketua RT 01/11	1,000,000	7	Rt 01/11 Pd Aren	Pd Aren	Pd Aren

Profil Responden RTM
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang

No	No Responden	Nama	L/P	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Anggota Kel	Alamat	Desa	Kecamatan
67	R-139	Abdul Manan	L	52	SMP	Ketua RW	1,500,000	6	Rt03/02 Jln H Biru	Pd Aren	Pd Aren
68	R-77	Mislah	P	39	SD	IRT	850,000	6	Bambu Kuning 01/04	Pd Betung	Pd Aren
69	R-76	Nur Azizah	P	46	SD	IRT	900,000	5	Bambu Kuning 01/04	Pd Betung	Pd Aren
70	R-78	Koriah	P	33	SLTA	IRT	1,450,000	5	Bambu Kuning 01/04	Pd Betung	Pd Aren
71	R-140	Madin	L	50	SD	Buruh Serabutan	400,000	6	Kebon Kopi	Pd Betung	Pd Aren
72	R-72	Sri Mulyati	P	36	D3	Guru	300,000	4	Rt05/03	Pd Karya	Pd Aren
73	R-74	Sami	P	41	SD	IRT	600,000	4	Rt05/03	Pd Karya	Pd Aren
74	R-75	Nur Hami	P	60	SD	IRT	600,000	7	Jl SD Inpres 07 / 03	Pd Karya	Pd Aren
75	R-73	Munali	L	57	SD	Marbot	700,000	9	Pabuaran 04 / 07	Pd Karya	Pd Aren
76	R-71	Hera	P	32	SLTA	IRT	1,000,000	6	Rt05/03	Pd Karya	Pd Aren
77	R-54	Yanah	P	30	SD	IRT	800,000	5	Jl Yaspatar 04/01	Pd Pucung	Pd Aren
78	R-55	Yani	P	43	SMP	IRT	800,000	5	Jl Yaspatar 04/01	Pd Pucung	Pd Aren
79	R-57	Inah	P	56	Tdk	IRT	800,000	11	Jl Yaspatar 04/01	Pd Pucung	Pd Aren
80	R-58	Rijah	P	50	Tdk	IRT	800,000	9	Jl Yaspatar 04/01	Pd Pucung	Pd Aren
81	R-56	Sarni	P	42	SD	Dagang	900,000	9	Jl Yaspatar 04/01	Pd Pucung	Pd Aren
82	R-121	Aliyah	P	42	SD	Dagang Nasi uduk	300,000	6	Manunggal V	Prigi Baru	Pd Aren
83	R-122	Nasan	L	50	SD	Buruh Tani	150,000	5	Manunggal V	Prigi Baru	Pd Aren
84	R-123	Rani	P	47	SD	IRT	100,000	4	Manunggal V	Prigi Baru	Pd Aren
85	R-124	Rion	L	35	SD	Buruh Tani	150,000	6	Manunggal V	Prigi Baru	Pd Aren
86	R-125	Ani	P	50	SD	IRT	250,000	5	Manunggal V	Prigi Baru	Pd Aren
87	R-21	Mahfudin	L	46	SD	Buruh Serabutan	300,000	6	Ampera Rt008/07	Buaran	Serpong
88	R-26	Yamin	L	33	SMP	Office Boy	900,000	3	Ampera Rt03/02	Buaran	Serpong
89	R-29	Jumali	L	24	SMA	Satpam	1,000,000	5	Ampera Rt03/06	Buaran	Serpong
90	R-37	Muan	L	54	SD	Buruh Tani	700,000	7	Maruga	Ciater	Serpong
91	R-38	Sapii	L	40	SD	Buruh Serabutan	600,000	5	Maruga	Ciater	Serpong
92	R-35	Sarman	L	45	SMP	Buruh Serabutan	600,000	6	Ciater Rt10/06	Ciater	Serpong
93	R-40	Yati	P	50	SD	IRT	500,000	5	Cilenggang	Cilenggang	Serpong
94	R-41	Yudi Heryadi	L	35	SMA	Buruh	900,000	3	Cilenggang	Cilenggang	Serpong
95	R-47	Topan	L	33	SMP	Buruh Serabutan	200,000	3	Cilenggang	Cilenggang	Serpong
96	R-45	Harry	L	18	SMA	Wiraswasta	300,000	1	Cilenggang	Cilenggang	Serpong
97	R-46	Zulmadi	L	25	SMA	Karyawan	1,100,000	3	Jl. Raya Serpong	LGB	Serpong
98	R-52	Urip Kamanjaya	L	33	SMA	Wiraswasta	150,000	1	Lengkong Gudang	LGB	Serpong
99	R-49	Tarsidi	L	36	SMA	Wiraswasta	500,000	5	Astek Rt01/04	LGB	Serpong

Profil Responden Tokoh Masyarakat
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang

No	No Responden	Nama	L/P	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Penghasilan	Anggota Kel	Alamat	Desa	Kecamatan
1	T-04	Syamsudin Ja'far	L	58	SMA	Ketua RT		6	Cibogo 017/03	Cibogo	Cisauk
2	T-07	Indriani	P	35	SMA	Kader PKK			Kp Pugur	Lengkong Kulon	Pagedangan
3	T-15	Fakhrudin RL	L	54	S 1	Tokoh Masy			Perum Japos	Jurangmangu Barat	Pd Aren
4	T-09	Sambodo	L	32	SMK	Tokoh Pemuda			Buaran Hankam	Buaran	Serpong
1	T-11	Eni Suhaeni	P	40	S 2	DPRD - PPP			Dasana	Bojong Nangka	Legok
2	T-14	Danil	L	32	S 1	LSM Barak			Taktakan	Taktakan	Serang
3	T-16	Jacky Harahap	L	52	SMA	DPRD - Golkar			BSD	Serpong	Serpong
4	T-05	Setia Budi	L	54	SMA	Ketua Forum BKM Tangerang			Dasana	Bojong Nangka	Legok

Sosialisasi
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
RTM

No	No Responden	Nama	Desa	Kecamatan	1		2		3		4		5		6		7		8	
					Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	R-01	Sanwani	Suradita	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	R-03	Sunaiti	Suradita	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	R-05	Rami	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
4	R-06	Hasan	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	R-100	A Rohim	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6	R-102	Nasir	Cisauk	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
7	R-103	Rabudin	Suradita	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
8	R-104	Warsa	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
9	R-105	Selamet	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	R-106	Gani	Suradita	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	R-107	Akmar	Suradita	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
12	R-108	Jajuli	Suradita	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
13	R-109	Suhendi	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
14	R-110	Miun	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
15	R-111	Marsani	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
16	R-17	Hani	Cisauk	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
17	R-18	Suandi	Cisauk	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
18	R-20	Janiyah	Cisauk	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
19	R-13	Taslih Wahyudin	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
20	R-14	Kuswandi	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
21	R-15	Rahmati	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
22	R-126	Saman	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
23	R-127	Arsid	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
24	R-128	Utar	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
25	R-129	Sanusi	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
26	R-130	Tahiri	Cihuni	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
27	R-80	Masdana	Kadusirung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
28	R-81	Atiyah	Kadusirung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
29	R-82	Asep	Kadusirung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
30	R-83	Nanang	Kadusirung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
31	R-07	Azizah	Lengkong Kulon	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
32	R-08	Maryudin	Lengkong Kulon	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
33	R-11	Diyong	Lengkong Kulon	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Sosialisasi
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
RTM

No	No Responden	Nama	Desa	Kecamatan	1		2		3		4		5		6		7		8	
					Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
34	R-116	Madsita	Medang	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
35	R-117	Pardi	Medang	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
36	R-118	Uki	Medang	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
37	R-119	Midah	Medang	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
38	R-120	Munah	Medang	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
39	R-09	Seli	Pagedangan	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
40	R-10	Mad Surip	Pagedangan	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
41	R-12	Amir	Pagedangan	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
42	R-112	Nana	Pagedangan	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
43	R-113	Madsuki	Pagedangan	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
44	R-114	Marwan	Pagedangan	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
45	R-115	Yayat	Pagedangan	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
46	R-101	Hasbuna	Situgadung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
47	R-131	Iskandar	Situgadung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
48	R-132	Mad Yani	Situgadung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
49	R-133	Andi	Situgadung	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
50	R-134	Pendi	Cijantra	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
51	R-135	Rosyid	Cijantra	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
52	R-136	Rimin	Cijantra	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
53	R-137	Dayat	Cijantra	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
54	R-59	Tipis	Jurbar	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
55	R-60	Asti	Jurbar	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
56	R-61	Tuning	Jurbar	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
57	R-62	Marsih	Jurbar	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
58	R-68	Khotimah	Jurtim	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
59	R-67	Sati	Jurtim	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
60	R-70	Ameh	Jurtim	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
61	R-69	Sijih	Jurtim	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
62	R-138	Sarmili HN	Jurtim	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
63	R-64	Maemunah	Pd Aren	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
64	R-63	Nuryani	Pd Aren	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
65	R-65	Sri Asih	Pd Aren	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
66	R-66	M Suroh	Pd Aren	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Sosialisasi
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
RTM

No	No Responden	Nama	Desa	Kecamatan	1		2		3		4		5		6		7		8	
					Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
67	R-139	Abdul Manan	Pd Aren	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
68	R-77	Mislah	Pd Betung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
69	R-76	Nur Azizah	Pd Betung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
70	R-78	Korlah	Pd Betung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
71	R-140	Madin	Pd Betung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
72	R-72	Sri Mulyati	Pd Karya	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
73	R-74	Sami	Pd Karya	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
74	R-75	Nur Hami	Pd Karya	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
75	R-73	Munali	Pd Karya	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
76	R-71	Hera	Pd Karya	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
77	R-54	Yanah	Pd Pucung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
78	R-55	Yani	Pd Pucung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
79	R-57	Inah	Pd Pucung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
80	R-58	Rijah	Pd Pucung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
81	R-56	Sarni	Pd Pucung	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
82	R-121	Aliyah	Prigi Baru	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
83	R-122	Nasan	Prigi Baru	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
84	R-123	Rani	Prigi Baru	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
85	R-124	Rion	Prigi Baru	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
86	R-125	Ani	Prigi Baru	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
87	R-21	Mahfudin	Buaran	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
88	R-26	Yamin	Buaran	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
89	R-29	Jumali	Buaran	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
90	R-37	Muan	Ciater	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
91	R-38	Sapii	Ciater	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
92	R-35	Sarman	Ciater	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
93	R-40	Yati	Cilenggang	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
94	R-41	Yudi Heryadi	Cilenggang	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
95	R-47	Topan	Cilenggang	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
96	R-45	Harry	Cilenggang	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
97	R-46	Zulmadi	LGB	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
98	R-52	Urip Kamanjaya	LGB	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
99	R-49	Tarsidi	LGB	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
					2	99	4	99	6	99	8	99	10	99	12	99	14	99	16	99

1 = Apakah Ikut Sosialisasi

2 = Pernah melihat brosur/pamflet

3 = Pernah Iku Musdes membahas Raskin

4 = Tahu Berapa Kg Hak RTM per bulan

5 = Tahu Harga Raskin

6 = Tahu Kualitas

7 = Tahu Berapa Kali Raski setahun

8 = Tahu Cara Mengadu

Sosialisasi
Evaluasi Kinerja Raskin Kabupaten Tangerang
Tokoh Masyarakat

No	No Responden	Nama	Desa	Kecamatan	1		2		3		4		5		6		7		8	
					Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1	T-04	Syamsudin Ja'far	Cibogo	Cisauk	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	T-07	Indriani	Lengkong Kulon	Pagedangan	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	T-15	Fakhrudin RL	Jurangmangu Bar	Pd Aren	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
4	T-09	Sambodo	Buaran	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		Jumlah			0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4

1	T-05	Setia Budi	Bojong Nangka	Legok	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	T-11	Eni Suhaeni	Bojong Nangka	Legok	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	T-14	Danil	Taktakan	Serang	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
4	T-16	Jacky Harahap	Serpong	Serpong	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		Total			0	4	0	4	0	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

1 = Apakah Ikut Sosialisasi

2 = Pernah melihat brosur/pamflet

3 = Pernah Iku Musdes membahas Raskin

4 = Tahu Berapa Kg Hak RTM per bulan

5 = Tahu Harga Raskin

6 = Tahu Kualitas

7 = Tahu Berapa Kali Raski setahun

8 = Tahu Cara Mengadu